

# PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI INDONESIA: Peluang dan Tantangan

**Tim Penulis:**  
**Sudarmono**  
**Abdullah Fatah**  
**Afifah Dwi Wulandari**  
**Alan Dwi Hadi Saputro**  
**Angel Amelia Putri**  
**Firda Tasya Ulayya**  
**Muhammad Hanif Muttaqin**  
**Ni Wayan Ariyuni**  
**Anastasya Nur Azzura**  
**Asri Aulia**  
**Firta Suci Muharrami**  
**Hasril Manggo**  
**Millen Tawar Tua Naibaho**  
**Muhammad Taofan Angger Ardana**  
**Nurul Fitriani Panjili**  
**Sirilus Usanto Pabalayo**  
**Sri Indah Kartikasari**  
**Angelina Kamila Lalo**  
**Dicky Maulana Saputra**  
**Dita Septiara Wulandari**  
**Rizky Eggy Chandra Bu'ulolo**



Editor: SUDARMONO

# **Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia: Peluang dan Tantangan**



**Editor : Sudarmono, S.STP., M.Si., Ph.D.**

# **Judul : Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia: Peluang dan Tantangan**

Penulis :

**Sudarmono**

**Abdullah Fatah**

**Afifah Dwi Wulandari**

**Alan Dwi Hadi Saputro**

**Angel Amelia Putri**

**Firda Tasya Ulayya**

**Muhammad Hanif Muttaqin**

**Ni Wayan Ariyuni**

**Anastasya Nur Azzura**

**Asri Aulia**

**Firta Suci Muharrami**

**Hasril Manggo**

**Millen Tawar Tua Naibaho**

**Muhamad Taofan Angger Ardana**

**Nurul Fitriani Panjili**

**Sirilus Usanto Pabalayo**

**Sri Indah Kartikasari**

**Angelina Kamila Lalo**

**Dicky Maulana Saputra**

**Dita Septiara Wulandari**

**Rizky Eggy Chandra Bu'ulolo**

Editor :

**Sudarmono, S.STP., M.Si., Ph.D.**

Desain Sampul dan Layout :  
**Moch. Hibatullah & Sudarmono**

Cetakan pertama, Mei 2021

xvii + 224 Halaman, Ukuran 14,5 x 21 cm

ISBN : 978-623-6228-64-7

Diterbitkan oleh :

**CV. PUTRA SURYA SANTOSA**

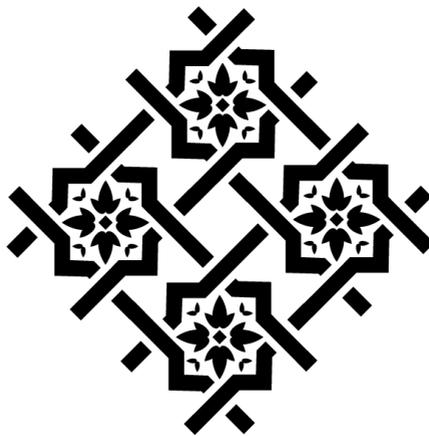
Alamat: Perum Permata Godean 1 C3, Desa Sidokarto RT.

02/05 Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

E-mail: [putrasuryasantosa@gmail.com](mailto:putrasuryasantosa@gmail.com)

HP : 08121603-3775, E-mail

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit. Isi di luar tanggung jawab penerbit



## Prakata

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segenap berkat dan rahmat-Nya sehingga buku ini dapat selesai. Buku yang tersaji di hadapan Anda adalah merupakan bagian dari pengembangan perkuliahan Pembangunan Ekonomi Regional untuk Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, khususnya pada Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Fakultas Politik Pemerintahan, IPDN.

Buku ini mengetengahkan pandangan dari para penulis mengenai tantangan pembangunan ekonomi regional serta kerangka kebijakan yang dapat menjadi solusi atas permasalahan ekonomi inklusif di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif merupakan sebuah pendekatan yang cukup efektif dalam mereduksi dampak pembangunan yang cenderung lebih berpihak kepada kelompok masyarakat yang memiliki akses yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Kelompok-kelompok marginal kerap kali hanya dapat menjadi penonton, bahkan lambat laun menjadi tamu di rumah sendiri.

Keunggulan dari buku ini adalah kedudukan para penulis yang pernah menetap di daerah yang mereka pilih sebagai lokus tulisan. Tentunya, pengalaman ini turut memperkuat ide dan gagasan yang mereka kemukakan. Meskipun terkesan sebagai penulis pemula, namun ide dan pemikiran para penulis terbilang cukup baik dan disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Terlepas dari semua kelebihan dan kekurangannya, karya ini telah menjadi *legacy* Praja IPDN Angkatan XXX yang secara sadar atau tidak disadari akan menjadi standar yang tinggi dan harus sanggup dilampaui oleh generasi-generasi berikutnya. Angkatan XXX telah mewariskan sebuah tradisi baik, bahwa setiap praja memiliki potensi yang luar biasa baiknya. Meskipun demikian, karya ini pun tidak luput dari kekurangan yang masih memerlukan kritik dan saran dari para pembaca.

Secara khususnya, ijinkan kami menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Rektor IPDN, para Wakil Rektor beserta seluruh jajaran struktural, para dekan serta para dosen. Lebih khusus, terima kasih kami sampaikan kepada Madya Praja Angkatan XXX, khususnya Kelas C4, Kelas C5 dan Kelas C6. Semoga karya ini dapat menjadi berkah bagi kita semua.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segenap kekurangan. Semoga kami dapat hadir dalam karya-karya yang lebih baik, serta senantiasa menghadirkan #TradisiBaikIPDN.

Jatinangor, Mei 2021

Editor,

Sudarmono, S.STP., M.Si., Ph.D.

## Kata Pengantar

Dinamika globalisasi telah merambah seluruh sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dimulai dari masuknya era teknologi informasi yang mengubah pola-pola interaksi sosial masyarakat, menjadi semakin instan dan perlahan-lahan mengabaikan aspek kohesivitas sosial yang selama ini dipertahankan oleh masyarakat. Di sisi lain, masyarakat kita juga sedang berhadapan dengan pesatnya arus pembangunan ekonomi global yang mengintegrasikan pola-pola bisnis yang cepat, *borderless*, serta mengandung resiko-resiko tertentu dimana seringkali masyarakat diposisikan sebagai objek pembangunan dibandingkan sebagai subjek yang turut andil dalam menentukan corak pembangunan.

Permasalahan baru kemudian muncul ketika pemerintah harus mengakomodir masyarakatnya yang tidak mampu bersaing secara terbuka, baik pada skala lokal maupun skala global. Pemerintah perlu memikirkan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan afirmatif yang mempertegas posisi pemerintah dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Inovasi-inovasi baru di bidang ekonomi mikro harus terus dikembangkan, khususnya pada sektor UMKM serta sektor-sektor ekonomi informal lainnya.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan kedinasan yang melahirkan kader pamong praja, IPDN bertekad menghadirkan kader-kader pamong praja yang memiliki wawasan dan daya saing global. Mereka diharapkan mampu berinteraksi dengan masyarakat global, khususnya di

kawasan ASEAN dengan bekal sensitivitas dan keinginan yang kuat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat di wilayah penugasannya masing-masing.

Sebagai contoh, pada salah satu bagian buku ini diketengahkan sebuah tulisan tentang bagaimana tradisi seni ukir di Jepara mulai menghadapi persoalan rendahnya minat pemuda untuk menekuni dan meneruskan tradisi ini. Penetrasi khazanah seni ukir Jepara sudah dikenal di seluruh dunia, namun kita perlu memikirkan regenerasi agar tradisi ini bisa terus dilestarikan. Tentunya, diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif dari pemerintah setempat.

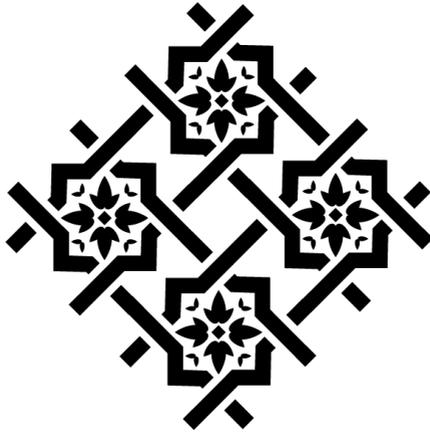
Buku ini juga mengenalkan sebuah budaya akademik baru, dimana praja juga bisa melahirkan sebuah karya akademik dalam bentuk buku. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas para praja bergerak ke arah yang sangat positif. Selain itu, karya ini juga disusun dengan *quality control* yang cukup ketat. Dengan demikian, ide-ide dan gagasan Madya Praja Angkatan XXX yang dirangkumi melalui buku ini telah menjadi tonggak sejarah baru bagi lahirnya tradisi akademik yang baik. Kami perlu memberikan perhatian dan apresiasi terhadap upaya-upaya kolektif yang memperkuat integritas akademik yang baik di kalangan praja.

Akhir kata, selamat membaca. Semoga karya ini dapat menjadi #tradisibaikIPDN ke depannya.

Jatinangor, Juni 2021  
Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Hukum

Dr. Deti Mulyati, SH., MH., CN.

---



## DAFTAR ISI

	Hal.
Prakata Editor	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii
BAB I	
Kepada Siapa Pembangunan Berpihak? Sebuah catatan pengantar <i>Sudarmono</i>	1
BAB II	
Analisis Dampak Kebijakan Boyolali Pro Investasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Boyolali <i>Abdullah Fatah</i>	11
BAB III	
Pengelolaan Dana PIPPK (Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan) Di Kota Bandung <i>Afifah Dwi Wulandari</i>	19
BAB IV	
Dampak Pembangunan Bandara Internasional Terhadap Peningkatan Pendapatan Ojek Online Di Kediri Dan Sekitarnya <i>Alan Dwi Hadi Saputro</i>	28

BAB V	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tanah Datar <i>Angel Amelia Putri</i>	37
BAB VI	Upaya Peningkatan Minat Pemuda Dalam Kegiatan Karya Seni Ukir Di Kabupaten Jepara <i>Firda Tasya Ulayya</i>	45
BAB VII	Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Belitung Dengan Mengandalkan Sektor Pariwisata Dan Perikanan Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Muhammad Hanif Muttaqin</i>	54
BAB VIII	Peran TPS3R Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sampah Sampai Dengan Meningkatkan Pendapatan Desa Di Kabupaten Gianyar <i>Ni Wayan Ariyuni</i>	63
BAB IX	Peran Dinas Pariwisata Lombok Tengah Dalam Pengembangan Objek Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Melalui Media Sosial <i>Anastasya Nur Azzura</i>	76

BAB X	Strategi Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandung <i>Asri Aulia</i>	86
BAB XI	Pengaruh Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendongkrak Perekonomian Aceh <i>Firta Suci Muharrami</i>	95
BAB XII	Upaya Pembangunan Industri Pengolahan Dalam Memaksimalkan Hasil Pertanian Masyarakat Di Kabupaten Bolaang Mongondow <i>Hasril Manggo</i>	104
BAB XIII	Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan <i>Millen Tawar Tua Naibaho</i>	112
BAB XIV	Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Dampaknya terhadap Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Di Masa Pandemi <i>Muhamad Taofan Angger Ardana</i>	122
BAB XV	Partisipasi Komunitas Daerah “ <i>Institut Mosintuwu</i> ” Dalam Pembangunan Ekonomi Regional di Daerah <i>Post Conflict</i> Poso Sulawesi Tengah <i>Nurul Fitriani Panjili</i>	133

BAB XVI	Tantangan Pengelolaan Hasil Pertanian Padi Masyarakat Kabupaten Landak <i>Sirilus Usanto Pabalayo</i>	143
BAB XVII	Operasionalisasi Program 3A Dalam Meningkatkan Kualitas Destinasi Pariwisata di Kotawaringin Barat <i>Sri Indah Kartikasari</i>	154
BAB XVIII	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Lokal Melalui Pengembangan Daerah Pesisir Sebagai Tempat Pariwisata Di Sumba <i>Angelina Kamila Lalo</i>	168
BAB XIX	Peran Pemerintah Kota Palangkaraya dalam Mempromosikan Wisata Kuliner melalui Pelibatan UMKM <i>Dicky Maulana Saputra</i>	176
BAB XX	Pembatasan Perizinan Pembangunan Ritel Modern untuk Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyuwangi <i>Dita Septiara Wulandari</i>	186
BAB XXI	Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Lemang Di Kota Tebing Tinggi <i>Rizky Eggy Chandra Bu'ulolo</i>	196

BAB XXII	Kebijakan Afirmatif sebagai solusi dalam mengakselerasi Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia <i>Sudarmono</i>	207
Biodata Editor dan Penulis		211



## BAB 1

### Kepada Siapa Pembangunan Berpihak? Sebuah catatan pengantar

Sudarmono

#### Latar belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara melalui pemerintahannya telah berupaya dengan sekuat tenaga dan segenap potensi yang dimiliki untuk terus membangun bangsa dan negara, baik dari dimensi sosial maupun dimensi ekonominya. Dimensi sosial diartikan sebagai terpenuhinya segenap kebutuhan sosial masyarakat, harkat dan martabat sebagai manusia dan sebagai bangsa yang merdeka, keterwakilan dan jaminan partisipasi mereka secara lebih demokratis serta terpenuhinya rasa keadilan. Secara ekonomi, mereka mendapat predikat ‘sejahtera’ bagi keluarganya, sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan, akses pendidikan berkualitas dan bentuk-bentuk pencapaian kecukupan ekonomi lainnya.

Hanya saja, pembangunan tidak serta merta menunjukkan keberpihakannya kepada mereka yang seharusnya menjadi kelompok-kelompok prioritas. Pertumbuhan ekonomi terus bergerak ke arah yang membaik, namun di sisi lain proses marjinalisasi juga hadir. Ketimpangan semakin nyata di depan mata. Serapan kelompok usia produktif dalam pasar tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah lulusan perguruan tinggi yang setiap tahun mewarnai grafik angka pengangguran. Sekalipun

terserap dalam dunia kerja (Kristyanto,2015)<sup>1</sup> , namun berapa banyak diantara mereka yang bekerja pada bidang yang linear dengan keilmuan mereka?

Variansi ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia sesungguhnya juga dapat ditemukan di negara-negara berkembang. Ketidakadilan dalam akses kesempatan ekonomi juga banyak ditemukan di kota-kota besar dengan memiliki latar belakang ekonomi yang cukup timpang. Hariyanto (2018) menjelaskan bahwa fenomena kemiskinan dan ketidakadilan global ditunjukkan dengan adanya 20% populasi dunia yang mampu menikmati lebih dari 70% pendapatan dunia, atau dengan kata lain sebanyak 80% populasi dunia hanya mampu menikmati kurang dari 30% pendapatan dunia. Ia melihat dinamika ketimpangan di Indonesia sangat timpang, meskipun pertumbuhan ekonomi cenderung lebih baik. DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Papua adalah contoh dari wilayah di Indonesia yang memiliki ketimpangan tertinggi dengan nilai indeks Gini ratio mencapai sekitar 0,43. (Hariyanto, 2018)

Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, bangsa Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa badai besar Covid-19 telah meluluhlantakkan setiap sendi sosial ekonomi seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Prediksi kelompok ilmuwan tidak dapat memberikan estimasi yang pasti mengenai kapan badai ini segera berakhir. Kita hanya bisa berhitung,

---

<sup>1</sup> Kristyanto (2015) melakukan penelitian yang dilatarbelakangi oleh permasalahan kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang belum mengarah pada pertumbuhan inklusif. Ia menggunakan dengan indikator berkurangnya tingkat pengangguran, berkurangnya ketimpangan pendapatan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui penelitiannya, ia bermaksud mengetahui sektor apa saja yang mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan seberapa besar dampak sektor inklusif terhadap aktivitas ekonomi Jawa Timur

sampai berapa lama kita dapat bertahan di tengah situasi yang sedemikian ini.

Dengan mencermati dinamika terkini, penulis menganggap bahwa pemerintah tidak lagi mempunyai pilihan lain kecuali dengan melakukan proses adaptasi kebiasaan baru (*new-normal*). Salah satu yang dapat menjadi solusi adalah dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi mikro, khususnya UMKM dan sektor ekonomi informal lainnya. Melalui kesempatan ini, penulis beserta beberapa koleganya bermaksud menuangkan sudut pandang dalam mencermati dinamika pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

Meskipun isu pembangunan ekonomi inklusif lebih sering dibahas sebagai cabang dari ilmu ekonomi, namun kenyataan menunjukkan bahwa setiap persoalan yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat diasumsikan sebagai objek yang dapat dibedah dari berbagai disiplin keilmuan. Hal ini menunjukkan bahwa hadirnya sebuah pendekatan yang multidisiplin adalah sebuah keharusan dalam menganalisis isu-isu sosial di masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memdeskripsikan konsep dan beberapa dimensi lainnya yang berkembang seputar isu pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

### Konseptualisasi Pembangunan Ekonomi Inklusif

Kim Eric Bettcher (2015:1) menyatakan bahwa ekonomi inklusif merujuk kepada kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam mengakses peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dari suatu Negara, baik dalam kapasitas sebagai pekerja, pengusaha, konsumen maupun sebagai anggota masyarakat biasa. Semua individu dari berbagai latar belakang strata sosial harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan menuai manfaat dari partisipasi mereka. Secara fundamental, karakteristik inklusi

memerlukan akses tanpa bisa ke pasar, sumber daya dan kesempatan.

Renie (2019) mengemukakan bahwa konsep pembangunan ekonomi inklusif dimaknai dengan tersedianya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk secara aktif berpartisipasi di sektor ekonomi. Melalui studinya tentang partisipasi perempuan dalam ekonomi inklusif, Renie (2019) melihat bahwa keterlibatan perempuan pada sektor ekonomi inklusif masih memerlukan pemberdayaan. Melalui penelitiannya, diketahui bahwa peran perempuan pada sektor ketenagakerjaan dan sektor pendidikan memiliki kedudukan yang hampir sama. Hal ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang relatif merata sehingga kesempatan kerjanya pun bisa seimbang.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan ini terkait dengan upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang masih bergantung pada sumber daya alam yang berlimpah dan upah tenaga kerja yang murah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (*inclusive growth*) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan (*green growth*).

Seterusnya, Zhuang (2010) juga turut mengemukakan pandangannya. Pertumbuhan yang inklusif dipahami sebagai adanya keadilan dalam mengakses kesempatan ekonomi. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda.

Pemikiran yang melatarbelakangi berkembangnya wacana pembangunan ekonomi inklusif tidak dapat dilepaskan oleh berbagai fakta empirik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, berbagai sektor, khususnya sektor yang

berbasis sumber daya alam (baik agraris maupun maritim) serta sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan hadirnya ketidakseimbangan yang begitu nyata. Pembangunan pertanian yang digalakkan pada era Orde Baru kini tinggal sejarah dan hanya menjadi kebanggaan masa lalu. Berbeda dengan kondisi saat ini, pembangunan pertanian bersifat kontradiktif dengan kebijakan impor pangan, meskipun kekayaan alam sebagai negara agraris sangat melimpah. Beberapa tahun setelah tumbanganya orde baru, pertanian menjadi sektor yang tidak lagi diprioritaskan, padahal tidak sedikit penduduk miskin di Indonesia bergelut dengan sektor pertanian pada berbagai strata.

Pada akhirnya, negara yang tadinya berhasil menjadi negara dengan swasembada pangan perlahan-lahan terjebak dalam praktek impor pangan (Malik 2014). Praktek merkantilisme global menjebak generasi muda untuk lebih makanan jenis *fast food* berbasis *franchise* global, berbanding berinovasi untuk mengolah sumber daya alam serta kekayaan nusantara, dimana bangsa Eropa justeru menjajah nusantara karena kekayaan sumber daya alam kita di sektor pangan.

Hal yang hampir sama juga terjadi bisa kita temukan pada tata kelola di sektor maritim. Dimulai dari isu-isu sosial yang melingkupi kehidupan masyarakat pesisir, permasalahan ekonomi yang terjebak dalam praktek klientelisme (Sudarmono dkk, 2012) dan *peripheral capitalism* (Hill, 1975).

Masyarakat tradisional di sektor perikanan umumnya terjebak dalam hubungan patronase dengan pola pertukaran sosial (*social exchange*) yang tidak seimbang. Bagi mereka yang menduduki strata sosial lebih rendah, mereka menganggap bahwa kondisi yang mereka alami adalah sebuah takdir yang terus bertahan secara turun-temurun. Sepertinya tidak ada jalan keluar dan terjebak sepenuhnya dengan kondisi sosial mereka yang

demikian ini. Mereka menjadikan kemampuannya yang sangat terbatas sebagai satu-satunya faktor produksi, selain anggota keluarga yang masih bisa bekerja sebagai sumber alternatif untuk menafkahi keluarga.

Bagi mereka yang menduduki strata sosial yang lebih tinggi, akses terhadap modal dan faktor produksi jauh lebih luas dan cenderung tidak ada batasan. Dengan memanfaatkan alat tangkap, mesin dan kapal penangkapan, mereka dapat menentukan alur jalannya kegiatan produksi. Bahkan, studi yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa akses yang luas semacam ini telah bertransformasi menjadi bentuk kekuasaan yang baru: kekuasaan politik, lebih kurang seperti yang diungkapkan oleh Ishak Shari (1992) sebagai kapitalisme pinggirannya di masyarakat nelayan di Kelantan, Malaysia.

Dalam penelitian penulis, bentuk-bentuk kekuasaan yang dihasilkan dari determinasi ini adalah adanya mobilisasi politik untuk memilih atau tidak memilih seorang kandidat politik dalam kontestasi politik lokal di Kota Makassar<sup>2</sup>. Dalam semua ritual politik, akses terhadap pengembangan ekonomi cenderung tertutup.

Pola-pola lain yang juga seringkali ditemukan dalam suatu entitas masyarakat dengan status terbelakang (*underdevelopment*) adalah pola-pola ekonomi subsistensi. Konsep dasar pola ini adalah adanya upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan *common space* yang ada di perkotaan. Sebagai contoh, sebagian masyarakat nelayan

---

<sup>2</sup> Kontestasi politik lokal di Kota Makassar merupakan salah satu kontestasi politik yang paling dinamis di Indonesia. Terdapat banyak sekali fenomena politik yang tidak dapat diprediksi secara ilmiah. Simpul-simpul kekuasaan dan kekuatan politik saling bertautan dengan klan korporasi, bertautan dengan isu geopolitik dan politik akar budaya. Sehingga, memaknai dinamika politik di Kota Makassar tidak dapat dilakukan secara konvensional sebagaimana umumnya.

yang tidak melaut, biasanya mereka menjadi juru parkir di pusat-pusat keramaian di tepi jalan. Sementara itu, ibu-ibu rumah tangga dapat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa situasi sosial dalam masyarakat semacam ini sangat mudah ditemukan pada masyarakat dengan karakteristik:

1. Masyarakat yang terus mempertahankan pola-pola tradisional dalam kehidupan sosial
2. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah dari derajat pendidikan pada umumnya.
3. Tidak adanya akses ekonomi yang luas dan setara bagi semua, sehingga control terhadap alur ekonomi setempat dikendali oleh sekelompok orang dengan kekuatan finansial lebih tinggi dari pada masyarakat umumnya di wilayah tersebut.

Kondisi demikian juga akan menjadi ujian sekaligus tantangan bagi aparat pemerintah setempat. Diperlukan hadirnya sebuah kebijakan afirmatif yang mengintervensi pola-pola interaksi sosial masyarakat ini. Hanya saja, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk ‘memasuki’ wilayah mereka. Kebijakan afirmatif ini diharapkan dapat membuka ruang-ruang interaksi eksklusif dan menjadi lebih inklusif.

Seterusnya, Hafni dan Rahmawati (2019) mendapati fakta sulitnya kaum difabl netra dalam mengakses permodalan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mereka. Penelitian Hafni dan Rahmawati (2019) menemukan bahwa hanya sebagian kecil wirausahawan difable netra yang telah berinteraksi dengan sektor perbankan, selebihnya lebih suka berinteraksi dengan lembaga keuangan lain seperti koperasi yang didirikan oleh PERTUNI dan BMT. Mereka memilih demikian karena layanan

perbankan dianggap cukup rumit atau kurang bagi wirausahawan difabel netra. Di sisi lain, wirausahawan difabel daksa sering berinteraksi dengan perbankan dan tidak ada masalah dalam proses meminjamkan modal bank. Namun, baik wirausahawan difabel netra maupun daksa berharap akan ada peningkatan layanan bagi para pengusaha

Hal yang berbeda justru terjadi pada sektor UMKM dimana inovasi generasi milenial terbilang sangat progresif. Dengan adanya aksesibilitas teknologi informasi secara merata di masyarakat, pola-pola bisnis konvensional dan tertutup berubah menjadi bisnis berbasis digital dengan kadar persaingan yang sangat terbuka.

Penetrasi teknologi informasi telah banyak mendisrupsi bisnis-bisnis konvensional. Konsumen merasa sangat dimudahkan dengan dimanjakan dengan pola digital sehingga “dunia” betul-betul dalam genggaman (gawai). Dalam perspektif pembangunan ekonomi inklusif, hal ini dapat terjadi karena 1). Pola-pola bisnis tradisional dan tidak efisien mulai ditinggalkan; 2). Akses terhadap pendidikan dan derajat pengetahuan masyarakat sudah lebih merata dan sudah lebih tinggi dari kondisi sebelumnya; dan 3). Terbentuknya pasar yang relatif sempurnaan dan tidak adanya dominasi ‘invisible hand’ dalam proses bisnis yang dijalankan.

## Penutup

Seiring perkembangan sosial masyarakat, eskalasi ekonomi juga mengalami dinamika yang fluktuatif. Sebagian kelompok masyarakat marjinal mulai bergerak ke arah situasi ekonomi keluarga yang membaik. Sebagian lagi masih terjebak dalam situasi yang tidak banyak berubah. Bukannya mereka tidak mampu mengubah nasibnya, namun pembangunan berjalan terlalu cepat bagi mereka. Kelompok masyarakat miskin

perkotaan didera dengan pesatnya mobilitas ekonomi berbasis digital, dimana mereka masih bertahan dengan pola subsisten dan hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Pembangunan ekonomi yang lebih memihak kepada mereka (inklusif) sepatutnya tertuang dengan jelas dalam kertas-kertas kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Tidak elok rasanya membiarkan mereka (yang notabene juga adalah pemilik saham atas bangsa ini) hidup dalam keterpinggiran dan keterasingan. Membiarkan mereka bertahan dengan kehidupan sosial dibawah tekanan adalah dosa kolektif yang akan dimintakan pertanggungjawaban di depan yang Maha Kuasa.

#### Daftar Pustaka

- Hafni, Diska Arliena dan Rahmawati, Fitri Maulidah. 2019. Aksesibilitas Permodalan Perbankan Bagi Wirausahawan Difabel Di D.I Yogyakarta Untuk Mewujudkan Ekonomi Inklusi *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume XVII, No 2, 130-141  
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Hariyanto, Ery. 2018. Kebijakan Fiskal Dan Pembangunan Ekonomi Inklusif <https://www.djppr.-kemenkeu.go.id/>
- Hill, Helen. (1975). 'Peripheral Capitalism', Beyond 'Dependency' and 'Modernisation' *The Australian and New Zealand Journal of Sociology*, Vol. 11 issue: 1, p. 30-37  
<https://doi.org/10.1177/144078337501100106>
- Ishak Shari. 1992. Ekonomi Nelayan Pengumpulan modal, Perubahan teknologi dan pembezaan ekonomi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Kim Eric Bettcher, Teodora Mihaylova, Economic Inclusion, 2015, *Leveraging Markets and Entrepreneurship to Extend Opportunity*, Center for International Private Enterprise

Kristyanto, Visi Saujaningati. 2015. "Analisis Sektor Produksi Pendorong Terwujudnya Pertumbuhan Inklusif Di Jawa Timur." 1–18.

Malik, Hermen. 2014. Melepas Perangkap Impor Pangan: Model pembangunan kedaulatan pangan di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Kaur: LP3ES

Renie, E. 2019. "Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Inklusif." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*. Vo. 2 No. 1. hal. 10-17.

Sudarmono, Junaenah Sulehan & Noor Rahamah Hj. Abu Bakar. 2012. Patron-Client Relationship of Urbanized Fishing Community. *International Journal on Social Science Economics & Art*. Vol. 2 (2012) No. 2. [[www.insightsociety.org/ojssea/index.php/ijsssea/article/view/82](http://www.insightsociety.org/ojssea/index.php/ijsssea/article/view/82)]

Zhuang, J. (2010). Poverty, Inequality, and Inclusive Growth in Asia: Measurement, Policy Issues, and Country Studies. Manila: Asian Development Bank.

## BAB 2

# Analisis Dampak Kebijakan Boyolali Pro Investasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Boyolali

Abdullah Fatah

### Latar belakang

Dewasa ini pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia semakin pesat, Dengan beragam potensi ekonomi yang di miliki di setiap daerahnya diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing baik dari pendapatan masyarakat maupun hal hal lain yang bersifat penting seperti halnya pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Meningkatkan daya saing membuat beberapa daerah berusaha memaksimalkan potensi yang ada untuk membangun daerahnya menjadi daerah yang maju. Setidaknya bisa menjadi contoh dari daerah daerah lain di sekitarnya

Kurangnya jumlah lapangan kerja di Boyolali serta masih tersedianya banyak lahan kosong menjadikan pemerintah daerah kabupaten Boyolali mengambil langkah untuk membuat kebijakan “Boyolali Pro investasi“ lahan kosong yang di maksudkan juga bukan merupakan lahan produktif pertanian sehingga tidak mengganggu produktifitas dan mata pencaharian masyarakat lainnya, mengingat banyak juga dari masyarakat yang pilih-pilih dalam bekerja serta banyak masyarakat yang bekerja merantau di luar daerah menyebabkan Boyolali tertinggal dari

daerah daerah lainya khususnya di Prov. Jawa Tengah (Suprihatini T, 2016 ).

Dari kebijakan yang telah dilakukan tersebut yaitu penyediaan lapangan kerja merupakan hal yang paling serius di tangani untuk meningkatkan daya saing masyarakat yang merata di seluruh kecamatan di Boyolali, lebih di tekankan kembali untuk kawasan Boyolali utara yaitu Kecamatan Simo, Kecamatan Andong, Kecamatan Klego, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Wonosegoro, dan Kecamatan juwangi yang notabene “tertinggal” dari kecamatan lainya di Kabupaten Boyolali (<http://dpmpstp.boyolali.go.id>). Oleh karena itu kebijakan “Boyolali pro investasi“ dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di kabupaten Boyolali dengan memberikan “lampu hijau“ untuk para investor agar menanamkan modal di Kabupaten Boyolali.

Boyolali pro investasi berhubungan dengan pemberian izin kepada para investor untuk bersedia berinvestasi di Boyolali (Suprihatini T, 2016). Untuk menarik para investor tersebut Boyolali juga menawarkan infrastruktur yang memadai . Dalam hal ini biaya lahan yang masih relative murah di banding dengan daerah daerah industri lainya. Akses mudah untuk mencapai daerah tersebut. Kemudian lingkungan yang menerima adanya investor agar memajukan daerah tersebut. Sehingga di harapkan investor berbondong bonding untuk menanamkan modal di kabupaten Boyolali

Berdasarkan berbagai permasalahan ekonomi yang di hadapi pemerintahan kabupaten Boyolali sebagaimana telah di uraikan di atas rumusan masalah dari essay ini adalah “bagaimana langkah pemerintah kabupaten Boyolali untuk menyukseskan progam kebijakan Boyolali pro investasi untuh menujung pembangunan yang merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Boyolali”

Tujuan dari essay ini berdasarkan uraian di atas adalah menganalisis dampak kebijakan Boyolali pro investasi yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi masyarakat .

## Pembahasan

Suatu bentuk kebijakan sekaligus tantangan pemerintah kabupaten Boyolali untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang kompleks. Permasalahan ekonomi dari masyarakat tingkat atas sampai masyarakat proletar atau akar rumput. Terobosan ini sangat perlu di lakukan karena untuk membuat perubahan harus dilakukan sebuah gerakan. Topik yang saya buat mengenai kebijakan ekonomi regional yaitu khususnya bertepat di kabupaten Boyolali. Pengambilan topik ini di maksudkan agar saya mengetahui bagaimana proses dari kebijakan Boyolali pro investasi ini serta menganalisis dampak yang terjadi terhadap masyarakat Boyolali baik langsung maupun tidak langsung.

Sebenarnya kebijakan pro investasi yang mendorong tumbuhnya juga diupayakan di beberapa daerah di Indonesia. Di sini saya mengambil sampling daerah Salatiga sebagai contoh dan juga dapat menjadi komparasi dengan daerah Boyolali khususnya. Di Kota Salatiga dalam melaksanakan kebijakan pro investasi sudah memperhitungkan dengan sangat matang yaitu dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang ramah dan nyaman bagi investor dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, adanya kepastian hukum atas perizinan yang jelas untuk mengakomodir kepentingan perusahaan yang akan berinvestasi, masyarakat dan juga pemerintah. Itu terbukti dengan banyaknya perusahaan besar yang masuk di Salatiga. Di Boyolali juga sudah menerapkan apa yang sudah di terapkan oleh Kota Salatiga yang menjadi nilai plus Boyolali di banding dengan Salatiga adalah masih banyaknya lahan kosong serta banyaknya

angkatan kerja yang siap bekerja menjadikan Boyolali perlu di perhitungkan investor untuk menanamkan modalnya di Boyolali. Di samping itu kekurangannya untuk Kabupaten Boyolali masyarakatnya belum bisa menerima perubahan (*cultural shock*) maka di perlukan strategi khusus untuk menghadapinya.

Selanjutnya saya mengambil salah satu daerah yang masuk 5 jajaran kabupaten yang pro investasi di Jawa Tengah menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri secara umum hampir sama dengan Kabupaten Boyolali dalam beberapa hal yaitu tingkat pendidikan masyarakat, kondisi lingkungan serta sarana prasarana serta fasilitas sosialnya. Hal yang menarik dari Kabupaten Wonogiri sebagai bahan dari studi banding kali ini adalah penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan di Wonogiri agar meyakinkan masyarakat. Kemudian Kabupaten Wonogiri membedakan tata kelola untuk pelaku bisnis mikro dengan perusahaan besar, untuk pelaku usaha mikro di gratiskan semua untuk perusahaan yang berskala besar dan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan serta masyarakat Wonogiri maka pemerintah Kabupaten Wonogiri akan memberikan “lampu hijau” untuk perusahaan itu dengan tetap memperhatikan aturan yang ada .

Dari rumusan masalah di atas untuk menyukseskan kebijakan Boyolali pro investasi yang menjujarg pembangunan merata di seluruh kecamatan di Boyolali. Yaitu dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Di karenakan inti (*core*) dari kebijakan ini memang murni untuk kesejahteraan masyarakat Boyolali itu sendiri. Dengan demikian diharapkan pemerintah dapat respon baik dari masyarakat dan memberikan iklim yang kondusif untuk investor menanamkan modalnya di Boyolali. Kemudian lewat komunikasi tersebut baik dengan masyarakat maupun investor dapat menemukan

“konsensus” yang sama sama menguntungkan. Tantangan selanjutnya dari permasalahan ini adalah bagaimana kebijakan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat merata di seluruh kecamatan tidak berpusat pada tempat tertentu.

Kabupaten Boyolali merupakan kabupaten yang terdiri dari 22 kecamatan, 261 desa serta 6 kelurahan. Kabupaten Boyolali ini letaknya strategis di antara 2 kota besar di Jawa Tengah yaitu kota Surakarta dan kota Semarang, Dari luasnya Kabupaten Boyolali tersebut belum semua di masuki investor untuk membuat lingkungan sekitar menjadi ikut berkembang. Ada beberapa kecamatan selain kecamatan di dekat pusat kota yang letaknya strategis untuk investor menanamkan modalnya. Indikator kenapa kecamatan tersebut karena akses yang mudah yaitu Kecamatan Sambu, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Cepogo dan Kecamatan Klego.

Wilayah Kecamatan Cepogo merupakan wilayah yang paling strategis karena terdapat jalan provinsi yang menghubungkan Kota Solo dan Kota Semarang. Wilayah Kecamatan Cepogo yang notabeneanya dekat dengan pusat kota menjadikan wilayah ini patut untuk dikembangkan. Kecamatan Cepogo juga merupakan dataran tinggi yang berbatasan dengan selo di situ investor dapat menanamkan modalnya untuk mengembangkan sektor pariwisata, dan perhotelan. Kontur tanah Kecamatan Cepogo yang tidak curam membuat tempat ini sangat cocok juga untuk mendirikan perusahaan perusahaan, yang akan membuat lingkungan sekitarnya menjadi ikut berkembang.

Kecamatan Sambu adalah kecamatan yang letaknya di tengah tengah. Letak kecamatan ini dekat dengan jalan provinsi sehingga bisa di katakana strategis. Ada beberapa pabrik yang sudah berdiri di daerah Kecamatan Sambu yaitu Pabrik Garmen PAN BROTHERS yang menghasilkan produk komoditas ekspor, Pabrik ESEMKA yang masih dalam pekerjaan, Adanya pabrik

tersebut membuat warga sekitar merasakan perubahan baik dalam finansial mereka dan juga perbaikan infrastruktur dekat pabrik. Rejeki tersebut juga di rasakan kecamatan tetangga yaitu Kecamatan Simo di mana banyak pekerja dari luar kecamatan juga bekerja di pabrik tersebut.

Kecamatan Klego merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Boyolali Utara. Kecamatan ini juga strategis karena ada jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Boyolali dengan Kota Salatiga dan Kabupaten Sragen. Lahan di Kecamatan Klego ini juga bukan lahan yang produktif pangan serta lahan di sana kounturnya rata sehingga cocok untuk didirikan sentra industri. Pabrik yang berdiri di Kecamatan Klego adalah pabrik garment PAN BROTHERS TBK. Pabrik ini memang invest sangat besar di Boyolali dan mampu menyedot tenaga kerja yang banyak bahkan dari luar Kabupaten Boyolali juga bekerja di pabrik ini. Adanya pabrik ini membawa pengaruh besar bagi lingkungan masyarakat. Tanah yang gersang dan tidak produktif menjadi tempat dengan perputaran ekonomi yang tinggi.

Kecamatan Wonosegoro adalah kecamatan potensial untuk jadi kawasan peruntukan industri. Pemerintah Kabupaten Boyolali menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai yaitu jalan jembatan penyedia air dan sebagainya. Kecamatan Wonosegoro masih banyak memiliki lahan kosong yang potensial didirikan industri. kecamatan ini sangat potensial bisa mengembangkan daerah Boyolali Utara yang notabeneanya kurang maju daripada pusat kota Boyolali. Daerah Wonosegoro juga terdapat daerah wisata waduk kedung ombo yang memiliki potensi potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan dan patut di kembangkan. dengan demikian program Boyolali pro invesstasi dapat di terapkan merata untuk pembangunan Boyolali ke depannya.

Dari beberapa kecamatan sebagai contoh tersebut pemerintah kabupaten melalui humas Pemkab Boyolali berusaha untuk menjadi mediator antara masyarakat dan investor agar terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Di sisi lain juga Boyolali juga mendapat keuntungan karena adanya program strategis nasional yang masuk wilayah ini yaitu moda transportasi jalan tol dan kereta api serta perluasan Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Masuknya perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan orang asli Boyolali kembali ke daerah lagi membangun daerahnya sendiri. Itu di barengi dengan meningkatnya UMR Kabupaten Boyolali menjadi meningkat cukup tinggi dari tahun ke tahun.

### Kesimpulan

Secara umum, Suhendra (2017) dan Purwanti (2015) menjelaskan bahwa Kebijakan Boyolali Pro investasi adalah sebuah terobosan pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upaya menangani masalah pembangunan yang kompleks. Kebijakan ini terbukti mampu mengentaskan masalah seperti kemiskinan, lapangan pekerjaan yang semakin kompetitif dan bahkan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Boyolali. Bahkan sekarang Kebijakan Boyolali sudah menjadi slogan pemerintah kabupaten Boyolali itu sendiri. Kesuksesan program ini tidak terlepas dari usaha pemerintah serta masyarakat yang terbuka terhadap perubahan. Kemajuan itu bukan hanya di lingkup ekonomi saja namun juga merambat ke sektor lain yaitu infrastruktur serta usaha mikro kecil dan menengah masyarakat di sekitarnya. Setelah berjalannya kebijakan ini kini masyarakat Boyolali menjadi lebih berinovasi dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah karena banyaknya karyawan di sekitar pabrik tersebut. Selain itu banyak yang memilih pulang ke daerah untuk bekerja membangun daerahnya dikarenakan tingkat

pendapatan yang sudah meningkat dibarengi dengan biaya hidup dan angka kriminalitas lebih rendah (Guntoro, B. A. 2018).

Dari kesimpulan yang ditulis diatas kita mengetahui bahwa banyak sekali pencapaian yang didapatkan dari kebijakan Boyolali pro investasi ini. Banyak investor yang menanamkan modal di Boyolali dan memberikan pengaruh pada lingkungan sekitarnya. Pemilihan tempat yang sesuai akan membuat pembangunan akan berjalan merata di seluruh wilayah di Kabupaten Boyolali. Harapannya dimudahkannya investor masuk harus sejalan dengan kesejahteraan karyawan agar terwujudnya *simbiosis mutualisme* antara pemerintah, investor dan masyarakat. Peran pemerintah disini sangat di perlukan untuk menjadi jembatan antara investor dengan masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Guntoro, B. A. (2018). Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Pro Investasi Di Kabupaten Boyolali. *Repsitory Universitas Gadjah Mada*.
- Purwanti, Z. (2015, Juli 15). "Pro Investasi" Ala Boyolali. Retrieved from [dpmpstsp.boyolali.go.id](http://dpmpstsp.boyolali.go.id): <http://dpmpstsp.boyolali.go.id/website/web/detail/28/>
- Suhendra, A. (2017). Pro Investasi Dalam Meningkatkan Investasi Daerah Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15-27.
- Suprihatini, T. (2016). Strategi Humas Kepemerintahan Dan Iklim Investasi (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Humas Kabupaten Boyolali Mendorong Kebijakan Boyolali Pro Investasi). *E-Prints Universitas Muhammadiyah Surakarta* .
- <http://dpmpstsp.Boyolali.go.id/website/web/detail/28/#:~:text=%22Pro%20Investasi%22%20Ala%20Boyolali&text=Tero%20bosan%20yang%20dilakukan%20Seno%20Samodro,ini%20mencapai%205%2C6%20persen.>

## BAB 3

### Pengelolaan Dana PIPPK (Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan) Di Kota Bandung

Afifah Dwi Wulandari

#### Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah telah membantu pemerintah pusat dalam hal mengelola, membangun dan memberdayakan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sebagai hak dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan asas-asas otonomi daerah ke dalam suatu program bernama Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Program tersebut bertujuan untuk pemeratakan pembangunan agar memperkecil ketimpangan yang ada. Sejak program itu dijalankan pada 2015 memberi dampak yang signifikan bagi pemerataan pembangunan dan bahkan menjadi program unggulan di Kota Bandung.

Pelaksanaan PIPPK di Kota Bandung sejak tahun 2015 sejalan dengan semangat otonomi daerah, yaitu desentralisasi pembangunan kewilayahan. Dilansir pada [humas.bandung.go.id](http://humas.bandung.go.id) (25/4/2019), Walikota Bandung mengatakan bahwa pelaksanaan PIPPK sesuai dengan tiga pilar Kota Bandung yakni inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi yang diharapkan dapat mewujudkan visi Kota Bandung. Program ini mengajak

partisipasi aktif masyarakat dari setiap kelurahan dan kecamatan untuk memberikan inovasi pembangunan di wilayah masing-masing. Hal tersebut didasarkan pada perbedaan permasalahan dan kebutuhan di setiap kelurahan dan kecamatan. Sehingga dengan inovasi yang berbeda-beda tersebut tetap dapat mewujudkan tujuan utama yaitu pemerataan pembangunan.

Pelaksanaan PIPPK memiliki banyak program didalamnya, diatur dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, meliputi kegiatan pemberdayaan di lingkup RW, PKK, Karang Taruna. Kegiatan pemberdayaan tersebut banyak macamnya, misalnya dalam bidang ekonomi yaitu pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat. Dana yang dikucurkan untuk program kegiatan pun tidak sedikit yaitu sejumlah Rp 100.000.000,00 per RW pada masa pemerintahan Wali Kota Ridwan Kamil. Dana yang jumlahnya tidak sedikit ini pun kerap mengundang permasalahan dalam pengelolaannya. Beberapa aduan dari masyarakat mengenai kucuran dana 100 juta per RW adalah tentang transparansi. Yang tentunya setiap kelurahan akan berbeda pengelolaannya sesuai kebutuhannya.

Pemerintah Kota Bandung memberikan kewenangan kepada kelurahan untuk mengelola dana yang diberikan. Oleh karena itu inovasi-inovasi yang diberikan di setiap kelurahan pun berbeda-beda. Namun pada saat dievaluasi terjadi perbedaan tingkat ketercapaian program pada tiap kelurahan. Perbedaan tingkat ketercapaian program jika terlalu timpang tentu akan menghambat tujuan utama program ini yaitu pemerataan pembangunan. Oleh karena itu Penulis mempertanyakan hal tersebut, padahal dana yang diberikan tiap kelurahan sama yaitu sebesar 100 juta, serta bagaimana pengelolaan dana PIPPK agar tujuannya tercapai dengan baik dan terwujudnya pemerataan pembangunan di Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, yakni mengenai ketimpangan dalam pembangunan di Kota Bandung. Dengan demikian maka rumusan masalah dalam essay ini adalah bagaimana pengelolaan dana PIPPK agar terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan di Kota Bandung?

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penulis dalam penulisan essay ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana PIPPK agar terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan di Kota Bandung.

### Pembahasan

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan sebuah kebijakan yang menuntun masyarakat di Kota Bandung untuk aktif berpartisipasi. Di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dapat melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah partisipatif di mana masyarakat bukan hanya sebagai objek belaka (Hadiutomo, 2021). Dalam perencanaan partisipatif memiliki metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) atau Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan, dalam hal ini kelurahan (Aguswan & Nurfeni, 2018). Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah berharap bahwa program ini dapat berjalan dengan semestinya serta mewujudkan tujuan bersama yaitu pemerataan pembangunan. Masyarakat dapat berkontribusi pada seluruh proses pembangunan yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut terbukti dengan adanya PIPPK Online yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Bandung, sehingga masyarakat dapat selalu mengawasi prosesnya.

Kebijakan pembangunan di daerah lain pun memiliki tujuan yang sama yakni pemerataan pembangunan. Program yang hampir serupa dengan PIPPK yaitu Dana Desa. Namun Dana

Desa hanya diperuntukkan bagi desa yang berarti hal tersebut berada di kabupaten bukan di kota. Namun, sumber Dana Desa berasal dari APBN, sementara PIPPK berasal dari APBD. Salah satu daerah yang menerapkan dana desa dengan baik yaitu Kabupaten Jembrana. Sama halnya dengan PIPPK yang mengajak partisipasi aktif dari masyarakat melalui PIPPK Online, penerapan dana desa di Kabupaten Jembrana juga menggunakan metode partisipatif dengan membuat aplikasi Siskeudes. Seperti dilansir pada [bpkp.go.id](http://bpkp.go.id) (23/7/2018) menurut Wakil Bupati Jembrana aplikasi Siskeudes dirasa sangat bermanfaat, karena membantu pemerintah mengevaluasi dana desa dan alokasinya untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Jembrana.

Pemerintah Kabupaten Sleman pun juga menerapkan prinsip-prinsip yang sama dengan PIPPK pada kebijakan pembangunan kewilayahannya, khususnya dalam hal inovasi. Inovasi yang dimaksud di sini sangat diperlukan mengingat Kabupaten Sleman memiliki keunggulan di bidang pariwisata. Berbeda dengan Kota Bandung, inovasi yang ditujukan berangkat dari kearifan lokal yang ada di sana. Kebijakan ini juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, misalnya dalam hal kreativitas, seni, dan pariwisata. Namun kebijakan pembangunan tersebut tidak menggunakan prinsip desentralisasi seperti PIPPK.

Pemerataan pembangunan merupakan cita-cita nasional yang berusaha diwujudkan bersama oleh masyarakat, termasuk masyarakat Kota Bandung. Ketimpangan yang terjadi di Kota Bandung cukup menggambarkan bahwa pemerataan pembangunan belum dapat diwujudkan dengan sempurna. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Bandung bahwa jumlah masyarakat miskin di Kota Bandung pada tahun 2018 sebanyak 3,57% atau sejumlah 89,38 ribu jiwa. Berdasarkan data tersebut tentu pemerintah harus membuat kebijakan untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin. Namun, pembangunan bukan hanya soal ketimpangan antara si miskin dan si kaya, melainkan masih banyak faktor lain yang akan mempengaruhi pembangunan.

Untuk mengatasi hal tersebut tentu pemerintah harus membuat kebijakan, dan kebijakan yang sudah ada di Kota Bandung yakni PIPPK berupa program berbasis pembangunan, desentralisasi, dan pemberdayaan.

Untuk merealisasikan PIPPK, Pemerintah Kota Bandung mengalokasikan dana yang berasal dari APBD. Besaran dana tersebut ialah Rp100.000.000,00 per RW yang disalurkan oleh kelurahan. Karena menggunakan APBD, program ini dimasukkan ke dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 bahkan berlanjut hingga RPJMD saat ini. Awalnya, pemerintah hanya ingin merealisasikan janji untuk memberikan bantuan kepada wilayah-wilayah, dan nantinya bantuan tersebut akan dibagi antar RW, PKK, Karang Taruna, serta LPM. Namun karena tidak mungkin untuk memberi bantuan secara terus menerus, maka dibuatlah suatu mekanisme belanja langsung pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan berupa PIPPK.

Kegiatan pembangunan pada PIPPK sangat banyak tergantung dari permasalahan dan potensi setiap wilayah. Program pembangunan tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sosial-ekonomi di lingkup RW. Dana yang telah disalurkan oleh kelurahan nantinya akan diberikan ke RW dan selanjutnya dibagi-bagi lagi untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM. Pemerintah hanya menyalurkan dana dan mengontrol saja dan selebihnya untuk kegiatan pembangunan diserahkan kepada masyarakat. Dengan program yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti ini lama-kelamaan akan menumbuhkan ikatan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan merata.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dana PIPPK yang disalurkan dari kelurahan masih akan dibagi-bagi untuk RW, Karang Taruna, PKK, dan LPM. Berikut merupakan fokus kegiatan pembangunan pada lingkup RW yaitu: a) infrastruktur; b) sosial kemasyarakatan; c) penguatan

kelembagaan lingkup RW; d)fasilitas pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW; e)pemberdayaan, inovasi, dan potensi ekonomi di lingkup RW. Sementara dalam lingkup PKK semua kegiatannya berhubungan dengan kesejahteraan keluarga. Pada lingkup Karang Taruna kegiatannya berhubungan dengan kesejahteraan sosial, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan penyediaan fasilitas olahraga. Selanjutnya dalam ruang lingkup LPM kegiatannya berupa penyusunan perencanaan partisipatif pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana, penghitungan keaktifan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, serta pelaksanaan gotong-royong masyarakat.

Program pembangunan yang saat ini menjadi fokus pemerintah yaitu di bidang infrastruktur dan pembangunan SDM. Pemerintah di tingkat kelurahan pun tidak mau kalah dan turut serta membangun infrastruktur di wilayah masing-masing. Terbukti dengan dana PIPPK ini digunakan oleh masyarakat untuk memperbaiki jalan yang rusak. Misalnya perbaikan jalan di RW.07 Kelurahan Merdeka, berdasarkan pengalaman pribadi penulis perbaikan jalan tersebut dikelola oleh pejabat RW setempat. Selain itu untuk membangun SDM di tingkat kelurahan dengan kegiatan penyuluhan dan pelatihan Usaha Ekonomi Produktif. Serta masih banyak program pembangunan lainnya yang berhasil diwujudkan melalui PIPPK.

Pelaksanaan PIPPK dapat membuktikan prinsipnya yaitu “Merata, Berdaya, Bersama”. Karena program tersebut dianggap mampu menjawab persoalan pembangunan kewilayahan secara efisien sampai satuan pemerintahan terkecil. Dengan PIPPK ini berarti pemerintah memberikan desentralisasi pengelolaan dana. Hal ini dianggap mampu menjawab permasalahan pembangunan lebih efisien karena tidak memerlukan birokrasi yang rumit dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan berjalannya program PIPPK sejak tahun 2014 pun warga merasakan banyak manfaat yang diterima secara langsung. Jika dilihat dalam indikator pembangunan yaitu kemiskinan di Kota Bandung sudah

berkurang dari 4,65% pada tahun 2014 menjadi 3,57% pada tahun 2018. Angka-angka tersebut menunjukkan perubahan signifikan pada pembangunan di Kota Bandung dan pemerataan pembangunan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada.

Dengan keberhasilan pengelolaan dana PIPPK ini menjadikannya program unggulan Pemerintah Kota Bandung. Bahkan banyak daerah yang melakukan studi banding bahkan studi tiru ke Pemerintah Kota Bandung. Seperti halnya Pemerintah Kota Banjar Baru, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta kota/kabupaten di Jawa Barat. Program PIPPK ini juga rencananya akan diterapkan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingat keberhasilannya dalam hal pemerataan pembangunan.

### Kesimpulan

Pelaksanaan PIPPK di Kota Bandung yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dianggap mampu menjawab persoalan pembangunan kewilayahan. Hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan dana PIPPK melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dana yang bersumber dari APBD tersebut diberikan kepada setiap satuan RW sebesar RP100 juta yang nantinya dikelola oleh masyarakat untuk berbagai inovasi pembangunan di wilayahnya masing-masing dengan didampingi oleh kelurahan setempat. Masyarakat ikut andil dalam semua prosesnya mulai dari perencanaan hingga pembelanjaan sehingga pengelolaan dana tersebut bersifat transparan. Dari kebijakan-kebijakan yang ada dalam program tersebut, termasuk pengelolaan dananya dianggap sudah baik dan membantu keberhasilan pembangunan secara efektif dan efisien. Hal tersebut terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan di Kota Bandung, berdasarkan data dari BPS tingkat kemiskinan tahun 2014 hingga tahun 2018 sebanyak 1,08%.

Saran penulis dalam essay ini yaitu sebaiknya pemerintah tetap menjalankan program PIPPK di Kota Bandung dengan terus

menyesuaikan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman disini adalah dalam menghadapi permasalahan pembangunan perlunya inovasi-inovasi yang terbaru dan kekinian. Bahkan jika keberhasilan program ini berlangsung terus menerus dapat diusulkan untuk diterapkan di seluruh kota/kabupaten di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Aguswan, & Nurfeni. (2018). *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Hadiutomo, K. (2021). *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Dan Terdesentralisasi Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

#### Sumber Internet :

- Humas.bandung. 2019. "PIPPK Otonomi Daerah Ala Kota Bandung", <https://humas.bandung.go.id/layanan/pippk-otonomi-daerah-ala-kota-bandung> diakses pada 30 April 2021
- Humas,bandung. 2019. "Awat Jangan Sampai Dana Kelurahan dan Dana PIPPK Tumpang Tindih", <https://humas.bandung.go.id/berita/awat-jangan-sampai-dana-kelurahan-dan-dana-pippk-t> diakses pada 30 April 2021
- BPKP. 2018. "Jembrana Kedua Terbaik Se Indonesia Terapkan Dana Desa", <http://www.bpkp.go.id/berita/readunit/30/20260/30/Jembrana-Kedua-Terbaik-Se-Indonesia-Terapkan-Dana-Desa> diakses pada 30 April 2021

- BPS Kota Bandung. 2018. "Tabel Kemiskinan Di Kota Bandung Tahun 2014-2018", <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2018/12/27/174/tabel-kemiskinan-di-kota-bandung-tahun-2014-2018.html> diakses pada 1 Mei 2021.
- PPID Kota Bandung. 2017. "PIPPK : Merata, Berdaya, Bersama", <https://ppid.bandung.go.id/pippk-merata-berdaya-bersama/> diakses pada 1 Mei 2021
- Merdeka.com. 2016. "Pemkot Banjar Baru Belajar Pengelolaan Wilayah Ke Kota Bandung", <https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/pemkot-banjar-baru-belajar-pengelolaan-wilayah-ke-kota-bandung-1610195.html> diakses pada 1 Mei 2021

## BAB 4

# Dampak Pembangunan Bandara Internasional Terhadap Peningkatan Pendapatan Ojek Online Di Kediri Dan Sekitarnya

Alan Dwi Hadi Saputro

### Latar Belakang

Berkembangnya zaman, manusia mengalami regenerasi, hal ini berdampak pada peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini juga berbanding lurus dengan kebutuhan manusia dalam kegiatan mobilitas antar satu wilayah ke wilayah lainnya. Permintaan manusia akan kebutuhan transportasi untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari juga pasti meningkat. Sarana transportasi yang nyaman, juga efisiensi waktu dan biaya terutama kota yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Jadi jika dalam sebuah kota dan penduduknya padat maka tinggi juga tingkat mobilitasnya sehingga kebutuhan manusia akan sarana transportasi akan tinggi juga.

Transportasi adalah faktor terpenting dalam perkembangan sistem kehidupan dan pemerintahan. Seiring berjalannya waktu segala bentuk transportasi harus didukung dengan sistem pelayanan yang aman dan sarana yang memadai

karena transportasi akan terus mengalami peningkatan. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dengan menggunakan sebuah kendaraan yang menggunakan mesin atau tenaga manusia. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan sepeda kayuh untuk pribadi dan angkutan umum seperti bus, kereta bawah tanah, taksi dan angkutan lainnya. Transportasi di Indonesia masih berbeda dengan negara maju, di Indonesia didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi dalam aktivitas harian, dikarenakan persepsi sebagian masyarakat yang beranggapan kendaraan pribadi lebih aman dan nyaman dibandingkan menggunakan transportasi umum.

Pada era *digital* modern ini, manusia modern dituntut untuk dapat menerapkan pola pikir yang kreatif, inovatif guna mengembangkan kualitas hidupnya. Dalam hal ini termasuk juga dalam bidang transportasi yang berganti dari sistem konvensional menjadi *online* karena dinilai lebih efisien dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Munculnya berbagai permasalahan transportasi seperti kemacetan, sarana dan prasarana transportasi yang kurang efisien, berdampak pada tingkat kecemasan masyarakat dalam penggunaan jasa transportasi umum. Masyarakat menjadi kurang antusias dan lebih memilih transportasi yang lebih aman, nyaman dan efisien dari segi biaya dan waktu. Hadirnya jasa transportasi berbasis *online* sebagai bentuk pengembangan teknologi, membuka peluang besar untuk lapangan pekerjaan di Indonesia dan dapat menurunkan angka pengangguran.

Kota Kediri sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki sebuah pabrik rokok terbesar di Indonesia yaitu PT. Gudang Garam Tbk, yang mengusulkan pembangunan bandara internasional kepada pemerintah di Kediri. PT. Gudang Garam Tbk siap mendanai sebagian pembangunan bandara internasional demi terlaksananya pembangunan bandara ini, PT. Gudang

Garam Tbk menganggap dengan dibangunnya bandara ini dapat memangkas biaya transportasi mereka untuk pengiriman barang dagangan mereka. Dengan dibangunnya bandara ini otomatis akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat di daerah Kediri dan sekitarnya, dengan dibangunnya bandara ini juga akan menarik minat investor untuk membangun usahanya di daerah Kediri. Dengan begitu maka mobilitas di daerah Kediri dan sekitarnya akan meningkat sehingga kebutuhan akan transportasi juga akan meningkat. Dengan pernyataan di atas maka pembangunan bandara internasional ini akan mampu meningkatkan pendapatan ojek *online* atau *driver online* di daerah Kediri dan sekitarnya, bahkan dapat juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas sebagaimana yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam essay ini adalah bagaimana pemerintah mampu memaksimalkan pembangunan bandara internasional ini agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah Kediri khususnya pada masyarakat penyedia jasa *driver online* atau ojek *online*.

#### Tujuan Essay

Dari uraian di atas, essay ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat dari kebijakan pembangunan bandara internasional di Kediri terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya pendapatan bagi masyarakat penyedia jasa *driver online* atau ojek *online*.

#### Pembahasan

Sejak lima tahun terakhir pada masa kepemimpinan presiden Jokowi Indonesia sudah melakukan pembangunan

infrastruktur yang tidak tanggung-tanggung. Hal itu demi terwujudnya nawa cita presiden Jokowi yang ke tujuh yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan presiden Jokowi anatara lain Jalan Tol, Pelabuhan dan Bandara, pembangunan tersebut dilakukan agar distribusi barang hasil produksi penggiat ekonomi cepat tersalurkan sehingga dapat memangkas waktu yang diperlukan. Pembangunan bandara merupakan sektor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dimana produk lokal andalan Indonesia yang sudah terkenal dapat diekspor ke luar negeri dengan biaya transportasi yang tidak berkali lipat. Pembangunan bandara internasional juga dapat menggerakkan ekonomi sekitar bandara yang lebih maju, seperti kita ketahui jika dibangun sebuah bandara maka infrastruktur pendukung juga akan mengikuti pembangunan tersebut, seperti pembangunan jalan yang mengarah ke bandara, pembangunan SPBU disekitar bandara, pembangunan pusat oleh-oleh dari daerah terebut di sekitar bandara dan pembangunan yang lainnya.

Beberapa daerah di Indonesia juga melakukan pembangunan bandara yang sama. Di Kabupaten Majalengka 68 km dari Kota Bandung Jawa Barat, dibangun sebuah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dengan nama Bandara Kertajati. Pembangunan Bandara Kertajati dimulai sejak tahun 2009 dengan pembebasan lahan yang berasal dari lima desa di Kecamatan Kertajati, diresmikan pada bulan Mei 2018, dan beroperasi mulai tanggal 8 Juni 2018 (Jimika, F. 2019).. Pabrik-pabrik baru muncul di wilayah utara Majalengka dan berkurangnya lahan pertanian menyebabkan pergeseran struktur perekonomian di Majalengka. Pertanian yang menjadi kategori kontributor terbesar dalam pendapatan di Kabupaten Majalengka mulai berkurang, kategori industri, kategori perdagangan dan

kontruksi menjadi kontributor terbesar selanjutnya, sehingga seiring berjalannya waktu perdagangan dan industri menjadi dominasi perekonomian di Majalengka.

Berbeda dengan Bandara Kertajati yang ada di Kabupaten Majalengka Jawa Barat. Bandara Trunojoyo yang ada di Sumenep sedikit mengalami cerita yang berbeda dari Bandara Kertajati. Bandara Trunojoyo secara garis besar dampak pertumbuhan perekonomian yang dirasakan masyarakat akibat pembangunan bandara belum terlihat. Hal ini dapat dibuktikan dari jawaban mayoritas masyarakat yang biasa saja terhadap perekonomian masyarakat setelah dibangun bandara tersebut. Mungkin hal tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu dengan pembangunan-pembangunan kelanjutan dari bandara seperti pelebaran jalan dan pembangunan lainnya. Karena pembangunan sesungguhnya diperuntukan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sosial hidup masyarakat (Rofik, M. 2020).

Peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ekonomi strategis sangat dibutuhkan, demi terciptanya pertumbuhan ekonomi. Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah dapat membangun infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pembangunan infrastruktur terkadang membutuhkan dana yang besar, sehingga itu menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan yang ada. Sebagai contoh, pembangunan Bandara Majalengka yang sempat ngangkak dan baru selesai tahun 2018 lalu. Pemerintah terkadang harus bekerja sama dengan swasta agar proyek pembangunan yang direncanakan pemerintah cepat selesai.

Namun ada beberapa faktor kendala yang lain yang menjadi penghambat suatu pembangunan. Salah satunya adalah penolakan dari pemerintah provinsi setempat. Pemerintah

Provinsi Jawa Timur sempat menolak rencana pembangunan Bandara Dhoho Kediri. Hal ini dikarenakan rencana pembangunan bandara ini tidak masuk dalam rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Padahal Pemerintah Kabupaten Kediri sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk keperluan study kelayakan dan perencanaannya.

Namun pada akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyetujui pembanngunan Bandara Dhoho Kediri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek pembangunan bandara ini. KPBU sendiri umumnya untuk bagian pembebasan lahan dari pemerintah dan bagian infrastruktur dari swasta. Namun pembiayaan dari pembebasan lahan sampai pembangunan bandara seluruhnya menggunakan dana dari swasta yaitu PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk sendiri menyiapkan dana sebesar Rp 6 triliun, Rp 3 triliun untuk pembebasan lahan dan Rp 3 triliun untuk pembangunan bandara.

Bandara Dhoho Kediri akan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan direncanakan akan first class/kelas internasional. Kenapa dijadikan kelas internasional karena nantinya akan digunakan sebagai alternatif pemberangkatan jamaah haji dari Jawa Timur. Kita ketahui selama ini pemberangkatan jamaah haji di Jawa Timur hanya melalui Bandara Juanda Surabaya, sehingga pada waktu musim haji Bandara Juanda Surabaya selalu padat dengan penumpang jamaah haji. Tak hanya untuk alternatif pemberangkatan jamaah haji, Bandara Dhoho Kediri akan menjadi gerbang alternatif menuju Jawa Timur selain Bandara Juanda Surabaya. Pada tahun 2019, 16,6 juta lebih penumpang telah dilayani oleh Bandara Juanda dengan dicapai trafik pesawat 129 ribu pergerakan pesawat dan 88,4 juta kilogram untuk kargo.

Pemerintah Provinsi Jatim meyakini pembangunan Bandara Dhoho Kediri akan mendukung berkembangnya sektor perkebunan dan hortikultura di kawasan Jawa Timur bagian selatan. Daerah yang didukung tentunya daerah sekitar Kabupaten Kediri terutama untuk Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa potensi di sektor agro antara lain cengkeh, kakao, kelapa, pisang dan serih. Untuk Kabupaten Tulungagung sendiri memiliki produksi biji kopi terkenal yang melimpah. Pemerintah mengharapkan adanya Bandara Dhoho Kediri ini akan dapat meningkatkan industri perkebunan dan industri agrowisata karena semakin cepat akses menuju wilayah tersebut melalui bandara ini.

Keberadaan Bandara Dhoho Kediri ini pasti akan meningkatkan tingkat investasi untuk daerah sekitarnya. Masyarakat yang berprofesi sebagai *driver online* juga akan mempunyai banyak orderan karena tingkat mobilitas yang tinggi untuk daerah sekitar bandara. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mempromosikan keberadaan Bandara Dhoho Kediri dan berbagai Sumber Daya Alam di sekitar bandara baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan rutin mengadakan pameran di berbagai wilayah di Indonesia, dan setiap tahun akan mengadakan pameran besar yang bernama East Java Investival. Potensi yang ada di Kabupaten Kediri sebagai tuan rumah wilayah bandara ini adalah sektor perkebunan antara lain pabrik pengolahan cabai, sirsak maupun nanas dan tentunya pabrik pengolahan rokok sebagai investor utama pembangunan Bandara Dhoho Kediri (Tokoh, 2021).

Bandara Dhoho Kediri direncanakan akan dibangun di Desa Grogol, Kecamatan Grogol dan Desa Bulusari, Kecamatan

Tarokan Kabupaten Kediri. Jarak pusat Kota Kediri ke Desa Grogol sekitar 13 km dengan waktu perjalanan sekitar 30 menit. Sementara jarak Bandara Juanda Surabaya sekitar 120 km dengan waktu perjalanan 1,5 sampai 2 jam perjalanan via jalan tol. Pada pembangunan tahap pertama, Bandara Dhoho Kediri akan direncanakan dibangun di tanah seluas 13.558 meter persegi dari total luas bandara kurang lebih 457 hektar dengan dimensi runway atau landasan pacu 2.400 meter x 45 meter. Untuk daya tampung Bandara Dhoho Kediri ini akan mencapai 1,5 juta penumpang per tahun akan bertambah sampai 5 juta penumpang.

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan Bandara Dhoho Kediri ini sangat berpotensi bagi pertumbuhan ekonomi di Kediri dan sekitarnya. Sebagai contoh Bandara Internasional Kertajati di Majalengka setelah pembangunannya selesai pertumbuhan ekonomi sangat cepat di sana. Daerah Kabupaten Majalengka yang perekonomiannya awalnya sektor pertanian sekarang sudah berubah menjadi sektor industri dengan dibangunnya pabrik-pabrik di sana. Selain dari sektor industri pembangunan Bandara Dhoho Kediri ini akan berdampak juga pada pendapatan penyedia jasa *driver online*. *Driver online* yang awalnya hanya beroperasi seputar Kota Kediri, dapat beroperasi hingga wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya sehingga pendapatan driver online juga akan meningkat karena padatnya mobilitas di daerah Kediri.

Pembangunan Bandara Dhoho Kediri ini tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah saja. Tapi pembangunan Bandara Dhoho Kediri ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Kediri yang juga harus ikut mendukung agar pembangunan bandara ini cepat selesai. Seperti pembebasan lahan yang tak kunjung selesai karena masih ada ketidakcocokan

harga pada warga pemilik tanah yang hendak dibebaskan lahannya untuk pembangunan bandara ini. Permasalahan-permasalahan seperti ini harus segera diselesaikan agar pembangunan bandara juga cepat terealisasikan. Perlu juga kerjasama antara Pemerintah, Pihak Swasta dalam hal ini PT. Gudang Garam Tbk dan juga masyarakat agar pembangunan bandara ini cepat selesai demi kemajuan daerah Kediri dan sekitarnya.

#### Daftar Pustaka

- Jimika, F. (2019). Dampak Pembangunan Bandara Kertajati Terhadap Struktur Perekonomian Majalengka. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 11-21.
- Rofik, M. (2020). Dampak Pembangunan Bandara Trunojoyo Sumenep Terhadap Perekonomian Masyarakat Sekitar Bandara Trunojoyo Sumenep. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 94-101.
- Tokoh. (2021, Mei 1). *Bandara Kediri Wujud Kinerja Investasi Jatim*. Retrieved from pustakajc.co: <https://www.pustakajc.co/tokoh/view/1084/bandara-kediri-wujud-kinerja-investasi-jatim?halaman=all>

## BAB 5

# Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tanah Datar

Angel Amelia Putri

### Latar Belakang

Covid-19 yang melanda Indonesia mengakibatkan penurunan pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah. Pesona akan keindahan alamnya menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pariwisata menurun karena pandemi yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan menutup semua tempat wisata untuk menekan penyebaran virus penyebab pandemi covid-19.

Pemerintah melakukan segala cara untuk mengurangi penyebaran virus agar pandemi covid-19 segera berakhir. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu new normal, yang mana pada awal pandemi covid melanda Indonesia, semua kegiatan seperti kerja, sekolah dilakukan dari rumah. Dengan kebijakan new normal aktivitas seperti biasa dapat dilakukan dengan syarat menjalankan proses yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar ketertinggalan akibat pandemi covid-19 di berbagai bidang

seperti ekonomi, pendidikan, dan pariwisata dapat dikejar. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Kebijakan new normal menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata di daerah. Tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka dengan syarat menerapkan protokol Kesehatan. Melihat hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata di Tanah datar. Serta memperbaiki pengelolaan pada tempat wisata. Keindahan pesona alam di Tanah Datar menjadi daya jual agar wisatawan tertarik untuk datang dan berkunjung ke daerah ini.

Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang memiliki banyak tempat wisata budaya ataupun sejarah di Sumatra Barat. Daerah ini memiliki 100 lebih objek wisata yang pengelolaannya masih kurang baik. Oleh karena itu pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ditengah pandemi covid-19, dan mengelola objek wisata yang belum dikembangkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga berusaha untuk menjadikan Tanah Datar sebagai pusat objek wisata di Sumatra Barat.

#### Rumusan Masalah

Pandemi covid-19 menyebabkan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan, maka rumusan masalah dalam esai ini adalah

- a. apa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah datar dalam meningkatkan kunjung wisatawan pada masa pandemi ini.
- b. apa upaya untuk mengembangkan objek wisata yang belum terkelola dengan baik guna untuk meningkatkan pendapatan daerah.

## Tujuan

Dari uraian di atas, esai ini bertujuan untuk menggambarkan apa saja usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan sektor pariwisata ditengah pandemi covid-19 agar pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dapat meningkat, serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengembangkan tempat wisata yang pengelolaannya masih kurang baik.

## Pembahasan

Kabupaten Tanah Datar dengan keelokan alamnya, membuat daerah ini terkenal sebagai daerah dengan wisata alam dan budaya yang sering dikunjungi di Sumatra Barat. Objek wisata yang sangat legendaris dan sering dikunjungi adalah Istana Pagaruyuang. Keindahan istana ini menjadi daya Tarik bagi wisaawan baik wisatawan setempat atau wisatawan dari luar negeri, tentu hal ini memperngaruhi pembangunan ekonomi di daerah sekitar Wisata Istana Pagaruyuang. Tidak hanya Istana Pagaruyuang masih banyak lagi tempat wisata di Tanah Datar yang memiliki keindahan alam yang luar biasa seperti Bukit Aua Sarumpun, Danau Singkarak, Lembah Anai, Gunung Tandikat, dll. Namun, pandemi covid-19 menyebabkan pariwisata di Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Sebagaimana yang diketahui bahwa sektor pariwisata dapat mempercepat pembangunan ekonomi regional, karena pariwisata memberikan efek pada sektor-sektor lainnya, seperti ekonomi, lingkungan, serta sosial. Pada sektor ekonomi berpengaruh pada peningkatan jumlah pendapatan daerah, menekan angka pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat, sektor sosial seperti dilihat pada interaksi masyarakat dan pengunjung, dan sektor lingkungan terlihat pada efek yang ditimbulkan pada lingkungan. Jadi diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan sektor pariwisata yang tertinggal karena pandemi untuk

mempercepat pembangunan ekonomi regional di Kabupaten Tanah Datar.

Penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi covid-19 tidak hanya terjadi di Kabupaten Tanah Datar. Dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata merata terjadi di setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penerapan new normal Di Kota Bukittinggi dimulai sejak 1 Juni 2020. Hal ini membuat Pemerintah Kota Bukittinggi giat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu pemerintah menerapkan beberapa strategi pariwisata dalam menghadapi new normal.

Strategi yang direncanakan yaitu menerapkan transaksi secara digital . Ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus korona. selain itu, strategi melalui digital dinilai lebih efektif. Selanjutnya menetapkan daya dukung tempat wisata, sebagai contoh dibatasinya jumlah pendaki yang ingin naik gunung. Hal ini dilakukan untuk menjaga keelokan dan kelestarian alam. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ditengah pandemi dengan melaksanakan kebijakan new normal secara baik.

Di tengah pandemi ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah datar dibutuhkan strategi-strategi yang efektif. Tempat wisata harus memiliki standar kualitas yang tinggi, baik itu fasilitas dan kondisi lingkungannya. Hal ini dilakukan agar wisatawan memiliki daya tarik yang tinggi untuk berkunjung lebih lama. Pemerintah daerah menyatakan ditengah pandemi ini fokus pemerintah yaitu memperbaiki produk wisata untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan. Kuantitas dan kualitas harus diperhatikan agar sektor pariwisata dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dalam meningkatkan pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tanah Datar berupaya membangkitkan antusias dan kekuatan pelaku wisata. Salah satu pelaksanaannya

yaitu adanya pelatihan manajemen homestay. Pelatihan ini diikuti oleh 40 orang manejer homestay di Kabupaten Tanah Datar. Kajian yang disampaikan pada pelatihan ini seperti cara memberikan servis yang optimal, pengelolaan yang baik, serta meningkatkan pengenalan pada homestay yang didirikan. Pemateri pada pelatihan ini adalah seorang dosen dari Politeknik Negeri Padang. Beliau merupakan perintis homestay di Kota Sawahlunto dan manejer salah satu hotel terkenal di Batusangkar.

Pemerintah Daerah juga mengadakan kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan pariwisata di Tanah Datar. Institut ini juga sudah banyak membantu proses pembangunan dalam Pendidikan serta penyusunan rencana daerah. Kerja sama ini harus disikapi dengan cermat dengan membuat rencana kegiatan yang harus direalisasikan. Pengelolaan sumber daya alam dengan tepat dapat memajukan perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini. Untuk mewujudkan Tanah Datar sebagai pusat wisata di Sumatra Barat diperlukan dukungan dari berbagai sektor baik masyarakat ataupun kondisi lingkungannya.

Salah satu objek wisata utama di Tanah Datar yaitu Istando Basa Pagaruyuang yang berlokasi di Batusangkar. Tempat wisata ini kaya akan sejarah dan budayanya, inilah yang menjadi daya tarik wisatawan. Pada masa pandemi tentu kunjungan wisatawan tidak ada. Kebijakan new normal menjadi peluang untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Istando Basa Pagaruyuang. Pemerintah giat meningkatkan kesiapan objek wisata ini untuk dibuka kembali pada pandemi ini. Upaya yang dilakukan yaitu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M selama berkunjung ke tempat wisata.

Untuk melihat kesiapan dibuka kembali Istando Basa Pagaruyuang, Gubernur Provinsi Sumatra Barat, Bapak Irwan Prayitno datang langsung ke Batusangkar. Beliau beserta

rombongan berharap kunjungan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Istano Basa Pagaruyuang. Beliau berharap dengan dibukanya objek wisata ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar tempat wisata. Kedatangan Bapak Irwan Prayitno diharapkan dapat memulihkan pariwisata , serta membuat masyarakat percaya dalam membuka usaha disekitar tempat wisata untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Kunjungan ini membuat peluang pada lima objek wisata yang akan dibuka di Tanah Datar siap untuk dipromosikan.

Sektor pariwisata menjadi satu-satunya sumber pendapatan asli daerah di kabupaten tanah datar. Hal ini dikarenakan Tanah Datar tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah dari pajak seperti Kota Bukittinggi. Potensi pariwisata yang dimiliki menjadi sumber pendapatan asli daerah yang dapat ditingkatkan. Oleh karena itu setiap pemasaran dan pengelolaan pariwisata diawasi secara langsung oleh inspektorat dan DPRD Kabupaten Tanah Datar. Selain Istano Basa Pagaruyuang, masih banyak lagi objek wisata di Tanah datar yang belum terkelola dengan baik. Jika dilakukan perbaikan demi mengembangkan objek wisata yang belum terkelola secara benar, tentu hal ini akan membuat peningkatan pada pendapatan asli daerah Tanah Datar.

Peran sumber daya manusia sangat penting dalam mengembangkan objek wisata. Objek wisata tidak akan berkembang dengan baik jika SDM nya belum memadai. Untuk memperbaiki hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Tanah datar mengadakan pelatihan, serta mengarahkan setiap pengelolaan objek wisata agar terkelola secara baik. Jika objek wisata terkelola dengan baik, maka proses promosi tempat wisata akan lebih mudah, dan kunjungan wisatawan akan meningkat. Oleh karena itu perlunya pelatihan bagi SDM agar kunjungan wisatawan meningkat,serta dapat meningkatkan sumber

pendapatan asli daerah di Tanah Datar. selain itu koordinasi sektor pendukung pariwisata juga sangat dibutuhkan.

### Kesimpulan

Dengan kebijakan new normal, pemerintah daerah Tanah Datar menjadi giat dalam menentukan strategi-strategi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata yang tertinggal. Sektor pariwisata berpengaruh pada percepatan ekonomi regional, karena sektor pariwisata memberikan dampak pada sektor ekonomi, lingkungan, serta sosial. Dalam meningkatkan kembali pariwisata yang tertinggal, pemerintah daerah Tanah Datar memfokuskan pada perbaikan kuantitas serta kualitas tempat wisata, membangkitkan antusias dan kekuatan pelaku wisata, serta berkerjasama dengan berbagai instansi untuk memajukan pariwisata di Tanah Datar. Sektor pariwisata menjadi satu-satunya sumber pendapatan asli daerah, oleh karena itu peningkatan sektor wisata ditengah pandemi harus dioptimalkan. Tempat wisata yang belum terkelola dengan baik harus dilakukan perbaikan. Pemerintah memberikan pelatihan, serta mengarahkan setiap pengelolaan tempat wisata agar pengelolaannya dapat sesuai SOP. Sumber daya yang berkualitas tentu dapat mempercepat kemajuan sektor wisata suatu daerah.

Saran penulis dalam esai ini yaitu dalam pengelolaan tempat wisata ditengah pandemi ini memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan. Pemerintah daerah harus memberikan kebijakan dan standar layak sebuah tempat wisata untuk dibuka. Selain perbaikan kualitas dan kuantitas tempat wisata, kesadaran akan mengikuti prokes yang sudah ditetapkan tentu sangat penting. Pemerintah daerah dapat menentukan sanksi yang cukup tegas bagi wisatawan yang tidak menuruti prokes selama ditempat wisata. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus

korona, serta tempat wisata tetap bisa dibuka, dengan demikian ketertinggalan sektor wisata akibat pandemi dapat dikejar.

#### Daftar Pustaka

- Admin Jurnal Minang. 2020. “ IAIN Batusangkar ‘SAKATO’ dg Pemda Tanah Datar”, <https://jurnalminang.com/iain-batusangkar-sakato-dg-pemda-tanah-datar/> diakses pada 2 Mei 2021
- Agg. 2020. “ perkembangan Wisata di Tanah Datar Masih Terkendala SDM dan Anggaran”, <https://padangkita.com/perkembangan-wisata-di-tanah-datar-masih-terkendala-sdm-dan-anggaran/> diakses pada 1 Mei 2021
- Alib M. 2020. “10 Tempat Wisata di Tanah Datar Terbaru & Paling Hits Dikunjungi”, [https://10TempatWisata di Tanah Datar Terbaru & Paling Hits Dikunjungi - Andalas Tourism](https://10TempatWisataDiTanahDatarTerbaru&PalingHitsDikunjungi-AndalasTourism) diakses pada 1 Mei 2021
- Humas Tanah Datar. 2020. “ Bangkitkan Pariwisata, Pengelola Homestay Ikuti Pelatihan”, <https://tanahdatar.go.id/berita/4374/bangkitkan-pariwisata-pengelola-homestay-ikuti-pelatihan.html> diakses pada 1 Mei 2021
- Humas Tanah Datar. 2020. “ Penerapan New Normal, Gubernur Irwan Prayitno Kunjungi Kesiapan Sektor..”, <https://tanahdatar.go.id/berita/4079/penerapan-new-normal-gubernur-irwan-prayitno-kunjungi-kesiapan-sektor-pariwisata-tanah-datar.html> diakses pada 1 Mei 2021
- Ulyadays. 2016. “Peranan Sektor Pariwisata Indonesia”, <https://ulyadays.com/peranan-sektor-pariwisata-indonesia/> diakses pada 30 April 2021

## BAB 6

### Upaya Peningkatan Minat Pemuda Dalam Kegiatan Karya Seni Ukir Di Kabupaten Jepara

Firda Tasya Ulayya

#### Latar Belakang

Jepara atau Kabupaten Jepara adalah kota di mana Raden Ajeng Kartini dilahirkan yang biasa dijuluki “Kota Ukir. Bahkan untuk sampai saat ini belum ada kota-kota lainnya yang bisa disebut sama dengan Kota Ukir yaitu Jepara untuk bidang industri kerajinan ukir. Namun, untuk mencapai pada kondisi saat ini, Kabupaten Jepara sendiri telah melalui proses perjalanan sangat panjang dan berliku. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu hingga Islam di Pulau Jawa, Kabupaten Jepara dikenal sebagai kota pelabuhan utara pantai di Pulau Jawa yang memiliki fungsi sebagai pintu gerbang masuknya perdagangan dan interaksi antara kerajaan Jawa dengan Cina dan India.

Pada tahun 1881, R.A Kartini mendapatkan peluang untuk memperkenalkan dan menunjukkan ukiran-ukiran Jepara ke luar negeri melalui teman-temannya di negeri Belanda. Beliau mengirimnya sebagai cinderamata yang di ukir dengan kulit kayu terbaik kekayaan Jepara. Jenis cinderamata yang dikirim diketahui berupa bingkai kaca, tempat rias, tempat buku dan barang-barang hiasan berukir khas Jepara. Kemampuan, keahlian dan keterampilan masyarakat berasal dari generasi turun-temurun. Mereka belajar dan berlatih atas kesadaran sendiri dan tentunya orang tua mendorong anak-anaknya untuk ikut

meneruskan wisan tersebut serta lingkungan masyarakatnya yang mendukung.

Berkat kegigihan R.A Kartini, kerajinan seni ukir telah masuk dalam era baru yang bukan hanya sebagai fungsi hiasan saja, tetapi juga menjadi kerajinan yang memiliki fungsi pakai, memiliki nilai jual yang sesuai dengan kualitas dan kesulitan dalam pembuatan sehingga dapat menjadi unsur peningkatan perekonomian pengrajin dan menjadikan rakyatnya lebih semangat dalam berkarya serta hidup sejahtera. Akibatnya beberapa permintaan yang datang, dan kegiatan hasil produksi mulai bertambah jenisnya seperti tempat tidur, kursi, meja, meja rias, sekat jendela dan lain-lain. Ini juga mempermudah perkembangan karya seni ukir dari Kabupaten Jepara yang memiliki khas dan kualitasnya sendiri.

Perkembangan kerajinan seni ukir telah memasuki era globalisasi. Proses globalisasi berawal dengan kemajuan bidang teknologi informasi, komunikasi, dan industri yang menjadi faktor utama gerakan. Hingga sampai diabad ke-20 ini telah terjadi banyak perubahan pada sistem teknologi dan pola pikir manusia dimana industrialisasi lebih dominan, pemanfaatan teknologi lebih berperan daripada tenaga manusia itu sendiri. Kebudayaan barat dan korean yang mulai masuk dan menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat dan merasa bahwa kebudayaan atau adat tradisional mulai dikesampingkan atau sedikit demi sedikit luntur dihapus zaman.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang paragraf diatas dapat difokuskan pada beberapa persoalan yang dihadapi di era globalisasi ini yaitu bagaimana Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Jepara menjaga, melestarikan dan mengembangkan karya seni ukir di lingkungan pemuda milenial sebagai penerus bangsa. Dan dalam hal ini juga dipengaruhi oleh masuknya budaya western dan korean yang sedang melanda

Indonesia. Pengrajin juga harus menyadari pada perubahan dan perkembangan permintaan konsumen tidak pernah habis dan bervariasi. Untuk itu kreativitas dan produktivitas dalam perwujudannya untuk selalu ditingkatkan untuk terpenuhinya tuntutan masyarakat lokal maupun internasional.

### Tujuan Essay

Dari uraian dan pernyataan diatas, essay ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengatasi minat pemuda dalam mengembangkan karya seni ukir yang sudah ada dari generasi ke generasi di era globalisasi ini.

### Pembahasan

Dalam permasalahan yang dihadapi yaitu upaya peningkatan minat pemuda dalam karya seni ukir yang khususnya di hadapi oleh pemerintah Kabupaten Jepara berdampak pada permasalahan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat menjaga, merawat dan melestarikan apa yang sudah menjadi khas dan budaya turun-temurun seiring berkembangnya zaman. Kerajinan atau kriya kayu yang sudah menjadi khas harusnya terus dikembangkan dan dilestarikan untuk memenuhi pendapatan daerah yang secara tidak langsung juga negara. Di mana jika dikelola dan dikembangkan dengan baik akan menarik perhatian internasional sehingga terjadi kegiatan ekspor barang. Dan dalam hal tersebut dapat memicu perkembangan pembangunan ekonomi regional yang dapat mengatasi persoalan kesenjangan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi regional sejatinya memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang di miliki wilayah atau regional tersebut untuk kepentingan bersama.

Tidak hanya di daerah Kabupaten Jepara, karya seni ukir atau kriya kayu juga terjadi di beberapa daerah. Salah satunya adalah Bali, di sana terdapat ukiran-ukiran kayu dan batu untuk

upacara adat, hiasan tempat ibadah, acara keagamaan, dan lain-lain. Di Bali juga mengembangkan kriya kayu dengan membuat gitar dengan ukir-ukiran yang khas daerah Bali. Inovasi baru itu membuat wisatawan tertarik dan merupakan terobosan baru dalam kriya kayu. Bukan hanya itu motif dan jenis pada ukiran atau pahatan juga mulai beragam menyesuaikan perkembangan zaman dan tidak meninggalkan ciri khasnya. Dan kegiatan tersebut menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di Bali.

Bukan hanya di Bali, di daerah Yogyakarta juga terdapat karya seni ukir pada kayu dan batu. Daerah Yogyakarta sendiri memiliki motif yang khas dan terkenal yang disebut “Ukiran Perak Yogya”. Ukiran tersebut lebih cenderung pada tumbuhan atau bunga seperti daun pakis dan bunga mekar. Meskipun tidak menjadi ciri khas utama dan Yogyakarta juga sudah seperti daerah yang modern tetapi kerajinan tersebut tetap dijalankan bahkan dikembangkan. Di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat juga memiliki ciri khas ukir, di mana semua jenis ditunjukkan dengan unsur alam yang disebut dengan istilah “Alam Takambang Jadi Guru” yang berarti suatu budaya yang berguru pada alam. Dan menempatkan ukiran pada seluruh tubuh bangunan pada rumah adat Minangkabau.

Merujuk pada tantangan yang dihadapi yaitu mengatasi minat pemuda mengenai kerajinan seni ukir, pemerintah harus mulai memperhatikan dengan baik. Dalam hal ini perubahan zaman atau era globalisasi sangat berpengaruh pada anak muda atau biasa disebut kaum milenial. Karena dalam perkembangan zaman yang terjadi ini banyak hal yang berubah. Semua akan dibuat mudah, cepat dan efisien dengan teknologi-teknologi baru. Pemikiran yang mulai berubah mengenai suatu pekerjaan dimana dari rumah saja bisa menghasilkan uang lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang berada di luar rumah. Dan mungkin berpikir bekerja kantoran lebih baik itu masih ada.

Masyarakat Indonesia harus selalu mengerti mengenai pentingnya menyaring budaya apa yang masuk ke dalam

Indonesia. Tidak semua kita bisa telan mentah-mentah dan berujung menghilangkan apa yang menjadi ciri khas kita. Dalam hal ini pendidikan dalam sekolah juga dituntut terus membimbing para penerus bangsa untuk mengenal budaya Indonesia dan budaya khas di daerah masing-masing dengan penerapan kurikulum muatan lokal (mulok). Dan menurut saya, kurikulum tersebut harus terus dijalankan dari pendidikan dini atau Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat sebagai dasar pengetahuan akan budaya khas daerah masing-masing dan menumbuhkan minat dalam mengenali dan mempelajari budaya tersebut.

Dalam proses pelaksanaan kurikulum tersebut juga ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu kualitas pengajar dalam menguasai materi dan benar-benar ahli dalam bidang kesenian tersebut, salah satunya seni ukir. Selain itu, pemerintah khususnya Kabupaten Jepara sendiri memiliki tantangan yang nyata dengan masuknya produk-produk luar negeri salah satunya dari China yang menjadi pesaing di insutri yang sama yaitu meubel. Produk China dianggap memiliki kulaitas yang lebih baik di banding produk dalam negeri. Dan sekarang banyak industri pabrik yang berdiri di wilayah Jepara seperti pabrik sepatu dan pabrik kabel yang di pegang oleh perusahaan asing. Di mana untuk berkerja di pabrik tersebut memiliki syarat yang mudah salah satunya adalah lulusan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) bisa bekerja di pabrik tersebut. Keunggulan lain dari bekerja di pabrik tersebut adalah para pekerjanya mendapat gaji pasti setiap bulan sebesar Upah Minimum Regional(UMR) dan difasilitasi kredit motor dengan memotong gaji setiap bulannya. Hal ini tentu saja menarik perhatian masyarakat untuk bekerja di pabrik atau perusahaan tersebut, khususnya para anak muda. Inilah yang menyebabkan kurangnya tenaga pengrajin dalam industri meubel atau kerajinan seni ukir.

Untuk cara mengatasi hal tersebut pemerintah diminta untuk membatasi pembangunan pabrik di wilayah Jepara dan mulai mengadakan yang lebih mengenai kebudayaan yang ada di Jepara. Ada beberapa contoh kegiatannya yaitu dengan mengadakan lomba kerajinan seni ukir(pahatan) secara berkala yang bisa diikuti oleh pelajar SMP-SMA dan umum. Kemudian mengadakan pameran seni ukir yang dilakukan di hari-hari besar, seperti saat HUT Kabupaten Jepara, Perayaan Hari Kartini, Perayaan HUT RI dan lain-lain. Semua karya terbaik di pertontonkan untuk memperkenalkan lagi kebudayaan dan seni ukir Jepara di mata masyarakat lokal maupun internasional. Bukan hanya hasil dari pengrajin saja tapi proses dalam membuat juga bisa diperlihatkan kepada masyarakat.

Pemanfaatan teknologi modern juga harus diperkenalkan untuk mempermudah proses pembuatan, manajemen pemasaran dan promosi juga harus dikembangkan semenarik mungkin agar dapat menarik konsumen dari luar negeri untuk kegiatan ekspor-impor. Peningkatan inovasi dan kreativitas terus dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas dari budaya daerah. Pelatihan dan pengembangan bakat dari pemudanya juga dapat di asah sebaik mungkin dengan program yang terjamin. Dan juga keikutsertaan atau penggunaan seni ukir dalam lingkup pemerintahan entah itu fasilitas di dalamnya atau dalam *event-event* pemerintahan.

Kemudian di wilayah Jepara sendiri ada desa yang sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai pengrajin ukiran kayu, desa tersebut bernama Desa Mulyoharjo terletak tidak jauh dari ibuota kabupaten. Dari desa tersebut, pemerintah diharapkan terus memperhatikan agar menjadi desa yang khas dan menarik minat wisatawan untuk melihat dan mengunjungi desa tersebut. Pemerintah juga diharapkan memiliki kebijakan dan program sendiri dalam pengembangannya. Mungkin dari sisi perbaikan desa tersebut, pemberian tunjangan kepada pengrajinnya, menambah fasilitas dalam prosesnya, dan lain-lain.

Karena potensi tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri seperti halnya yang dilakukan di daerah Bali yaitu Desa Adat yang menyuguhkan adat istiadat yang kental di dalamnya, Desa Kamasan yang menjadi desa wisata karena desa tersebut penghasil dan pengrajin seni lukis wayang tradisional di Bali.

Melihat dan belajar dari daerah-daerah lain dalam mengembangkan kebudayaannya pemerintah Kabupaten Jepara harus melakukan program atau kebijakan dalam mengembangkan potensi daerah dengan maksimal. Memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan budaya daerah. Dengan kita mengembangkan dan melestarikan karya seni ukir tersebut dapat berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat. Kerajinan karya seni ukir dinilai dapat membantu dalam kenaikan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Dan dengan perkembangan zaman atau era baru yang semakin modern ini, maka jenis, bentuk dan gaya dalam ukiran bisa dibuat lebih bervariasi, dapat di modifikasi dan menarik. Sehingga kerajinan seni ukir dapat terus terjaga dan berkembang dan juga menjadi faktor besar dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Jepara dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

### Kesimpulan

Keahlian dan kemampuan ukir kayu di lingkungan masyarakat Jepara adalah hasil dari warisan turu-temurun dari nenek moyang dengan keterampilan dan kemampuan yang diwariskan juga. Dengan adanya situs peninggalan ukiran kayu yang terdapat pada makam dan masjid Mantingan menjadi bukti adanya keahlian dan kemampuan tersebut. Yang selanjutnya diteruskan oleh sang percentus emansipasi wanita yaitu Raden Ajeng Kartini yang menyebabkan munculnya pendidikan-pendidikan formal dan nonformal hingga sekarang. Keahlian yang dimiliki masyarakat dalam seni ukir memang diakui sangat bagus dan menakjubkan, buktinya adalah pasar meubel yang

sudah memasuki pasar internasional atau luar negeri. Perkembangan yang terjadi mendapat respon positif dari para pengrajin dan perusahaan yang menaungi yang membuat mereka bergerak cepat sehingga keinginan dan permintaan konsumen terpenuhi dengan baik. Namun, ada beberapa kekurangan didalamnya salah satunya adalah permintaan dan keinginan dari konsumen lebih cenderung modern sehingga lokalitas dari Jepara sendiri tidak terlihat dalam seni ukir tersebut. Mentah-mentah budaya asing yang diterima itu berdampak pada kelekatan hasil produk terhadap ciri khas Jepara dan Indonesia, inilah yang menjadi tantangan dalam perkembangannya. Walaupun begitu tidak semua produk didesain dengan modern para pengrajin tetap memproduksi karya-karya lokal yang hasil tersebut lebih kepada penjualan dalam negeri. Dan dengan penerusan ke generasi baru diharapkan seni ukir kayu selalu berkembang dan tetap pada lokalitas keunikan Jepara.

#### Saran

Dalam proses yang terus berjalan dan waktu terus berputar akan terjadi perubahan dalam segala bidang khususnya di era modern atau globalisasi ini. Diharapkan pelatihan, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerajinan karya seni ukir kayu ini terus digalakkan untuk memupuk pengetahuan para pemuda mengenai budaya yang menjadi peluang besar dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Keahlian dan keterampilan para pengrajin seni ukir kayu juga perlu diapresiasi dan diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Dan hal ini juga dapat menjadi warisan dunia yaitu dengan merekomendasikan kepada UNESCO sebagai warisan budaya nonbenda agar keahlian tersebut bukan hanya milik Kabupaten Jepara dan tidak hanya Indonesia tetapi juga dunia.

## Daftar Pustaka

- Adiakurnia, M. I. (2017). Menengok Sentra Kerajinan Kayu Ukir di Kuningan. *Kompas.com*, 1.
- Administrator. (2019). Seni Ukir Jepara Berkelas Dunia. *indonesia.go.id*, 1.
- Ayuningtyas Putri Pratiwia, K. K. (2017). Analisa Perkembangan Motif Ukiran Di Jepara Pada Abad Ke-16 Hingga Abad Ke 17. *Bina Nusantara University*, 1-21.
- Enrico Alamo, E. W. (2014). Jurnal Ekspresi Seni. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, 1-28.
- Hanifah Isnan, Y. R. (t.thn.). Pelestarian Pengetahuan Seni Ukir Masyarakat Minangkabau. *Universitas Diponegoro*, 1-12.  
<https://travel.kompas.com/read/2017/12/24/203000227/menengok-sentra-kerajinan-kayu-ukir-di-kuningan?page=all>
- Muhajirin. (2018). Respon Adatif Masyarakat Perajin Seni Ukir Jepara. *UNNES*, 1-201.
- Puspita, P. (2018). Mengenal Ukiran Khas Bali, Apa yang Istimewa dari Kesenian Ini? *bobo.grid.id*, 1.  
<https://bobo.grid.id/read/08917448/mengenal-ukiran-khas-bali-apa-yang-istimewa-dari-kesenian-ini?page=2>

## BAB 7

### Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Belitung Dengan Mengandalkan Sektor Pariwisata Dan Perikanan Di Masa Pandemi *Covid-19*

Muhammad Hanif Muttaqin

#### Latar Belakang

Mulai dari Bulan Juni 2020 Kabupaten Belitung terkonfirmasi ada yang terpapar virus *Covid-19* dan terus menunjukkan peningkatan setiap harinya. Hal ini berakibat menurunnya wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung, dan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru seperti pengurangan penerbangan ke Belitung, dilarang keluar rumah kecuali kepentingan mendesak, larangan untuk mudik, larangan untuk berkumpul dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut pada awal-awal membuat masyarakat menjadi kebingungan untuk melakukan aktifitas seperti biasa. Apalagi dalam menjalankan protokol kesehatan 4M, yaitu: Menjaga jarak, Memakai Masker, Mencuci tangan, dan Menghindari Kerumunan. Masyarakat Belitung dapat dibilang sebagai orang-orang yang tidak peduli akan aturan seperti 4M, masih banyak masyarakat keluar rumah tidak menggunakan masker dan membuat kerumunan di beberapa tempat.

Hal ini membuat Pemerintah harus bersikap tegas terhadap masyarakat yang masih melanggar. Pemerintah pun lebih

memfokuskan cara untuk menekan penyebaran virus *Covid-19* agar tidak meledak dan Pulau Belitung tidak termasuk dalam zona merah ataupun hitam. Salah satunya dengan sering berpatroli setelah Shalat Isya sampai pukul 22.00 WIB. Cara ini bisa dibilang cukup ampuh dalam menekan penyebaran virus *Covid-19*.

Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* banyak masyarakat yang mengalami permasalahan di sektor ekonomi terutama masyarakat menengah kebawah, apalagi bagi mereka yang mengandalkan sektor pariwisata dan perikanan. Dengan dibatasinya penerbangan dan kebijakan PSBB maka wisatawan secara drastis menurun. Banyak masyarakat dipesisir pantai yang mencari nafkah dengan menjadi *tour get* bagi wisatawan. Sehingga mereka harus memutar otak untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari beberapa kebijakan yang telah dilakukan, dampak pandemi *Covid-19* masih terus terjadi terutama pada sektor UMKM. Pemerintah Kabupaten Belitung harus bekerja lebih keras agar dapat menyelesaikan urusan perekonomian yang menurun. Banyak sekali UMKM masyarakat yang harus tutup karena pandemi, dan banyak orang beralih profesi. Mereka masih menunggu bantuan-bantuan yang di salurkan oleh pemerintah agar bisa mereka manfaatkan untuk modal buka usaha dan lain sebagainya.

#### Rumusan Masalah

Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menstabilkan perekonomian akibat pandemi *Covid-19* terutama masyarakat yang mengandalkan sektor pariwisata dan perikanan?

#### Tujuan Essay

Dari penjelasan diatas, essay ini dibuat untuk memberikan gambaran kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah

Kabupaten Belitung dalam menstabilkan perekonomian akibat pandemi *Covid-19* terutama dalam sektor pariwisata dan perikanan.

#### Pembahasan

Dampak pandemi corona sangat berpengaruh sekali disektor perekonomian masyarakat. Dimana setiap daerah diseluruh Indonesia pasti mengalami penurunan pendapatan perkapita khususnya UMKM. Tidak terkecuali di Kabupaten Belitung dimana pemerintah harus menemukan alternatif yang tepat dalam menumbuhkan kembali perekonomian di masyarakat. Salah satunya dengan menambah daya tarik wisatawan luar untuk berkunjung ke Pulau Belitung. Dan alternatif lain yang diambil dengan menurunkan harga ikan atau Sumber Daya Laut agar masyarakat ekonomi menengah kebawah bisa merasakannya. Serta mempromosikan keindahan alam yang ada di Belitung baik secara nasional maupun internasional.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah memberikan strategi guna memulihkan perekonomian di seluruh Kabupaten se-Bangka Belitung. Menurut beliau (Erzaldi Rosman) ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi dan ditindak lanjuti oleh kabupaten masing-masing. Untuk Kabupaten Belitung sendiri kasus yang terkonfirmasi terbilang paling rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya, oleh karena itu penurunan perekonomian di Kabupaten Belitung tidak terlalu jauh. Hanya saja perlu sedikit perhatian dari pemerintah ke masyarakat yang mengandalkan sektor perkebunan.

Dalam Website resmi Pemerintah Kabupaten Belitung di jelaskan dalam meningkatkan dan memajukan UMKM di tengah pandemi covid-19 khususnya Kabupaten Belitung maka harus melibatkan market place seperti shopee, Tokopedia, blibli dan lain-lainnya. Selain market place, juga diperlukan influencer,

sehingga mereka yang nantinya akan mempromosikan produk-produk asli Belitung ke seluruh Indonesia maupun dunia. Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Belitung (Isyak Meirobie) pada saat workshop antara Pemkab Belitung dengan pelaku UKM, beliau menampilkan ada 51 UKM yang ada di Kabupaten Belitung dan menyampaikan bahwa selama ini Pemkab Belitung sudah memberikan dukungan penuh bagi UMKM, seperti kemudahan dalam proses pembuatan izin usaha.

Menteri kelautan dan perikanan pernah melakukan kunjungan ke Belitung pada tanggal 26 Maret 2021. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat potensi yang ada di Belitung dalam menunjang perekonomian masyarakat melalui sektor perikanan. Fokus pertama ialah pembangunan budidaya ikan air tawar karena didukung oleh infrastruktur alam yang sangat bagus dan sudah menjadi program lama pemerintah daerah. Kedua, adalah peningkatan budidaya yang sudah ada dengan melibatkan masyarakat lokal, otomatis menjadi lapangan pekerjaan baru bagi penduduk sekitar. Dan terakhir adalah pengembangan kampung nelayan dengan budidaya ikan berbasis kearifan lokal, yang nantinya tiap kampung akan mengembangkan satu jenis ikan yang menjadi ciri khas kampung tersebut.

Sudah banyak Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Belitung dalam menstabilkan perekonomian di tengah pandemi. Dengan mendatangkan narasumber dari berbagai daerah hingga kedatangan pejabat negara seperti Menteri perikanan dan kelautan. Hal ini dilakukan agar munculnya solusi atas permasalahan yang dihadapi khusus di daerah Belitung. Dengan mengandalkan sektor yang diunggulkan yaitu pariwisata dan perikanan atau sumber daya laut. Sejauh ini dianggap cukup ampuh untuk menopang perekonomian di Kabupaten Belitung.

Pada sektor pariwisata pemerintah Belitung melakukan Kerjasama atau MoU dengan PT Lengka Tre Indonesia pada

pertengahan bulan maret 2021. Kegiatan yang dilakukan dalam Kerjasama ini salah satunya launching branding yang ditawarkan oleh PT Lengkara kepada Pemkab Belitung berupa slogan dan logo baru yaitu “*Let’s go to Belitung*”. Dengan tujuan untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Pulau Belitung. Hal ini bisa terjadi karena pada tahun 2018 lalu Direktur Utama PT Lengkara Tre Indonesia pertama kali berkunjung ke Belitung, dan langsung memuji keindahan alam serta keunikan fauna yang ada disana. Beliau sangat menyayangkan jika tidak di Kelola dengan baik oleh pemerintah setempat maka kekayaan alam tersebut akan sia-sia. Peluncuran slogan dan program “*Let’s go to Belitung*” juga mendapat respon positif dari Bupati Belitung karena beliau menganggap kata-katanya mudah dipahami dan mempromosikan pariwisata yang ada di Pulau Belitung.

Belitong Geopark Youth Community merupakan suatu wadah pemuda untuk mengumpulkan ide dan gagasan serta memberikan aksi nyata dalam meningkatkan perekonomian khususnya di daerah maupun nasional. Diresmikan langsung oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Geosite Batu Bedil Desa Sungai Padang Kecamatan Sujuk Kabupaten Belitung, Sabtu (14/2/2021). Beliau mengatakan dengan di resmikannya komunitas ini muncul peran para pemuda dalam meningkatkan perekonomian khususnya di Belitung dan di era New normal saat ini. Salah satunya dengan memberikan pemahaman dan pengaruh pada masyarakat lokal khususnya untuk mempertahankan UGG dan memanfaatkannya dalam upaya peningkatan ekonomi di era pandemi Covid-19. Hal yang sama di lontarkan oleh orang nomor satu di Belitung yaitu Sahani Saleh, beliau mengharapkan setelah peresmian ini wisata Batu Bedil dapat mendunia dan berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat.

Kedatangan Menteri Pariwisata (Sandiaga Uno) ke Belitung pada tanggal 8 Februari 2021 kemarin juga mengundang

sorotan Publik. Peristiwa ini dinilai dari Bupati Belitung dapat menjadi gebrakan dan dorongan semangat bagi Pemkab Belitung dalam memulihkan kembali pariwisata yang sempat terpuruk karena pandemi, dan akhirnya berpengaruh pada meningkatnya perekonomian. Fokus kedua Menparekraf ialah pemulihan para pelaku pariwisata yang ada di Belitung. Salah satunya ialah pelaku ekonomi kreatif yang menjadi fokus Menparekraf berkunjung ke Belitung. Pemulihan ini akan secara berkelanjutan membangun destinasi pariwisata berbasis masyarakat.

Pada kunjungan ini juga Menparekraf ingin meningkatkan atau menambah destinasi berbasis pengelolaan masyarakat lokal yang ada di Pulau Belitung. Untuk sekarang sudah ada dua destinasi yaitu Juru Sebrang dan Bukit Peramun. Target Pemerintah akan ada 32 tempat baru dengan Langkah awal 7 destinasi yang menjadi prioritas. Menurut Bupati Belitung dengan adanya kunjungan ini Manparekraf dapat mendorong pengembangan destinasi baru yang ada di Pulau Belitung dan melihat hambatannya langsung di lapangan. Dorongan positif pun dirasakan oleh seluruh anggota Pemda dalam memajukan nama Belitung di kancah nasional maupun Internasional. Jika sudah mendunia maka otomatis perekonomian Belitung meningkat drastis dan bisa melampaui kota-kota besar di Indonesia.

Dan salah satu upaya terakhir atau pencapaian pemerintah Kabupaten Belitung ialah ditetapkan nya Belitung sebagai Taman Bumi Global oleh UNESCO. Pencapaian ini sangat membuat masyarakat Belitung menjadi sangat bangga akan daerahnya. Bukan tanpa alasan, karena Belitung menjadi perwakilan satu-satunya Asia untuk Taman Bumi Dunia. Salah satu faktor adalah memiliki warisan geologi yang cukup tinggi dan keragaman biologis maupun budaya. Hal tersebut membuat otomatisasi Belitung di kenal oleh dunia, wisatawan dari berbagai penjuru tanah air maupun dunia pasti akan berlomba-lomba untuk

berkunjung ke Belitung. Tentu nya akan meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai sektor seperti pariwisata, kuliner, UMKM dan lain sebagainya.

### Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa pemerintah Kabupaten Belitung sudah melakukan trobosan-trobosan dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian masyarakat di Belitung pasa masa Pandemi ini. Salah satu cara yang cukup efektif dengan melibatkannya *market place* dalam menunjang UMKM. Adanya tawaran dari PT Lengka Tre Indonesia dengan program Lets Go Belitung yang membuat wisatawan menjadi banyak berkunjung ke Belitung, sehingga hotel-hotel menjadi penuh, kuliner di Belitung menjadi laris dan sektor-sektor lainnya.

Tidak hanya di sektor pariwisata saja, namun di sektor perikanan pun memberikan efek yang cukup positif bagi perekonomian masyarakat pulau Belitung. Dengan dikembangkannya tambak-tambak ikan membuat produksi ikan air tawar menjadi meningkat. Pelaksanaan dan pemeliharaannya pun akan terus ditingkatkan demi menjaga keberlangsungan tambak ikan di salah satu titik yang telah ditentukan. Dan prestasi yang sangat membanggakan dengan ditetapkannya Belitung menjadi anggota UNESCO GLOBAL GEOPARK atau UGG sebagai perwakilan satu-satunya asia. Dengan adanya trobosan dan prestasi yang di raih oleh pemerintah daerah menurut saya bukan hanya dapat menstabilkan perekonomian di Belitung tapi juga dapat meningkatkan taraf ekonomi dan taraf kuliatas hidup masyarakat Belitung.

Saran saya terhadap pemerintah Kabupaten Belitung agar dapat mempertahankan trobosan dan prestasi yang telah di raih. Agar dapat bekerja semaksimal mungkin demi masyarakat

Belitung yang sejahterah. Bupati selaku pemegang kendali roda pemerintahan kabupaten harus mampu bekerja dengan penuh integritas dan memiliki sifat visioner, artinya mampu melihat peluang-peluang yang ada di Pulau Belitung dan memaksimalkannya. Himbauan juga perlu dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kalau tidak ada kontribusi penuh dari masyarakat Belitung dalam menjaga ekosistem maka apa yang telah di lakukan oleh pemerintah akan menjadi sia-sia.

Pada saat pelaksanaannya pemerintah juga harus jeli dan disiplin. Bisa melihat permasalahan yang akan dihadapi kedepannya. Karena, ada pepatah mengatakan lebih sulit mempertahankan suatu prestasi dari pada menggapainya. Artinya beban yang di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung tidaklah kecil. Ketika terjadi suatu kendala kedepannya pemerintah harus mengambil kebijakan yang pro kepada kesejahteraan masyarakat. Dan harus adanya transparansi antara pemerintah dan masyarakat setempat jika ada suatu kendala agar bisa diselesaikan dengan baik-baik, tidak perlu ada pihak yang harus dirugikan.

### **Daftar Pustaka**

*Kementerian KP Akan Kembangkan 3 Sektor Perikanan Di Kabupaten Belitung.* (2021, Mei 9). Retrieved from m.belitung.go.id:

<https://m.belitung.go.id/read/2600/kementerian-kp-akan-kembangkan-3-sektor-perikanan-di-kabupaten-belitung>

*Menparekraf Kunjungi Belitung, Bupati Belitung : Semangat Baru Untuk Pulihkan Pariwisata Belitung.* (2021, Mei 9).

Retrieved from m.belitung.go.id:

<https://m.belitung.go.id/read/2574/menparekraf-kunjungi-belitung-bupati-belitung-semangat-baru-untuk-pulihkan-pariwisata-belitung>

*Perkuat Promosi Pariwisata Pemkab Belitung Jalin Kerjasama Dengan PT Lengkara Tre Indonesia.* (2021, Mei 9).

Retrieved from m.belitung.go.id:  
<https://m.belitung.go.id/read/2604/perkuat-promosi-pariwisata-pemkab-belitung-jalin-kerjasama-dengan-pt-lengkara-tre-indonesia>

Pradipta, P. (2021, Mei 9). *UNESCO Resmi Tetapkan Belitung sebagai Taman Bumi Global*. Retrieved from [www.kompas.id](http://www.kompas.id): <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/22/unesco-resmi-tetapkan-belitung-sebagai-taman-bumi-global/>

## BAB 8

### Peran TPS3R Dalam Upaya Mengurangi Dampak Sampah Sampai Dengan Meningkatkan Pendapatan Desa Di Kabupaten Gianyar

Ni Wayan Ariyuni

#### Latar Belakang

Gianyar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki destinasi wisata yang cukup banyak. Destinasi wisata ini termasuk yang paling diminati oleh wisatawan mancanegara. Gianyar sendiri terdiri dari tujuh kecamatan yaitu kecamatan Gianyar, Ubud, Tampaksiring, Tegalalang, Sukawati, Blahbatuh, dan Payangan. Setiap kecamatannya memiliki daya tariknya sendiri. Ubud menjadi daerah sasaran utama bagi wisatawan karena pedesaannya yang nyaman menjadi tempat istirahat. Tampaksiring menyimpan objek wisata yang sangat menarik seperti Pura Tirta Empul yang didampingi dengan istana Presiden disampingnya. Tegalalang dengan destinasi wisata terasering sawah yang sangat menyejukkan. Sukawati dengan keseniannya, dan daerah lain yang selalu menyimpan kekayaannya sendiri.

Gianyar adalah daerah pariwisata di Bali yang dikenal dengan Pariwisata Berbasis Budaya. Suatu tempat wisata tentunya dituntut untuk mampu memberikan kenyamanan dengan berbagai factor, salah satunya kebersihan lingkungannya (Purwahita, N. K., 2018). Disamping itu, kunjungan dari berbagai wisatawan tentu menimbulkan suatu pergeseran tata kehidupan

masyarakat dan juga lingkungannya. Masyarakat yang mulai modern dalam kehidupannya, namun perlu diingat bahwa sampah adalah salah satu masalah yang timbul dari kehidupan modern tersebut. (Hannigan, John A. 1995). Hal ini menjadikan Gianyar yang tidak dapat lepas dari kepadatan dan juga sampah yang ditimbulkannya. Maka, kebijakan TPS3R ini menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan.

Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau yang dikenal dengan TPS3R merupakan suatu sistem pengelolaan sampah dari hulu. Sistem ini telah berhasil diterapkan di beberapa desa di kabupaten Gianyar, dan yang paling lengkap terdapat di Desa Taro kecamatan Tegalalang. Pernyataan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bali dan Bupati Gianyar dan penyerahan penghargaan kepada desa yang telah berhasil menerapkan program ini. Program ini terlaksana dengan partisipasi masyarakat serta pengelolaan dari kepala desanya masing-masing. Melalui TPS3R akan membantu dalam upaya mengurangi sampah lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan.

Program TPS3R merupakan implementasi keputusan Gubernur Bali mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/kelurahan. Dimana Bupati Gianyar menyatakan bahwa Gianyar telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber di beberapa desa yang menjadi pilot project. Penerapan ini tentu membuahkan hasil yang paling maksimal di desa Taro yang diberikan penghargaan pada 9 April 2021 lalu. Penghargaan ini tentu menjadi awal bagi desa-desa lainnya untuk bisa mencontoh desa Taro dalam pengelolaan sampahnya. Serta nantinya akan dapat mengurangi kerusakan lingkungan, mengingat daerah wisata yang cukup banyak pengunjung.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, mengenai kemajuan dunia pariwisata khususnya di kabupaten Gianyar yang

memberikan dampak modernisasi sekaligus menyebabkan timbulnya permasalahan sampah di lingkungan masyarakat. Dengan demikian rumusan masalah dalam essay ini adalah bagaimana peran penting dari program PTS3R yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten Gianyar dalam memerangi salah satu masalah modern tersebut, yang nantinya juga dapat membantu dalam perekonomian masyarakat desa yang bersangkutan.

### Tujuan Essay

Dari paparan diatas, maka tujuan dalam penulisan essay ini tiada lain adalah untuk menggambarkan bagaimana pentingnya sistem PTS3R dalam memerangi sampah masyarakat dalam perkembangan dunia pariwisata yang memberikan kemajuan sekaligus masalah lingkungan yang dihadapi desa di kabupaten Gianyar.

### Pembahasan

Dari begitu banyaknya dan sangat bervariasi tata cara pengolahan sampah guna mengurangi dampak buruknya pada lingkungan, maka begitu juga salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Gianyar. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dalam suatu ekonomi pembangunan, tidak dapat dilahirkan suatu kebijakan tanpa adanya pertimbangan serta perspektif dari ilmu-ilmu lainnya yang juga hidup dalam masyarakat. Ilmu yang dimaksud disini alah lmu sosiologi, ekonomi, geografi, politik. Dalam program TPS3R ini tentu telah dipertimbangkan dengan matang agar mampu memberikan dampaknya pada masyarakat serta mampu diterima dengan baik. Begitulah suatu kebijakan yang harus dipertimbangkan dengan wilayah yang bersangkutan. Misalnya dalam bidang ekonomi pembangunan haruslah dilakukan suatu analisis pertumbuhan ekonominya, yang mencakup sector nformal maupun e-commerce. Dalam bidang studi sosiologi pembangunan hendaknya dapat dilakukan pengkajian apakah kemiskinan

ataupun keadaan di masyarakat mampu mempengaruhi masyarakat dalam pengolahan sampahnya. Begitu pula dalam bidang geografi yang meliputi geografi fisik maupun sosial, haruslah mempertimbangkan hal tersebut sebelum lahirnya kebijakan. Lebih singkatnya haruslah dilakukan analisis dari wilayah yang bersangkutan mengingat potensi dari wilayah tersebut. Program pemerintah salah satunya adalah TPS3R yang sudah mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Program ini masih terbilang baru, sehingga pelaksanaannya yang belum merata disetiap desa atau kelurahan. Maka dari tu pemerintah masih terus berupaya untuk menyebarkan kabar baik ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Begitu juga dengan penyuluhannya agar semua masyarakat dapat memahaminya dengan baik.

Permasalahan tentang sampah dialami di berbagai tempat bahkan bisa dikatakan setiap wilayah. Dampak mengenai sampah lebih sering kita dengar dari daerah Jabodetabek. Penduduk yang cukup padat serta kurangnya daerah resapan menjadi salah satu factor pemicu terjadinya banjir Ketika curah hujan yang tinggi melanda. Penanganan yang dilakukan sampai saat ini berupa normalisasi Sungai Ciliwung, pembangunan bendungan, pembangunan sodetan ciliwung dan tanggul laut raksasa. Berdasarkan informasi yang saya dapat, pembangunan bendungan ini telah direncanakan dari tahun 2004, namun baru berjalan di tahun 2017. Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dikatakan mampu mengurangi volume banjir kiriman Bogor ke Jakarta (Ramadhiani, 2017). Dampak dari sampah memang tidak akan pernah ada habisnya, seperti banjir, bahkan karena sampah menjadikan tempat yang kumuh sampai menimbulkan berbagai penyakit (Irianto, 2011). Penyakit yang ditimbulkan seperti malaria atau DBD, akibat sampah yang menggenang di aliran air akan sangat membahayakan Kesehatan. Maka dari sinilah kemudian perlu mengatasinya dengan sangat ekstra. Kebijakan dari pemerintah dan juga Kerjasama dari masyarakat setempat akan sangat membantu. Karena suatu

kebijakan yang tidak didukung oleh sasaran kebijakannya adalah hal yang percuma (I Nyoman Norken, 2019). Sedangkan permasalahan mengenai sampah di Bali terkhusus daerah pesisir. Daerah pantai adalah daerah yang sering mendapat sampah kiriman. Ketika curah hujan yang tinggi, serta kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai yang bahkan sampai ke laut. Keadaan ini memicu terdamparnya sampah di pesisir pantai. Bahkan tidak jarang hewan laut yang mendapatkan dampak dari sampah yang sampai ke laut. Sampah kiriman biasanya terdampar di pantai Kuta atau Sanur bahkan pantai lainnya yang tidak terkecuali. Sampah kiriman bisa mencapai 30-60 ton per harinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini pemerintah setempat mengerahkan tim untuk membersihkan sampah-sampah tersebut bahkan relawan yang juga terjun langsung. Namun sayangnya, sampah kiriman memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sebenarnya bukan lagi masalah daerah, melainkan masalah nasional (Antara, 2020).

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan dan menjadikannya sebagai sumberdaya. Undang-undang ini disahkan pada 7 Mei 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pengesahan undang-undang ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang memiliki nilai guna bagi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Kota Surabaya di tahun 2019 yang mampu menjadikan sampah sebagai energi listrik. Bahkan sampah plastik yang mampu dijadikan aspal, tentu perlu inovasi baru lainnya yang mendukung berjalannya upaya pengurangan sampah. Sampah tidak akan ada habisnya jika tidak diolah menjadi hal yang berguna. Inovasi pengolahan sampah pastilah sangat diperlukan. Maka dengan demikian pemanfaatan yang tepat akan mampu memberikan dampak yang baik dari sampah. Salah satu inovator muda yang

mencetuskan Sampah Muda yang berpusat di Semarang, yang menyediakan *drop point* sebagai tempat pembuangan sampah dan jasa penjemputan sampah. Penyumbang sampah yang memakai jasa Sampah Muda ini akan diberikan imbalan berupa trashpoint yang dapat ditukar menjadi gopay, pulsa ataupun pulsa listrik. Inovator dari startup asal Makasar dengan nama Mallsampah yang menengahi penghasil sampah rumah atau kantor untuk diperjualbelikan kepada pengepul. Serta novasi lainnya seperti Angkuts dan Dispenser Mas Eco yang merupakan hasil dari upaya mengurangi limbah sampah. Inovasi yang dapat dikatakan sederhana namun sangat membantu masyarakat terdapat di Kota Bitung Sulawesi Utara. Dimana sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakatnya dapat ditukarkan dengan beras. Kebijakan yang dicetuskan oleh walikota Bitung ini disebut Ranstra. Kebijakan penukaran sampah dengan beras ini tentu dilakukan sebagai upaya mengurangi sampah plastik di daerah tersebut. Kebijakan serupa juga diterapkan di beberapa daerah seperti kecamatan Sukawati kabupaten Gianyar, Bali yang bisa dilakukan selama masa pandemic, dengan program The Plastik Exchange yang menukarkan sampah plastik dengan beras. Selanjutnya sampah-sampah ini akan diberikan kepada donator penggiat sampah yang kemudian didaur ulang menjadi barang yang berguna nantinya. Begitu juga di Bandung yang bisa menukar sampah dengan sembako. Kebijakan seperti ini tentunya sangat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan sekaligus juga memberikan keuntungan terhadap masyarakat tersebut. Karena pada dasarnya jika hanya menunggu sampah terurai dengan sendirinya, maka akan memerlukan waktu yang sangat lama. Sehingga perlu semangat dan kerjasama yang baik dari segala komponen untuk bersama-sama melakukan perubahan.

Dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut, salah satu kebijakan yang hadir adalah TPS3R. Pemerintah beserta jajarannya memang masih terus berupaya untuk memberikan

sosialisasi mengenai TPS3R tersebut khususnya di kabupaten Gianyar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada beberapa desa sebagai percobaan dari sistemnya. Kemudian, dari beberapa desa tersebut sudah mulai terlihat hasilnya, dan yang paling lengkap terdapat di desa Taro kecamatan Tegalalang. Upaya ini adalah awal dimana mulai terlihat harapan yang baik untuk sistem yang masih terbilang baru ini. Dengan desa Taro sebagai desa yang mampu memberikan inspirasi serta mendorong desa lainnya untuk mengikuti jejaknya dalam menangani sampah. Berdasarkan keterangan dari Bupati Gianyar, yang menyatakan bahwa program PS3R ini telah bersinergi dengan program Puspa AMAN atau Pusat Pangan Alami Mandiri Asri dan Nyaman. Program ini memang sejalan dengan misi Bupati Gianyar tersebut. Puspa Aman merupakan salah satu dari program unggulan daerah kabupaten Gianyar. Program Puspa AMAN ini adalah suatu program yang berupaya untuk mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang dianggap tidak produktif. Pemanfaatan lahan yang sebelumnya dianggap tidak produktif akan dikembangkan untuk penghasilan pangan dalam perbaikan gizi masyarakat, sekaligus berguna dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di desa yang bersangkutan.

Pada dasarnya, TPS3R merupakan sistem pengelolaan dan teknologi dalam pengolahan sampah yang dimaksudkan mampu menjadi solusi dalam menangani permasalahan sampah, serta dampaknya. Pada mulanya kebijakan TPS3R lebih difokuskan kepada daerah pariwisata, mengingat juga Gianyar merupakan salah satu daerah wisata yang banyak diminati. Sehingga, dari TPS3R tidak hanya menangani permasalahan sampah saja melainkan juga memberikan produk yang bernilai. Salah satunya adalah pupuk organik. Pupuk organik inilah yang nantinya akan mampu memberikan kelancaran dalam program Puspa Aman tersebut. Sistem kerja TPS3R adalah dengan teknologi mesin pencacah sampah. Tidak hanya itu, dalam cara kerja TPS3R ni selain mesin pencacah juga terdapat pengayak

kompos yang lebih efektif dan efisien. Dari produk yang dihasilkannya seperti kompos tentu sudah memberikan dampak yang cukup baik pada masyarakat. Bahkan kompos yang dihasilkan mampu digunakan untuk tanaman hias di sekitar, atau bahkan dijual. Disamping tu, guna meningkatkan kualitas kompos yang dihasilkan diterapkan Kembali dalam teknologi Kascing atau kompos cacing. Hal ini merupakan hasil dari pengolahan tanki biodigester yang berupa gas digunakan dalam supply energi pada warga setempat. Teknologi dalam TPS3R ini salah satunya merupakan mesin pencacah sampah dengan modifikasinya. Modifikasi ini terdapat dalam pisau pencacah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam proses mencacah sampah organik yang bentuknya Panjang serta tidak akan mudah macet. Disamping tu, mesin pengayak kompos juga berupa modifikasi. Pengayak kompos ini berupa ulir yang berfungsi untuk mempermudah alur pengayakan sampah tanpa harus didorong secara manual. Sehingga mengurangi cepat terjadinya kerusakan pada mesin.

Pada dasarnya tujuan dari program TPS3R ini adalah untuk memudahkan pengolahan sampah. Namun, disamping tu juga dalam bidang edukasi kepada masyarakat. Edukasi yang dimaksudkan disini adalah bagaimana masyarakat mampu meningkatkan kesadarannya akan dampak sampah serta dengan upaya pemilahan sampah. Sehingga jika sudah mampu memilah dengan benar maka masyarakat dapat melakukan pengomposannya sendiri. Disamping tu juga, pupuk organik yang murah dan berkualitas juga akan mudah didapatkan. Dari sinilah kemudian suatu perekonomian akan berangsur membaik yang dimulai dari lingkup terkecil. Tujuan lain dari TPS3R ini tiada lain adalah untuk membentuk legalitas suatu struktur organisasi yang lebih mandiri. TPS3R sebenarnya berupaya dalam mengurangi beban sampah yang dibuang dan menumpuk di TPA. Menurut Kasih (2017) keberadaan TPS3R pada skala kecamatan adalah berperan dalam upaya memanfaatkan sampah organik

menjadi kompos. Selain itu juga menjual sampah anorganik sehingga memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini harus dilaksanakan secara sistematis, yang dalam keberlangsungannya secara berkelanjutan akan mampu memberikan keuntungan. Maka jelas dengan adanya TPS3R ini sangatlah mampu memberikan dampak yang menguntungkan bagi masyarakat.

Sampah pada umumnya yang dipikirkan masyarakat kebanyakan adalah mengarah pada plastik. Sampah organik bersifat biodegradable sehingga mudah terdekomposisi seperti daun, kayu, kertas karton, tulang, dan sebagainya. Sampah anorganik dikatakan bersifat *non-biodegradable* sehingga menyebabkannya sulit terdekomposisi, seperti plastik, besi, gelas, dan sebagainya. Sedangkan sampah B3 ini dimaksudkan pada sampah dengan bahan beracun. Seperti misalnya baterai, sisa obat, lampu TL, dan sebagainya. Pengolahan sampah dalam TPS3R ini dilakukan dengan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini nantinya akan diolah secara biologi. Sedangkan sampah anorganik akan diolah dengan cara daur ulang sehingga mampu memiliki nilai ekonomi. Serta sisa dari residu akan dikembalikan ke TPA.

Dengan berbagai jenis sampah yang hadir dalam masyarakat ini maka diperlukan penanganan yang tepat. Salah satu upayanya yaitu TPS3R. Cara kerjanya meliputi Reduce, Reuse, dan Recycle. Pada tahapan Reduce, yaitu merupakan sebuah upaya dalam bidang mengurangi timbunan sampah. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengurangi intensitas penggunaan bahan tersebut. Hal ini tentu akan berdampak cukup panjang sehingga biaya dan usaha untuk menanganinya juga berkurang. Reuse, merupakan sebuah upaya yang berusaha untuk menggunakan Kembali sampah tersebut tanpa adanya perubahan bentuk. Namun dalam hal ini tentunya barang yang bersangkutan bukanlah barang sekali pakai. Sedangkan Recycle, merupakan suatu upaya guna menghasilkan barang yang lebih berguna yang

dihasilkan dari sampah. Seperti misalnya sampah yang dijadikan sebagai aspal, bahkan sebagai seni lukisan.

Diakui bahwa TPS3R ini dapat terlaksana apabila memenuhi syarat dan ketentuannya. Seperti luas yang diperlukan adalah lebih dari 200m<sup>2</sup>. Disamping itu juga diperlukan kontainer yang mampu untuk menampung sampah yang sifatnya tidak permanen, sehingga nantinya dapat diganti ataupun dipindahkan ke tempat lain. Jarak juga mempengaruhi, dimana jarak antara daerah pelayanan tidak melebihi 1 km. TPS3R ini juga harus memiliki ruang pemilahan, dan pengomposan untuk sampah organik, Gudang, serta zona penyangga yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Serta, hal yang paling penting dalam keberhasilan TPS3R ini adalah keterlibatan dari masyarakatnya.

TPS3R yang telah diterapkan oleh desa Taro kecamatan Tegalalang Gianyar, merupakan penerapan yang sudah cukup sempurna berdasarkan pelaksanaan dan kelengkapannya di Gianyar. Hal ini terbukti dari program TPS3R yang bekerjasama dengan Puspa Aman yang telah mampu mendorong masyarakatnya menghasilkan pupuk mandiri. Selain itu, melalui program Hatinya PKK yang dipimpin langsung oleh bu Bupati Gianyar tersebut, juga turut bergerak dalam upaya keberhasilan TPS3R ini. Program Puspa Aman yang bernafaskan Hatinya PKK, yang mana Halaman Teratur Indah dan Nyaman atau Hatinya PKK ini bergerak dalam pemanfaatan halaman rumah masyarakat, yang dapat ditanami tanaman yang tentunya bermanfaat setidaknya untuk keluarga tersebut. Sehingga diharapkan mampu menekan biaya pengeluaran rumah tangga keluarga. Dengan tujuan kelancaran tercapainya tujuan ini, maka PKK Gianyarpun bergerak untuk menyalurkan bantuan tanaman kepada setiap anggota PKK di setiap desa, yang nantinya diharapkan mampu memberikan dorongan untuk terlaksananya program ini. Terlaksananya TPS3R ini di desa Taro dimulai pada awal tahun 2020. Kepala Desa Taro mengatakan bahwa MPH

Yayasan Merah Putih Hijau yang pada awalnya memberikan edukasi kepadanya. Selain itu, beliau mengeluarkan Perdes di tahun 2020 yang kemudian diturunkan menjadi awig-awig desa adat dan desa dinas. Tujuannya adalah untuk mempertegas agar masyarakatnya tidak sembarangan dalam membuang sampah, terutama sampah rumah tangga sendiri. Selain itu, untuk memperlancar dan menguatkan awig-awig tersebut, kepala Desa Taro membentuk tim kader kebersihan yang berjumlah 3 orang di masing-masing banjar (dusun)nya. Tim ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu komunitas yang terjun dalam pengelolaan sampah tersebut. Dari sinilah kemudian kesadaran dari masyarakat perlahan-lahan mulai tumbuh serta mendukung keberlangsungan program ini. Menurutnya, hasil dari pupuk kompos yang dihasilkan dari TPSR tersebut digunakan dalam kegiatan padat karya masyarakat desa Taro dan kebun Puspa AMAN desa Taro. Kepala Desa Taro juga menyatakan bahwa kompos yang dihasilkan dari TPS3R telah mampu menunjukkan hasil yang bagus pada tanaman, sehingga lebih asri dan alami.

## Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, tentunya dapat dikatakan bahwa TPS3R ini adalah solusi yang sangat membantu di masyarakat. Selain itu keberadaannya serta cara penyelenggaraannya yang cukup mudah diterima oleh masyarakat. Mengingat bahwa keuntungan yang diberikan kepada masyarakat juga cukup membantu dalam segi perekonomian. Pemanfaatan sampah yang pada awalnya hanya menjadi limbah dan merusak lingkungan kini lebih memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kesadaran dan aspirasi masyarakat adalah hal utama yang diperlukan agar upaya TPS3R ini mampu berjalan dengan baik. Gianyar telah mampu membuktikan bahwa sistem TPS3R ini sangat membantu khususnya di Desa Taro, Tegalalang. Dilihat dari pendapat Kepala Desa serta dari penghargaan yang telah berhasil diraih, memang

cukup terbukti bahwa TPS3R berjalan dengan baik di desa Taro tersebut. Tidak hanya pemerintah atau perangkat daerah yang memperoleh dampak keberhasilan ini, namun juga seluruh masyarakat yang sudah teredukasi tentang pentingnya pengolahan sampah yang tepat.

Dengan demikian, dari keberhasilan desa Taro ini seharusnya mampu menjadi pendorong bagi pemerintah dan juga desa-desa lainnya. Dimana pemerintah haruslah lebih menekankan program ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas, begitu juga dari Kepala Desa setempat yang harus lebih aktif guna mendorong masyarakatnya. Dengan demikian, tidak hanya desa Taro saja yang mampu untuk mengolah sampahnya tetapi juga dengan desa-desa lainnya. Sehingga program ini akan memberikan dampak secara luas dan menyeluruh. Dampak positif yang diterima nantinya juga akan dinikmati secara merata baik dari masyarakatnya, bahkan dengan lingkungannya.

#### Daftar Pustaka

- Antara. (2020). Inspiratif, Warga Gianyar Bali Bisa Tukar Sampah dengan Beras selama Pandemi. *bali.inews.id*, 1. Diakses pada 30 April 2021
- I Nyoman Norken, K. D. (2019). Analisis Risiko Pembangunan Dan Pengelolaan Tps3r (Reduce, Reuse, Recycle). *Jurnal Spektran*, Vol. 7, No. 2, Juli 2019, 1.
- Irianto, F. S. (2011). Meningkatkan Komoditas Unggulan Ekspor Ukm Dalamrangka Pengembangan Ekonomi Daerah (Studi Pada Ukm Di Jawa Tengah). Semarang. *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 11 No. 1, Pebruari 2011
- Purwahita, N. K. (2018). Fenomena Sampah Dan Pariwisataabali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management Vol. 9 No. 1*

Ramadhiani, A. (2018). Upaya Pemerintah Tanggulangi Banjir Jakarta dan Kendala yang Dihadapi. *kompas.com*, 1. Diakses pada 1 Mei 2021

## BAB 9

### Peran Dinas Pariwisata Lombok Tengah Dalam Pengembangan Objek Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Melalui Media Sosial

Anastasya Nur Azzura

#### Latar Belakang

Kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata. KEK ini dapat membantu mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi tinggi yang dapat menjadi pengembangan suatu Kawasan dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Di Indonesia sendiri telah tersebar 15 KEK di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu terdapat di Pulau Lombok Kabupaten Lombok Tengah yang dinamakan KEK Mandalika. Lombok Tengah sendiri mempunyai letak yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan Kawasan ekonomi khusus ini.

Kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika ini merupakan sebuah kawasan yang memiliki destinasi atau panorama wisata bahari dan wisata budaya yang berorientasi dalam kelestarian nilai-nilai budaya dalam pengembangan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat. Lombok Tengah sendiri umumnya telah memiliki banyak tempat pariwisata dan lokasinya yang sangatlah strategis. Oleh sebab itu, dengan adanya

KEK Mandalika ini diharapkan bisa mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor pariwisata.

KEK Mandalika adalah KEK yang paling menarik bagi para investor saat ini dan diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia. KEK Mandalika sendiri menyajikan banyak sekali sektor pariwastanya salah satunya adalah sirkuit MotoGP. Dengan adanya pembangunan sirkuit ini diharapkan menjadi pariwisata internasional yang bisa mendatangkan wisatawan asing untuk datang dan berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah berharap dapat terselenggaranya pariwisata KEK Mandalika ini di kancan internasional .

Dalam penyelenggaraan suatu pengembangan Kawasan ekonomi khusus ini Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah harus mendukung suatu pengembangan KEK Mandalika agar progress yang dihasilkan sesuai dengan rencana dan bisa mensejahterakan masyarakat dan usaha mikro yang ada di Kawasan tersebut. Dalam pengembangan KEK ini perlu dilakukannya pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada agar dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berusaha keras mempromosikan KEK Mandalika ini pada masyarakat luas dengan cara melalui media sosial, karena dengan media sosial masyarakat lokal maupun asing bisa tertarik untuk datang berkunjung ke pariwisata KEK Mandalika ini. Pemerintah dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sendiri sedang bekerja keras untuk menstabilkan perekonomian di bidang pariwisata dan bertanggung jawab dalam pengembangan objek wisata yang ada di KEK Mandalika itu sendiri (Wulandari dkk, 2018) .

## Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa persoalan mengenai pengembangan pariwisata KEK Mandalika yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana yang telah diuraikan, maka masalah dalam essay ini adalah Bagaimana kebijakan dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dalam pengembangan objek wisata KEK Mandalika melalui media sosial agar pariwisata yang ada di KEK Mandalika ini bisa tembus sampai di kancah Internasional. Dalam pengembangan objek wisata itu sendiri mungkin saja pemerintah dinas pariwisata Lombok Tengah belum bisa mempromosikan daerah tersebut melalui media sosial.

## Tujuan Essay

Dari uraian diatas, essay ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan peran dinas pariwisata Lombok Tengah dalam pengembangan objek wisata KEK Mandalika melalui media sosial.

## Pembahasan

Pariwisata saat ini merupakan suatu industry pengembangan yang aktif di promosikan dalam penggerak ekonomi. Pengembangan pariwisata ini memiliki berbagai macam variasi dalam mengembangkan suatu sector industry pariwisata yakni dengan pengembangan Kawasan ekonomi khusus (KEK). Kawasan ekonomi khusus yang sedang masa pengembangannya adalah di daerah Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah sendiri sudah memiliki beberapa tempat destinasi pariwisata dan sudah dikenal oleh masyarakat lokal maupun asing. Dengan terpilihnya KEK Mandalika ini sangat berdampak kepada kepariwisataan yang ada di Nusa Tenggara Barat dan menjadi trend positif bagi pariwisata yang ada di

Lombok Tengah. Menurut Dinas Pariwisata Lombok Tengah dengan adanya KEK Mandalika ini jumlah wisatawan yang ada sangat meningkat yang membuat perekonomian di kawasan tersebut stabil dan memberi semangat bagi pemerintah dalam terus mengembangkan pariwisata KEK Mandalika dan menjadi *stakeholder* untuk memajukan pariwisata daerah. KEK Mandalika ini memberikan destinasi wisata bahari dan wisata budaya dengan panorama yang eksotis, apalagi dengan dibangunnya sebuah sirkuit MotoGP yang bertaraf internasional ini terletak di Mandalika yang mampu menarik perhatian wisatawan asing untuk datang. Oleh sebab itu dari dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah membuat suatu media dalam mempromosikan KEK Mandalika ini yaitu *E Tourism Go Mandalika*. Media yang dibuat khusus oleh Dinas Pariwisata Lombok Tengah ini berisi tentang berbagai informasi dan wadah promosi UMKM. Dengan adanya media ini diharapkan mampu untuk mendukung penetapan Kawasan itu sebagai destinasi prioritas juga dapat menunjang pelaksanaan MotoGP dan menjadi salah satu penunjang dalam pengembangan pariwisata kita di era sekarang ini. Konsep yang digunakan dalam media *E Tourism Go Mandalika* ini adalah majalah online, Majalah ini dapat dia akses siapa pun secara gratis dan menerima kontribusi konten dari masyarakat (Sugandi 2021; Irfan, P& Apriani 2017).

Media Sosial adalah media daring yang digunakan untuk berinteraksi jarak jauh yang berguna untuk sarana komunikasi dan mendapatkan sebuah informasi dari aplikasi khusus jaringan internet. Di era digital ini, promosi pariwisata melalui sosial dianggap sangatlah efektif dan cara yang paling mudah dalam mempromosikan pariwisata mengingat kemudahan akses dapat dilakukan dimana saja ,kapan saja dan siapa saja . Bali merupakan pulau tujuan destinasi pariwisata yang sudah dikenal oleh dunia yang memiliki daya tarik wisata yang menarik dengan berbagai

fasilitas penunjang yang bertaraf internasional. Sama dengan KEK Mandalika, Pulau Bali juga menggunakan promosi melalui media sosial yakni melalui *website* dinas pariwisata dan kebudayaan Bali. Dengan pengguna media sosial yang sebesar itu tentu menjadi hal yang menjanjikan dalam mempromosikan pariwisata. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan karena masyarakat juga dapat membantu mempromosikan dan menyebarluaskan destinasi pariwisata daerah tersebut melalui akun media sosialnya masing – masing (Sugandi 2021; Irfan, P& Apriani 2017).

Pemerintah provinsi NTB melalui dinas pariwisata Lombok Tengah memberikan KEK Mandalika sebagai destinasi pariwisata prioritas yang diharapkan bisa mendatangkan wisatawan sebanding dengan wisatawan yang datang ke Pulau Bali. Dengan adanya sosial media dan web yang telah dibuat pemerintah mampu mempromosikan wisata KEK Mandalika di kancah internasional apalagi di daerah Mandalika akan dibangun pembangunan Kawasan sirkuit untuk MotoGP dan World Superbike (WSBK) dan diprediksikan akan datang 2 juta wisatawan untuk berkunjung. Berbagai potensi pariwisata ini pemerintah setempat harus terus dikembangkan dan dipelihara agar akomodasi penunjang tersebut bisa bertaraf internasional (Sugandi 2021; Irfan, P& Apriani 2017).

Potensi wisata budaya dan kuliner yang ada di Lombok Tengah juga turut mengundang wisatawan untuk datang ke Pulau Lombok. Apalagi Lombok Tengah memiliki tempat desa wisata yang menyajikan budaya budaya lokal yang masih sangat erat adatnya hingga saat ini. Dispar Kabupaten Lombok Tengah setiap tahunnya juga mengadakan acara festival yaitu Festival Bau Nyale dimana festival ini merupakan sebuah festival yang mengemas salah satu budaya warga Sasak di Lombok yang diselenggarakan di daerah KEK Mandalika. Banyak upaya yang

dilakukan dinas pariwisata Lombok Tengah dalam mengembangkan pariwisata yang ada dan dapat meningkatkan jumlah wisatawan untuk berkunjung.

Pengembangan kepariwisataan KEK Mandalika ini mendapatkan prioritas utama dalam upaya mewujudkan visi dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah “Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Tinggi”. Perkembangan pariwisata KEK Mandalika ini diharapkan mampu menjadi tempat tujuan wisata yang mampu bersaing dan bertaraf internasional. Dalam strateginya pemerintah kabupaten setempat juga bekerja sama dengan branding ‘wonderful Indonesia’ yaitu media online, media cetak serta media ruang. Melalui wonderful Indonesia ini KEK Mandalika bisa dikenal oleh seluruh masyarakat lokal maupun internasional dikarenakan media ini bisa sampai ke pasar domestic maupun internasional.

Promosi pariwisata melalui media sosial bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena bisa menciptakan peluang bisnis, seperti melalui facebook, twitter, instagram, whatsApp, dan media sosial lainnya. Meskipun penggunaan media sosial harus terhubung dengan jaringan internet, namun penggunaan media sosial dirasakan manfaatnya karena lebih mudah, hemat dan lebih efektif dalam pemasaran pariwisata bagi suatu daerah. Hal itulah yang membuat media sosial semakin diminati dalam pemasaran pariwisata bagi suatu daerah. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional.

Strategi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan KEK Mandalika harus didukung oleh penataan destinasi dan inventarisasi daya Tarik wisatawan sebaik mungkin guna meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di daerah tersebut. Dalam rangka pengembangan kebijakan tersebut pariwisata KEK

Mandalika harus diarahkan pada peningkatan kualitas perumusan dari rencana program tersebut. Oleh karenanya pembangunan KEK Mandalika diharapkan akan menjadi tempat tujuan bertaraf internasional yang membantu datangnya wisatawan untuk berkunjung dan dapat meningkatkan perekonomian UMKM setempat. Hal ini harus didukung oleh pengembangan destinasi pariwisata yang ada di daerah Mandalika dan melakukan pengembangan pada daya Tarik wisatawan yang ada. Dengan dibangunnya sirkuit MotoGP dan akan diselenggarakannya World Superbike (WSBK) tentunya akan memberikan nilai tambah dan daya saing pariwisata yang semakin kuat di Kabupaten Lombok Tengah baik nasional maupun internasional. Pengembangan Kawasan KEK Mandalika yang luas sangat didukung oleh adanya Bandara Internasional Lombok yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah dan hanya berjarak 30 menit dari bandara menuju KEK Mandalika juga sangat berpengaruh dalam mengembangkan suatu objek wisata

Dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah harus mengembangkan dan memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana guna dan cara kerja dari *E Tourism Go Mandalika* karena masyarakat juga mempunyai partisipasi yang tinggi dalam pengembangan KEK Mandalika di media sosial. Pemerintah juga harus meningkatkan jumlah website yang ada serta melakukan pembaruan informasi konten yang ada di aplikasi tersebut. Selain itu, strategi yang dapat dilakukan dalam mendukung industri pariwisata adalah dengan meningkatkan infrastruktur, seperti sarana transportasi. Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pariwisata KEK Mandalika, pemerintah melakukan upaya promosi bukan hanya melalui media sosial tetapi dengan mengikuti pameran internasional yang bisa memperkenalkan potensi pariwisata yang ada, terlepas dari itu

semua masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan dan promosi KEK Mandalika (Romadhan dan Rusmana, 2017).

Dalam upaya kegiatan promosi pariwisata KEK Mandalika yang dilakukan dinas pariwisata Lombok Tengah harus senantiasa mengacu kepada pembangunan pengembangan kawasan pariwisata yang kemudian dijadikan referensi strategi dalam pengembangan pembangunan KEK Mandalika dan promosi objek wisata sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan . Jika objek wisata KEK Mandalika ini berhasil dan mampu memberikan efek yang sangat positif bagi kesejahteraan warga Lombok Tengah. Apalagi dengan adanya jelang MotoGP 2021 ini pemerintah dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sedang dalam pelaksanaan pengembangan daerah tempat wisata sekitar sirkuit Mandalika yang akan menjadi tempat utama wisatawan untuk berkunjung.

Dengan adanya situs web yang dibuat oleh pemerintah Lombok Tengah sebagai salah satu upaya untuk mendorong digitalisasi sector pariwisata dan berharap perekonomian masyarakat menjadi stabil dan UMKM yang ada semakin berkembang. Ini adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan dan mempersiapkan KEK Mandalika sebagai destinasi pariwisata prioritas. Program *E Tourism Go Mandalika* sesuai dengan kebijakan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif yang menekankan pada kemampuan adaptasi terhadap pengguna teknologi (Marta, 2019).

## Kesimpulan

Dinas pariwisata Lombok Tengah dalam mendukung pengembangan KEK Mandalika sebagai destinasi prioritas di era globalisasi ini dengan melakukan strategi promosi melalui media sosial dan media cetak. Strategi ini dianggap sangat

menguntungkan dan cepat memberi efek di dalam sebuah pariwisata terutama dalam minat wisatawan untuk datang berkunjung di KEK Mandalika yang bisa dikatakan sudah bertaraf internasional. Dalam hal ini pemerintah Lombok Tengah harus bisa bekerjasama dengan berbagai pihak agar bisa membantu dalam mengembangkan objek wisata KEK Mandalika ini. Hal demikian agar sector pembangunan pariwisata ini bisa berkesinambungan dengan baik. Dengan adanya berbagai upaya dan kebijakan yang berkesinambungan antara dinas pariwisata Lombok Tengah dengan dinas pariwisata provinsi NTB daya Tarik wisatawan meningkat dan Kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika ini dapat populer di kalangan masyarakat. Peningkatan pariwisata KEK Mandalika ini tidak luput dari peran masyarakat yang membantu pemerintah dalam mengembangkan daerah tersebut , karena masyarakatlah merupakan objek dan subjek dalam mempromosikan objek wisata yang ada di KEK Mandalika .Potensi alam dan potensi sosial budaya merupakan potensi yang sangat berpengaruh sebagai factor pendukung pengembangan pariwisata KEK Mandalika sebagai destinasi prioritas .

Dalam pengembangan objek wisata KEK Mandalika pemerintah harus memiliki dan mempunyai perencanaan dalam program KEK Mandalika guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat. Pemerintah juga diharapkan berkontribusi dalam perencanaan strategi pengembangan KEK Mandalika sebagai destinasi prioritas berkelanjutan kedepannya akan menjadi lebih baik dan dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat setempat serta peningkatan kuliatas lingkungan.

## Daftar Pustaka

- Irfan, P., & Apriani. (2017). Analisa Strategi Pengembangan E-Tourism Sebagai. *Jurnal Ilmiah Volume 9 Nomor 3 Desember 2017*, 1.
- Marta, R. (2019). Peran Media Sosial Dalam Mempromosikan Pariwisata Sumatera Barat. *Jurnal Ranah Komunikasi (Jrk) Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019*, 3.
- Romadhan, M. I., & Rusmana, D. S. (2017). Potensi Media Sosial Sebagai Sarana Media Promosi Pariwisata Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2-4.
- Sugandi. (2021, Maret 14). Retrieved From Bupati Lombok Tengah Resmikan E-Tourism Go Mandalika Ntb: <https://www.realitarakyat.com/2021/03/bupati-lombok-tengah-resmikan-e-tourism-go-mandalika-ntb/>
- Wulandari, S. H., Chotijah, S., & Suadnya, I. W. (2018). Strategi Komunikasi Pemasaran Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika. *Journal Of Media And Communication Science*.

## BAB 10

### Strategi Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandung

Asri Aulia

#### Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang mulai muncul pada tahun 2019 membuat banyak perubahan pada berbagai sektor. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemic Covid-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Perekonomian di Indonesia mengalami perubahan yang drastis dan banyak sektor industri yang berhenti beroperasi diakibatkan pandemi ini. Sangat dirasakan dampaknya bagi masyarakat dengan hadirnya Covid-19, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada para pegawainya. Berdasarkan survei CNBC Indonesia sebanyak 35% pekerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 19% pekerja diberikan keputusan untuk dirumahkan sementara (Hadiwardoyo, 2020; Muslim, 2020).

Terkhusus di Kota Bandung, Jawa Barat, Pandemi Covid-19 membuat banyaknya perusahaan industri terganggu dan mengalami kebangkrutan. Berdasarkan data Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), saat ini pertumbuhan ekonomi di Bandung

hanya berada di angka minus 2 persen. Hal ini menunjukkan perkonomian di Kota Bandung yang tidak berkembang dan mengalami penurunan. Banyak masyarakat yang di PHK dikarenakan perusahaan mengurangi jumlah pegawai sebagai Langkah

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat adanya implikasi pada kinerja industri di Bandung, Jawa Barat akibat Covid-19 ini. Terdapat penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) nasional dan terkhusus Jawa Barat tahun 2020 di triwulan pertama. LPE Jawa Barat turun menjadi 2,73 persen yang sebelumnya berada di angka 5,07 persen pada akhir 2019. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan dalam pergerakan yang menyebabkan aktivitas industri ekonomi ikut turut menurun. Hal itu menyebabkan adanya kenaikan pada angka pengangguran dan kemiskinan.

Dari beberapa uraian diatas dibutuhkan strategi dalam mengembalikan laju perkonomian agar tidak semakin menurun. Masyarakat yang menggangu diakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) perlu diberikan pembinaan oleh Lembaga Pemerintah Daerah Jawa Barat mengenai usaha industri sehingga mempunyai keterampilan bekerja dan memulai usaha baru. Diperlukan upaya dalam mengubah sistem dari mekanisme konvensional ke mekanisme digital memerlukan strategi tertentu, terutama berkaitan dengan penguasaan teknologi informasi dan pemanfaatan media sosial. Melalui pemanfaatan media sosial Instagram dan Youtube adalah salah satu yang paling banyak digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut mengenal persoalan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, Bagaimana solusi strategi yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi persoalan pembinaan terhadap masyarakat dalam

upaya pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, essay ini bertujuan untuk menggambarkan strategi meningkatkan produktivitas UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung pada masa Pandemi Covid-19 dan mengembangkan perekonomian di Kota Bandung dengan cara mengubah pola pikir masyarakat dalam menghasilkan pendapatan melalui internet atau sistem online untuk mengurangi dampak Covid-19 yang semakin meluas. Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat menengahkan ke bawah atau memberikan bantuan sosial, insentif pajak, restrukturisasi, dan relaksasi kredit, serta perluasan modal bagi UMKM.

## Pembahasan

Perekonomian dan social dunia pada saat ini sedang terganggu oleh adanya pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia. Banyak sektor yang tak berjalan bahkan lumpuh hingga menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi nasional. Beberapa perusahaan menerapkan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) untuk pegawainya sebagai langkah menghindari kerugian yang besar (Prasetya, A., 2020). Terkhusus di daerah Kota Bandung, beberapa perusahaan mengalami kerugian dan mengakibatkan penurunan dalam perekonomian Kota Bandung. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Bandung diharapkan dapat memberikan strategi pada upaya peningkatan produktivitas UMKM sebagai upaya pemulihan perekonomian Kota Bandung.

Dalam kasus yang sama, kita dapat bercermin pada daerah lain dalam mempelajari strategi permasalahan yang ada, sebagai contoh yaitu langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dijadikan sebagai momentum pijakan dalam mengembalikan

perekonomian Jawa Tengah. Mengembangkan UMKM merupakan komitmen dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo, sebagai upaya membangkitkan perekonomian setelah sekian lama melemah akibat Pandemi Covid-19. *Marketing*, pemanfaatan teknologi, *budgeting*, dan akses produk merupakan kunci keberhasilan pendampingan UMKM pada saat ini. Pemerintah hadir dengan mempersiapkan Sumber Daya Masyarakat (SDM) sehingga mereka mempunyai keterampilan dalam menciptakan suatu produk.

Pemerintah mendorong dan menstimulus ekonomi di masyarakat dengan menggerakkan usaha menjahit dan tata busana untuk membantu memproduksi masker kain. Masker dari produksi hasil UMKM tersebut kemudian dipasarkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Total sebanyak Rp 10 miliar digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pembelian 3 juta masker hasil produksi UMKM. Selain membantu masyarakat dalam melindungi diri dari wabah pandemi Covid-19, program ini menstimulus serta mendorong perekonomian di masyarakat agar menjadi normal kembali dan tetap bisa berjalan. Langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut sebagai upaya menyelamatkan usaha UMKM yang terhenti akibat wabah Covid-19 (Joharudin, dkk, 2020).

Di Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat 4,6 juta unit usaha yang 98% merupakan usaha mikro dan kecil. Pandemi Covid-19 membuat banyak perubahan dalam sektor ekonomi, seperti pembatasan mobilitas secara besar-besaran yang sangat berdampak pada jalannya produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut menyebabkan penurunan drastis pendapatan pelaku UMKM hingga 80 persen. Tidak hanya disebabkan oleh mobilitas, tetapi penurunan pendapatan UMKM pun disebabkan oleh adanya penurunan daya beli masyarakat.

Adanya hambatan rantai produksi dan distribusi barang dikarenakan pelaku UMKM sulit mengakses modal yang merupakan efek domino dari kenaikan dan kelangkaan harga bahan baku.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berusaha mendorong dan merevitalisasi kegiatan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah terdampak pandemi Covid-19. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam membantu UMKM. Diantaranya yaitu *pertama*, menyediakan bahan baku yang mulai sulit didapati dan bahkan hamper langka. *Kedua*, memberikan kemudahan dalam permodalan. *Ketiga*, memberikan kelancaran kegiatan produksi serta distribusi yang terhambat oleh pandemi Covid-19. *Keempat*, menaikkan daya beli masyarakat dengan suatu stimulasi. Dan *kelima*, memberi bantuan untuk menaikkan omset penjualan.

Pengaruh Pandemi Covid-19 ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun dan diharapkan tidak mengalami penurunan yang signifikan hingga dibawah batas minimum. Pemerintah secara bertahap membangun kegiatan ekonomi hingga 70 persen dengan tujuan agar kegiatan UMKM dapat terdorong secara maksimal melalui kegiatan usaha yang lebih baik. Pembukaan ekonomi di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) juga bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat agar tetap stabil. Pemerintah menghimbau agar para pelaku UMKM dapat menyesuaikan diri dengan era disrupsi, terkhusus disrupsi bidang teknologi digital, dengan menggunakan sistem digital dalam ekosistem usahanya. Pemasaran UMKM dapat diperkuat dengan pemanfaatan Ekosistem Digital (Dwijayanti, A., & Pramesti, P. 2021).

Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai upaya pemulihan ekonomi koperasi dan UMKM

di Jawa Barat. BLUD disiapkan Pemerintah untuk memfalisitasi pembiayaan pemasaran koperasi dan UMKM selain pendanaan dan perbankan konvensional. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga membuat program padat karya yang diikuti 50 ribu warga terlibat dalam proyek-proyek padat karya untuk memulihkan penghasilan yang terdampak Covid-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pergeseran perilaku konsumen yang muncul akibat keterbatasan mobilitas imbas dari kekhawatiran terhadap ancaman Kesehatan. Seharusnya itu dijadikan peluang bagi para pelaku UMKM (Rosmadi, 2021).

Sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi penurunan perekonomian, digagasnya program ICALAN (Inovasi Cara Penjualan) yang merupakan inovasi untuk membangkitkan UMKM oleh Pemerintah Daerah. Program ICALAN yang dirancang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) bersama Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi (KREASI) itu menghadirkan loka pasar (*marketplace*) bernama *borondong.id*. Melalui platform tersebut, para pelaku UMKM dan pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf) dapat memasarkan produk-produknya. Terdapat keuntungan tersendiri bagi UMKM yang bermitra dengan *borondong.id*, salah satunya produk yang dipasarkan menjadi terdigitalisasi. Namun, terdapat landasan dalam proses penyaringan para pelaku UMKM untuk menjadi mitra *borondong.id* (Komalasari, dkk., 2021).

Aparatur Sipil Negara (ASN) pun turut dilibatkan dalam program ini. ASN dipilih menjadi sasaran prioritas karena pendapatannya yang stabil selama pandemi Covid-19. Pemerintah juga membuat kampanye mengenai membeli barang UMKM adalah sebagai upaya bela negara. Dibuat juga berbagai promosi sehingga para konsumen tertarik membeli barang UMKM yang disediakan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kualitas UMKM.

Program ICALAN, Borondong.id berperan untuk mempercepat transformasi digital UMKM dengan menyajikan produk-produk yang sulit terjual dengan cepat (*slow moving*). Program ini mempunyai target penjualan produk UMKM sebanyak lima puluh ribu produk dalam waktu tiga bulan. Program ini diharapkan dapat membantu UMKM dan Ekraf dalam melakukan inovasi dengan menghadirkan produk-produk yang sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat. Kedepannya, Borondong.id juga dapat diakses oleh masyarakat umum setelah menyasar pasar ASN. Inovasi terus dikembangkan dan mendorong para pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan usaha mereka sebagai upaya peningkatan laju perekonomian melalui peningkatan produktivitas UMKM.

### Kesimpulan

Pandemi Covid-19 membuat mayoritas perusahaan di Indonesia tidak beroperasi dan bahkan bangkrut serta menyebabkan meningkatnya jumlah pegawai yang di PHK. Akibatnya, perekonomian tidak berjalan lancar dan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah diharapkan untuk dapat merevitalisasi perekonomian dengan berbagai program yang dikeluarkan. Program Pemerintahan yang sedang dijalankan yaitu Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai upaya pemulihan ekonomi koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Para Aparatur Sipil Negara (ASN)) pun turut dilibatkan dalam program tersebut.

Banyaknya orang yang di-PHK atas bangkrutnya beberapa perusahaan diharapkan mampu untuk berusaha mengembangkan dirinya dengan membuat usaha atau mengikuti Lembaga Kerja Pemerintah serta menyesuaikan diri dengan era distrust. Program yang di keluarkan oleh Pemerintah juga diharapkan mampu untuk mewujudkan stabilisasi perekonomian

yang sempat terganggu. Terkhusus program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu program padat karya yang melibatkan 50 ribu warga dalam proyek-proyek untuk memulihkan penghasilan yang terdampak Covid-19. Pemerintah juga membuat kampanye untuk membeli barang UMKM adalah sebagai upaya bela negara. Diperlukan partisipasi dari semua pihak tidak hanya dari Pemerintah, tetapi juga ASN, masyarakat, dan pihak ketiga.

#### Daftar Pustaka

- Dwijayanti, A., & Pramesti, P. (2021). Pemanfaatan Strategi Pemasaran Digital Menggunakan E-Commerce Dalam Mempertahankan Bisnis UMKM Pempek4Beradek Di Masa Pandemi Covid-19. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(2), 68-73.
- Komalasari, R., Harto, B., & Setiawan, R. (2021). UMKM Go-Digital Sebagai Adaptasi Dan Inovasi Pemasaran Arkha Minoritas Pada Pandemi COVID-19. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 4(1), 1-7.
- Rosmadi, M. L. N. (2021). Inovasi Dan Kreativitas Pelaku Usaha UMKM Di Era Covid-19. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, 4(2), 87-94.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal Of Business And Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Muslim, M. (2020). PHK Pada Masa Pandemi Covid-19. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 357-370.
- Joharudin, A., Septiadi, M. A., Maharani, S., Aisi, T. D., & Nurwahyuningsih, N. (2020). Panic Syndrom Covid-19: Penekanan Terhadap Kebijakan Yang Diberikan. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 44-53.

Prasetya, A. (2020). Pengalaman Pekerja Informal Ditengah Pandemi Covid-19 Di Kota Bandung. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan*, 2(2).

## BAB 11

### Pengaruh Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendongkrak Perekonomian Aceh

Firta Suci Muharrami

#### Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan suatu daerah di Indonesia yang memiliki aturan tersendiri dalam mengurus ataupun mengatur urusan pemerintahan daerahnya yang kita dengan *qanun*. *Qanun* merupakan sebuah peraturan atau kebijakan yang disepakati oleh suatu daerah dalam bentuk undang-undang sejenis peraturan daerah untuk mengurus urusan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat daerah tersebut dan hal tersebut berkaitan dengan dasar Syariah Islam (Rongiyati, S., 2015 ). Keistimewaan yang didapat provinsi Aceh ini terdasar di dalam UU Nomor 11 Tahun 2006. UU ini tercantum bahwa Provinsi Aceh mendapat kewenangan untuk membentuk peraturan daerahnya sendiri. Atas dasar inilah pemerintah Aceh membentuk suatu aturan daerah yang disebut dengan *Qanun* tersebut. Saat ini Pemerintah Aceh mengeluarkan *Qanun* atau aturan baru tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diterapkan di seluruh wilayah Aceh.

*Qanun* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu suatu aturan berbentuk perundang-undangan untuk mengatur segala kegiatan lembaga keuangan wilayah Aceh yang bertujuan dalam menciptakan Ekonomi masyarakat Aceh yang lebih maju dan adil yang berpatokan dengan Syariat Islam. Pemerintahan Aceh sudah mewajibkan penggunaan prinsip Syariah dalam segala transaksi keuangan. Dampak dari kebijakan ini, wilayah Aceh saat ini sudah tidak terdapat lagi transaksi dengan berbagai bank konvensional. Contohnya saat ini BRI, Bank Mandiri, BNI serta bank lainnya mulai memberhentikan segala bentuk transaksinya di Wilayah Aceh (Kismawadi & Al-Mutsdatstsir 2018). Kebijakan atau aturan ini sudah mulai diterapkan pada tanggal 4 Januari 2019 lalu.

Dalam penerapan *Qanun* ini tentunya menuai berbagai pertentangan atau pro dan kontra. Pengambilan keputusan untuk kebijakan yang terdapat di dalam *Qanun* ini juga didasari atas aspirasi dari masyarakat Aceh sendiri. Berbagai upaya dilakukan seperti melibatkan berbagai lembaga pendukung yang terkait, baik lembaga perbankan mau lembaga nonformal lainnya. Karena setelah ditelusuri banyak masyarakat yang mengeluhkan perpindahan bank konvensional ke Syariah yang justru saat ini lebih mempersulit masyarakat Aceh sendiri. Hal ini justru bertolak belakang dengan prinsip awal dari *Qanun* LKS ini yaitu Ekonomi Aceh yang lebih adil dan maju ke depannya. Namun akhirnya kebijakan ini pun saat ini berhasil diterapkan di wilayah Aceh.

Melalui aturan ini pemerintah Aceh memiliki harapan yang besar untuk ekonomi Aceh ke depannya, yaitu untuk menciptakan perekonomian Aceh yang lebih berkembang, lebih Adil dan sejahtera. Menciptakan kesejahteraan di seluruh warga Aceh melalui qanun ini tentunya tidak mudah, proses penerapannya pun memakan waktu yang lama dan biaya yang

cukup besar. Tetapi juga berdasarkan semangat pelaksanaan syariat Islam untuk Aceh yang lebih sejahtera, *qanun* ini pun harus diupayakan dengan semaksimal mungkin. Namun pertanyaannya adalah apakah dengan menyingkirkan bank konvensional di wilayah Aceh melalui *Qanun* LKS ini, bank syariah itu sendiri dinilai sudah betul-betul efektif sehingga tujuan utama dalam penerapan ini untuk lebih menyejahterakan dan memberi keadilan dalam peningkatan ekonomi di Aceh akan berdampak atau berpengaruh di Aceh. Maka hal tersebut lah yang harus diperhatikan oleh pemerintah Aceh sendiri.

#### Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas esai ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana upaya atau kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan *Qanun* LKS ini yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Aceh. Lalu apakah penerapan kebijakan ini dinilai efektif dan berdampak baik bagi provinsi Aceh.

#### Tujuan

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, esai ini bertujuan untuk menggambarkan upaya atau kebijakan pemerintah dalam menerapkan *Qanun* tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh ini serta menguraikan pengaruh dan dampak yang didapat wilayah Aceh dalam penerapan *Qanun* ini.

#### Pembahasan

Penerapan *Qanun* tentang Lembaga Keuangan Syariah ini dianggap efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Hal tersebut dikarenakan dalam proses penerapannya pembangunan ekonomi ini lebih menekankan prinsip Syariah, seperti tidak diperbolehkannya pelaku ekonomi dalam mengedepankan keuntungan pribadi apabila merugikan suatu pihak atau merusak alam. Pemerintah Aceh menilai hal tersebut

dapat mendasari dalam kesejahteraan ekonomi yang lebih merata ke seluruh masyarakat tanpa menguntungkan kepentingan pribadi. Kebijakan ini pun masih terhitung baru diterapkan di wilayah Aceh ini berkisar 2 tahun. Tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah Aceh perlu melakukan upaya yang ekstra agar efek yang didapat provinsi Aceh cepat dirasakan.

Pemerintah Sumatra Barat melakukan kebijakan serupa dalam suatu kegiatan/interaksi keuangan di daerahnya. Bank Nagari contohnya, salah satu bank di Sumatra Barat yang memiliki sistem konvensional yang saat ini melakukan konversi ke Bank Umum Syariah (Rahmawati, & Putriana, K., 2020). Pemerintah daerah sumbar menilai kebijakan ini merupakan langkah yang cukup tepat karena sesuai dengan ideologi yang dijunjung masyarakat sumbar berhubungan dengan syariat Islam. Penerapan kebijakan ini lebih merujuk pada kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Bank Nagari ini melakukan penyesuaian dalam sistem teknologi, contohnya seperti kegiatan *infaq* melalui *barcode* di *gadget* masing-masing. Untuk mendukung hal tersebut sumber daya manusia maupun teknologi informasi haruslah disiapkan yang maksimal dalam penerapan sistem bank Syariah ini.

Konversi bank konvensional ke bank Syariah juga diterapkan di provinsi Nusa Tenggara Timur sejak September 2018 lalu. Berbeda dengan provinsi Aceh yang menerapkan kebijakan serupa dengan berdasarkan prinsip syariat Islam di daerahnya. NTB sendiri menerapkan kebijakan berdasarkan atas inisiatif pemerintah. Perubahan ini berpengaruh dalam penerimaan produk dan jasa ke konsumen dengan sistem Syariah. Karena dalam hal ini sistem Syariah dianggap lebih transparan dalam melakukan transaksi keuangan dan memberi kenyamanan masyarakat.

Menurut Utamy & Basri (2020), berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam membangun perekonomian di Aceh. Terkhususnya dalam menyejahterakan dan memberi keadilan ekonomi pada masyarakatnya, penggunaan *Qanun* LKS ini merupakan salah satu contoh upaya untuk menciptakan hal tersebut. Dalam penerapannya, keterkaitan bank konvensional pun terkena dampaknya. Bank BCA contohnya, mereka terpaksa harus menutup pengoperasiannya di seluruh wilayah Aceh. Berbeda dengan BRI, bank ini lebih memilih konversi menjadi BRI Syariah.

Pemerintah Aceh menerapkan dengan tegas aturan atau kebijakan ini untuk seluruh masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh akan memberikan sanksi tegas bagi seluruh lapisan masyarakat yang masih menggunakan transaksi non syariah. Berbagai proses sosialisasi masih terus dilakukan ke seluruh penjuru wilayah Aceh. Seperti seluruh masyarakat harus segera mengganti sistem transaksi keuangan menggunakan Syariah. Masyarakat diberikan waktu untuk konversi tersebut sampai 4 Januari 2019 lalu, bagi masyarakat yang melewati batas waktu maka terpaksa mengurus pada jasa keuangan di luar Aceh.

Prinsip keadilan yang dilabelkan dalam *Qanun* ini menjadi *point* utama dalam mendukung proses implementasinya. Apalagi ketika harus memberi pengertian kepada masyarakat, karena hal ini justru berat diterima oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Keadilan dalam berbagai perniagaan diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh masyarakat. Lalu dalam penerapannya juga mengedepankan prinsip syariat Islam bukan kepentingan suatu pihak maupun golongan. Akhirnya aturan ini pun seakan lebih mudah penerapannya karena sesuai dengan ideologi yang dipegang masyarakat Aceh itu sendiri.

Namun jika ditinjau kembali terdapat banyak pihak yang justru mendapat kesulitan mengenai *qanun* ini. Para karyawan

bank khususnya, mereka dilibatkan dengan 2 pilihan antara tetap di bank tersebut namun dengan peralihan bank Syariah atau harus memilih pindah pada cabang di luar provinsi Aceh. Lalu juga termasuk permasalahan dalam proses perpindahan simpanan & pinjaman, karena kita tahu bahwa jika di dalam bank Syariah proses pinjaman tidak dilibatkan lagi sistem bunga. Belum lagi biaya yang dikerahkan untuk proses penerapan kebijakan ini sangat besar. Bukan waktu yang sedikit pula untuk terlaksananya kebijakan ini diseluruh wilayah, namun pemerintah juga punya usaha yang lebih besar lagi pula dalam penerapannya.

Lalu bagaimana efek yang didapat masyarakat aceh setelah 2 tahun penerapan LKS tersebut? Sebelum dikeluarkannya kebijakan ini, pada tahun 2016 lalu Aceh sudah lebih dahulu melakukan konversi Bank yaitu BPD menjadi bank Aceh yang berbasis Syariah. Pemerintah aceh meninjau bahwa terdapat keberhasilan yang cukup pesat dalam pentotalan asset nya. Pada tahun 2019, bank ini mendapat total aset sebesar 26 Triliun dan dalam waktu 3 tahun aset melonjak mencapai 7 Triliun yang berbeda dengan tahun 2016 hanya sekitar 18 Triliun. Kemudian bank Aceh menyalurkan sebesar 13 Triliun dalam pertumbuhan pembiayaan.

Merujuk pada keberhasilan yang dicapai oleh bank Aceh tersebut, maka pemerintah daerah Aceh memiliki harapan yang besar atas penerapan kebijakan *Qanun* ini. Sehingga dapat memberikan dampak pesat pula ke depannya untuk pertumbuhan ekonomi Aceh dan masyarakat Aceh dapat merasakan kesejahteraan nya. Memang saat ini belum terlihat efek yang signifikan atas berjalannya *Qanun* ini, karena kebijakan ini masih terbilang baru yaitu 2 tahun. Namun pengupayaan tersebut akan terus berlanjut semaksimal mungkin pemerataannya.

Pembentukan kebijakan ini bukanlah hanya untuk kepentingan individu maupun satu kelompok. Kebijakan ini

tentunya untuk kepentingan rakyat Aceh itu sendiri, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan perbankan merupakan potensi utama dalam pengaruh kemajuan ekonomi. Maka dari itu dukungan penuh dari berbagai bidang diperlukan dalam penerapan kebijakan ini. Dukungan itu khususnya dalam bidang pengawasan, yaitu pengawasan bank yang dilakukan pemerintah di setiap proses nya. Lalu dapat dibuktikan apakah kebijakan ini benar-benar efektif diterapkan dalam membangun ekonomi Aceh tersebut.

### Kesimpulan

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu Langkah Pemerintah Aceh dalam membangun perekonomian daerahnya. Pembentukan Kebijakan ini didasari atas kepentingan masyarakat khususnya dalam upaya memberikan kesejahteraan serta keadilan ekonomi untuk masyarakat Aceh itu sendiri. Kebijakan ini dianggap efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh, karena dalam kegiatan keuangan perbankan Syariah memiliki prinsip Syariah yaitu pelaku ekonomi tidak boleh mengedepankan keuntungan pribadi atau golongan tertentu (Amin, 2018). Dalam penerapannya pun pemerintah Aceh turut melibatkan berhentinya pengoperasian kegiatan keuangan oleh Bank Konvensional dan menggantinya dengan penerapan Bank Syariah di seluruh Aceh. Hal ini juga merupakan risiko yang dialami ekonomi masyarakat Aceh, terkait dengan banyaknya transaksi keuangan dengan Bank Konvensional. Namun pemerintah Aceh tetap mengupayakan dalam memaksimal kebijakan ini karena berpatokan atas pencapaian Bank Aceh pada tahun 2016 dengan menggunakan prinsip Syariah yang memperoleh aset yang cukup pesat. Maka pemerintah Aceh

mengharapkan hal tersebut dapat dicapai pula dalam penerapan kebijakan ini.

### Saran

Untuk itu agar terwujudnya perkembangan ekonomi di Aceh yang lebih maju, adil dan sejahtera ini dibutuhkan pula dukungan dari berbagai elemen. Yang terpenting adalah dari masyarakat Aceh itu sendiri, karena masyarakat merupakan target utama dalam pencapaian *Qanun* LKS ini. Apabila masyarakat sendiri tidak mendukung penuh bagaimana proses pelaksanaannya akan berjalan lancar. Kemudian dari lembaga-lembaga yang terkait atau jasa keuangan yang terkena efek dari kebijakan ini. Lembaga pengawasan contohnya, proses pengawasan dalam penerapan *Qanun* ini penting adanya untuk mendukung proses transparansi dan keberhasilan targetnya. Terdapat pula bank konvensional yang terpaksa harus melakukan konversi, untuk mendukung dengan cara mematuhi sistem dari kebijakan baru ini meski berbagai risiko yang didapat demi kepentingan bersama.

### Daftar Pustaka

- Amin, Z. M. (2018). Perbankan Syariah Dalam Bingkai Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Tahun 2006. *Al-Ijtima'iyah*, 65.
- Kismawati, E. R., & Al-Mutsdatstsir, U. D. (2018). Persepsi Masyarakat Tentang Akan Di Konversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah Di Aceh. *Ihtiyath*, 144.
- Rahmawati, & Putriana, K. (2020). Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. *Sharia Economic Law*, 233.

- Rongiyati, S. (2015 ). Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah. *Negara Hukum*, 67 .
- Utamy, I., & Basri, A. H. (2020). Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mabsut*, 129.

## BAB 12

### Upaya Pembangunan Industri Pengolahan Dalam Memaksimalkan Hasil Pertanian Masyarakat Di Kabupaten Bolaang Mongondow

#### Hasril Manggo

##### Latar belakang

Lokasi wilayah Bolaang Mongondow yang merupakan suatu kabupaten yang masih belum tersentuh oleh para investor dalam melakukan investasi sektor pertanian. Pemerintah Bolaang Mongondow juga belum memperhatikan peluang besar yang bisa dimanfaatkan dari para investor ini. tapi harapan masyarakat sangat besar untuk pemerintah bisa mendatangkan investor di daerah Bolaang Mongondow agar potensi di wilayah Bolaang Mongondow dapat di maksimalkan. Pemerintah diharapkan bisa berperan aktif dalam usaha memaksimalkan hasil pertanian yang begitu melimpah. kebijakan pemerintah saat ini masih berfokus pada sektor pariwisata. namun, masyarakat berharap agar sektor pertanian juga dapat diperhatikan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi pada bidang pertanian bisa dimaksimalkan

Kebijakan pemerintah juga memberikan harapan bagi masyarakat Bolaang Mongondow. Kebijakan pemerintah yang

membangun infrastruktur di daerah pertanian ini sangat bermanfaat.dengan kebijakan ini membuat para investor mudah dalam mengeksplor wilayah pertanian di daerah Bolaang Mongondow .dengan pembangunan infrastruktur yang baik ini tentu menekan minat para investor untuk berinvestasi di bidang pertanian.inilah yang mendukung dan menjadi harapan masyarakat.diharapka kebijakan yang diambil pemerintah bisa mendatangkan para investor untuk membangun tempat pengolahan indutri pertanian di daerah Bolaang Mongondow .

Dari kebijakan yang diambil pemerintah tentu sangat diharapkan bisa membuat para investor untuk berinvestasi di daerah Bolaang Mongondow. Dalam memaksimalkan hasil pertanian tentu peran investor sangat penting.dengan adanya indutri pengolahan hasil pertanian masyarakat tentu membuat pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih meningkat,kemudian dengan adanya industri pengolahan maka akan meningkatkan harga jual dari hasil pertanian masyarakat.alasan inilah mengapa investor berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Selain untuk membuat daerah Bolaang Mongondow menjadi sumber pengasil mutu pertanian yang maju,dengan adanya investor juga akan membuka investasi-investasi baru yang berpeluang meningkatkan perekonomian masyarakat.wilayah Bolaang Mongondow juga yang memiliki banyak destinasi wisata juga berpeluang besar untuk mendatangkan para investor.jadi menurut saya untuk meningkatkan mutu hasil pertanian dan juga mengeksplorasi berbagai sumber daya yang ada ini tentu memerlukan keterlibatan semua pihak,terutama peran pemerintah serta investor yang berinvestasi di daerah Bolaang Mongondow .

## Rumusan Masalah

Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah tidak adanya investor yang berinvestasi di daerah Bolaang Mongondow khususnya pada Bidang pertanian yang membuat hasil pertanian dari wilayah Bolaang Mongondow tidak dapat di maksimalkan karena tidak adanya industri pengolahan yang berada di Daerah Bolaang Mongondow.

## Tujuan essay

Essay ini saya tulis untuk menggambarkan masalah yang dihadapi masyarakat di daerah Bolaang Mongondow dalam memaksimalkan hasil pertanian.

## Pembahasan

Dalam upaya pembangunan ekonomi di daerah Bolaang Mongondow maka sektor pertanian adalah salah satu sektor yang sangat menjanjikan. di daerah Bolaang Mongondow komoditas pertanian seperti sayur-sayuran memiliki hasil yang sangat baik, inilah kemudian yang menjadi dorongan masyarakat untuk memaksimalkan hasil pertanian yang ada. lewat sektor pertanian ini tentu akan membawa pertumbuhan ekonomi di daerah Bolaang Mongondow akan meningkat. Hal ini tentunya tergantung kepada penekanan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta upaya pemerintah dalam menjalin kemitraan dengan sektor swasta.

Di kabupaten Majene di Sulawesi barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mulai serius dalam bidang industri pengolahan hasil pertanian. di kabupaten Majene lahan pertanian mencakup kurang lebih 14% dari luas wilayah itu sendiri. Komoditas di daerah ini antara lain adalah kemiri, kelapa, dan kakao. Kakao menjadi salah satu hasil pertanian utama di Kabupaten Majene yang terbagi di beberapa kecamatan yaitu kecamatan ulumanda, kecamatan malunda dan kecamatan

tammeroddo sendana (Rheza & Karlinda, n.d.). Dari hasil pertanian yang begitu melimpah serta wilayah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun, jumlah argoindustri pengolahan hasil pertanian masih sangat minim. Oleh karena itu pemerintah kabupaten majene mulai serius dalam membangun serta memaksimalkan hasil pertanian daerah tersebut. Salah satunya dengan pengolahan industri pertanian dalam upaya memaksimalkan hasil pertanian di daerah Majene (Bashirah et al., 2018).

Kabupaten Jombang juga merupakan salah satu daerah yang memiliki industri pengolahan hasil pertanian yang cukup maju.ada sekitar 18 industri kecil serta 3 industri besar yang mengolah hasil pertanian di kabupaten ini. Dalam (Agroindustri & Jombang, 2016) Kabupaten jombang memiliki komoditas unggulan yaitu jagung dan cengkeh yang tersebar hampir diseluruh wilayah kabupaten Jombang. Hasil yang begitu melimpah tentu di manfaatkan pemerintah untuk peningkatan ekonomi serta untuk menjadi nilai tambah dalam sektor pertanian. Pemerintah juga membuat suatu mekanisme pemberdayaan pelaku usaha yang bertujuan untuk memfasilitasi tumbuhnya industri pengolahan kecil (Yanti et al., 2020). Sektor pertanian di kabupaten Jombang memiliki potensi yang cukup tinggi dalam pembangunan perekonomian. Peluang inilah yang di manfaatkan pemerintah untuk memajukan sektor industri pengolahan hasil pertanian di kabupaten Jombang.

Sektor pertanian merupakan sektor yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.dari hasil pertanian perekonomian suatu daerah bisa meningkat. Dari sektor pertanian juga pemerintah dapat mengeksplor potensi-potensi yang ada di suatu daerah. Inilah mengapa pengolahan hasil pertanian sangat penting. Berbagai industri pengolahan harusnya dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan nilai mutu hasil pertanian.

Sektor ini juga dapat berperan penting untuk mendorong dalam pembangunan ekonomi suatu daerah.

Industri pengolahan pertanian merupakan suatu industri yang bahan baku pengolahannya berasal dari hasil para petani. Dari hasil pertanian kemudian diolah untuk menghasilkan suatu produk. Dimana produk yang dihasilkan ini dapat meningkatkan nilai jual dari hasil pertanian masyarakat. Industri dalam suatu pengolahan ini tentu membuat suatu kemajuan yang signifikan di kalangan masyarakat. Dengan adanya industri pengolahan yang maju tentu meningkatkan nilai jual serta akan membuat hasil dari pertanian yang diolah akan lebih bervariasi karena dari hasil pertanian yang ada bisa diolah menjadi bahan baku pembuatan suatu produk baru.

Dalam era globalisasi seperti pada saat ini, peran sektor pertanian sangat penting dalam menghadapi tantangan di era globalisasi pada saat ini. Era globalisasi merupakan era yang dapat berubah-ubah suatu waktu dan bersifat dinamis. Era globalisasi merupakan tatanan yang melibatkan 3 sektor penting yaitu politik, budaya, dan ekonomi. Dalam sektor ekonomi pemerintah harus bisa memanfaatkan segala sektor yang dimiliki suatu daerah. Industri pertanian dinilai mampu menjawab persoalan tersebut. Ini merupakan suatu langkah yang bisa meningkatkan keunggulan-keunggulan sektor pertanian yang ada. Dan diharapkan dari kebijakan ini suatu daerah mampu menghadapi tantangan di era globalisasi.

Dalam era globalisasi strategi pertanian sangat dibutuhkan mengingat daerah Bolaang Mongondow di dominasi oleh lahan pertanian yang cukup luas, serta rata-rata penduduk pedesaan di daerah Bolaang Mongondow berprofesi sebagai petani. Ini tentu menjadi peluang besar pemerintah untuk menggerakkan sektor pertanian di daerah Bolaang Mongondow. Lewat industri pengolahan yang maju dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi. Dengan industri pengolahan kita bisa memantau seberapa besar peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi dan bisa kita lihat perbandingannya dari tahun ke tahun.

Selain dari dampak era globalisasi, salah satu tujuan untuk mengembangkan industri pengolahan pertanian yaitu untuk menciptakan produk baru yang dimana produk yang dihasilkan bahan bakunya bersasal dari hasil sektor pertanian. salah satu contoh yang bisa saya ambil yaitu produk-produk kecantikan yang dimana menggunakan bahan baku dari hasil pertanian. selain produk kecantikan, ada beberapa contoh lain dalam pemanfaatan hasil pertanian dalam menciptakan suatu produk contohnya rokok yang menggunakan tembakau sebagai bahan baku dalam pembuatannya. dan sebagaimana yang kita tau bahwa rokok adalah salah satu produk yang menyumbang pajak terbesar di Indonesia karena jumlah produksi serta permintaan yang cukup tinggi.

Produk-produk yang diciptakan inilah yang mampu membuka suatu peluang baru, peluang yang dimaksud yaitu peluang ekspor. peluang ekspor akan lebih besar dengan adanya industri pengolahan yang maju. karena dengan adanya industri pengolahan yang maju tentu bisa menciptakan produk baru, dan produk yang dihasilkan bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi. ada banyak potensi hasil pertanian yang bisa di ekspor, mengingat Indonesia memiliki berbagai produk unggulan untuk di ekspor keluar negeri beberapa contoh produk andalan Indonesia adalah kopi, kakao, dan sawit. dengan adanya industri pengolahan hasil pertanian yang baik tentu akan bisa meningkatkan nilai mutu serta nilai ekspor suatu produk.

Setelah suatu produk menggunakan bahan pertanian sebagai bahan baku, ini tentu mendorong dari nilai jual hasil pertanian itu sendiri. Saat ini sangat banyak komoditas pertanian

yang menjadi bahan baku pembuatan suatu produk.inilah mengapa pemerintah harus mengembangkan industri-industri pengolahan dengan cara mengait para investor-investor untuk datang di suatu daerah yang memiliki potensi hasil pertanian yang baik,contohnya di daerah saya di kabupaten Bolaang Mongondow .dengan datangnya investor dan mereka mau berinvestasi khususnya di sektor pertanian di daerah Bolaang Mongondow, ini tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

### Kesimpulan

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah salah satu daerah yang memiliki potensi yang begitu besar.dengan potensi yang begitu besar maka pengelolaan sumber daya yang maksimal sangat dibutuhkan,oleh karena itu,maka pembangunan industri pengolahan pertanian sangat penting.dengan adanya investor yang berinvestasi di daerah Bolaang Mongondow tentu harapan ini akan bisa terwujud jadi peran investor sangat penting dalam pengelolaan hasil pertanian dari masyarakat.ketika pengolaan hasil pertanian bisa dimaksimalkan ini tentu akan membawa pembangunan ekonomi di daerah Bolaang Mongondow akan meningkat.

### Saran

Diharapkan kepada pemerintah daerah agar bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para petani,pemerintah juga harus bisa memanfaatkan serta memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah, peran pemerintah sangat penting dalam hal pembangunan suatu daerah,dalam bidang pertanian pemerintah harus bisa melihat potensi-potensi yang bisa meningkatkan ekonomi daerah,dalam bidang pertanian khususnya di daerah Bolaang Mongondow pemerintah harus bisa membuat kebijakan

agar para investor bisa berinvestasi di daerah Bolaang Mongondow. Karena dengan adanya investor yang berinvestasi di suatu daerah yang memiliki potensi yang besar maka hal tersebut bisa memaksimalkan hasil dari sumber daya yang ada di suatu daerah dan bisa meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.

#### Daftar pustaka

- Agroindustri, A. P., & Jombang, D. I. K. (2016). *Direction For Developing Agroindustry Based On Potentials Agricultural Commodities In Jombang District*.
- Bashirah, A., Teknik, J., Wilayah, P., Kota, D. A. N., Sains, F., Teknologi, D. A. N., Islam, U., & Alauddin, N. (2018). *Studi pengembangan agroindustri dalam pembangunan wilayah kabupaten majene* (.).
- Yanti, R. D., Yuliana, A. I., Ngoro, K., Masyarakat, P., Bakalan, D., Katerban, D., Bodo, D., Santren, D., & Kwangen, D. (2020). *Efektivitas Program Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) Di Desa Pulorejo Kecamatan Ngoro*. 3(1), 154–162.

## BAB 13

### Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Asahan

#### Millen Tawar Tua Naibaho

##### Latar Belakang

Dalam meningkatkan perkembangan perekonomian di suatu daerah, itu dapat kita lihat dari bagaimana kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh setiap daerah masing-masing. Yang menjadi patokan ataupun tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ataupun daerah yaitu dengan cara mengembangkan dan mempergunakan sumberdaya yang ada sebaik mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di negara kita ini yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang terjadinya pembangunan di setiap wilayah ataupun daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pelayanan publik dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang menjadi tujuan dalam pembangunan disetiap wilayah ataupun daerah. Setiap pembangunan yang dilakukan diseluruh wilayah ataupun daerah di negara kita yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia itu semua menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat

Indonesia tanpa terkecuali, baik itu masyarakat yang bermukim di Kalimantan ataupun di Papua dan daerah lainnya harus turut serta bertanggung jawab dalam pembangunan yang dilakukan di daerah Sumatera, begitu juga untuk sebaliknya. Disini dapat kita pahami dalam melakukan pembangunan suatu wilayah ataupun daerah agar berjalan dengan baik, sebaiknya dimana daerah yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang sudah baik untuk menyalurkan bantuan dalam pembangunan daerah yang perekonomiannya masih tertinggal.

Dalam melakukan pembangunan, suatu wilayah ataupun daerah tidak bisa melakukan pengembangan terhadap semua sektor perekonomian secara bersamaan. Hal ini dikarenakan harus memfokuskan pada pengembangan sektor unggulan terlebih dahulu yang berpotensi mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan yang sangat pesat yang kemudian bisa menarik sektor perekonomian lainnya untuk berkembang bersama sektor yang menjadi unggulan tersebut. Maksud dan tujuannya yakni agar pengembangan disemua sektor ataupun yang menjadi potensi dalam pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi dengan baik. Dengan demikian daerah dapat menstabilkan pertumbuhan tidak dari satu sektor ataupun satu potensi saja, melainkan dari berbagai sektor lainnya yang mempunyai potensi juga.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu Kabupaten dari 33 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu Kabupaten yang daerahnya cukup luas ini memiliki sumberdaya yang melimpah yang dapat dijadikan potensi untuk pengembangan pertumbuhan perekonomian di wilayah ataupun daerah Kabupaten Asahan. Daerah yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang luas ini menjadikan sektor pertanian dan perkebunannya menjadi sektor unggulan utama dalam pengembangan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Asahan. Di Kabupaten Asahan, yang menjadi Kawasan pusat

perekonomian serta pemerintahan yaitu daerah kecamatan Kisaran Barat dan kecamatan Kota Kisaran Timur. Ini disebabkan karena pusat kota Kabupaten Asahan berada di kota Kisaran.

Yang menjadi kawasan pertanian Kabupaten Asahan yaitu berpusat di kecamatan Rawang yang menjadi penghasil padi terbesar di Provinsi Sumatera Utara dan disusul dengan penghasil jagung terbesar juga yaitu kecamatan bandar pasir mandoge. Sedangkan untuk daerah perikanan berpusat di Silau laut yang dan kecamatan air joman. Kemudian untuk perusahaan perindustrian berpusat di kecamatan Kisaran barat tepatnya di Bunut yang merupakan daerah terkenal dengan usaha sepatu khas bunut. Namun, yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Asahan yaitu sektor pertanian yang mempunyai potensi yang besar dikarenakan lahan pertaniannya yang luas. Yang menjadi penghambat dalam pengembangan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Asahan yaitu kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah setempat dan masyarakatnya yang belum paham apa aja sektor yang dapat menjadi potensi untuk dimanfaatkan dalam pembangunan perekonomian.

#### Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam essay ini yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan dan mengembangkan apa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Asahan sehingga dapat menjadi potensi yang besar dalam pembangunan pertumbuhan perekonomian di wilayah ataupun daerah Kabupaten Asahan.

#### Tujuan Essay

Dari uraian diatas, essay ini bertujuan untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi unggulan dan pemanfaatan dari sumberdaya yang dapat dijadikan potensi dalam pembangunan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Asahan.

#### Pembahasan

Pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggerakkan masyarakatnya secara terus-menerus untuk dapat mengelola sumber daya yang ada didaerahnya masing-masing dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi guna membuka lapangan pekerjaan dalam rangka mengembangkan ataupun meningkatkan perekonomian daerah. Setiap pembangunan yang dilakukan diseluruh wilayah ataupun daerah di negara kita yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia itu semua menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik itu masyarakat yang tinggal ataupun yang menetap di pulau Kalimantan ataupun di pulau Papua dan di daerah lainnya harus turut serta bertanggung jawab dalam pembangunan yang dilakukan di daerah pulau Sumatera, begitu juga untuk sebaliknya. Disini dapat kita pahami, bahwa dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah ataupun daerah sebaiknya dimana daerah yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang dapat dikatakan sudah cukup baik untuk menyalurkan bantuan dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah ataupun daerah yang perekonomiannya masih belum baik ataupun daerah tertinggal. Dalam pelaksanaan pembangunan wilayah ataupun daerah, yang menjadi tujuan utamanya adalah mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk wilayah ataupun daerah tersebut.

Kabupaten Asahan merupakan suatu wilayah ataupun daerah yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Asahan dulunya terdiri dari Batubara, Pemko Tanjung Balai, dan Asahan, namun mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. Kabupaten yang memiliki kekayaan akan sumber daya alamnya ini, bersampingan dengan wilayah ataupun daerah Kotamadya yaitu kota Tanjung

Balai yang merupakan pintu masuk dan keluarnya barang dari luar negeri (Malaysia). Jika dilihat dari potensi sumber daya yang dimiliki, pemerintah Kota Tanjung Balai mengandalkan potensi kekayaan dari daerah perairannya yaitu hasil lautnya yang menjadi potensi unggulan dari wilayah ataupun daerah tersebut. Selain itu, Tanjung Balai juga mempunyai potensi yang baik lagi, yaitu kuliner dari daerah tersebut yang sangat terkenal yaitu seafoodnya dan lebih tepatnya “Kerang Rebus” yang menjadikan pemerintah Kota Tanjung Balai membuatnya sebagai kuliner khas dari kota tersebut.

Namun, untuk sektor pertaniannya Kota Tanjung Balai tidak sebaik sektor pertanian di Kabupaten Asahan dikarenakan lahan pertaniannya yang tidak luas (daerah pinggir laut). Lain halnya dengan yang ada pada Kota Tanjung Balai, di Kabupaten Asahan kita lebih menemukan beragam ataupun bermacam potensi yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi daerah. Meskipun sama-sama daerah pesisir, tetapi beruntungnya Kabupaten Asahan memiliki lahan pertanian yang cukup luas dibandingkan dengan Kota Tanjung Balai. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Asahan mengambil kebijakan berupa langkah untuk memantapkan lagi sektor pertaniannya guna menjadi lebih baik lagi, ini terbukti dari sektor pertanian yang menjadi potensi unggulan dari Kabupaten Asahan. Selain itu pemerintah Kabupaten Asahan juga terus berbenah ataupun memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dari semua sektor yang ada di Kabupaten Asahan untuk menjadi potensi dalam pemberdayaan sumber daya guna menunjang pembangunan daerah di Kabupaten tersebut.

Kabupaten Asahan letak pusat kotanya berada tepat di Kota Kisaran. Kota Kisaran menjadi pusat kota di Kabupaten Asahan, ini dikarenakan pusat perekonomian dan pemerintahan Kabupaten Asahan berada tepat di Kota Kisaran. Seperti telah

disampaikan diatas, Kabupaten Asahan mempunyai potensi unggulan di sektor pertanian yaitu yang berpusat di Kecamatan Rawang. Mayoritas masyarakat Kabupaten Asahan di kecamatan ini berprofesi sebagai petani padi yang pada tahun 2010 menjadikan Kabupaten Asahan menjadi penghasil padi terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan keberhasilan Pemerintah dan masyarakatnya yang mampu menggunakan sumber daya yang ada dengan baik sehingga menjadi potensi dalam laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten tersebut.

Keberhasilan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan tidak hanya sampai di hasil pertanian padi saja, melainkan di berbagai pertanian lainnya. Ini dapat dilihat dari Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang berhasil juga menjadikan Kabupaten Asahan sebagai penghasil jagung terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Belum berhenti disitu, sektor pertanian Kabupaten Asahan juga mendapat hasil yang baik dari hasil pertanian ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Ini memberikan penjelasan, bahwa Kabupaten Asahan menjadi daerah swasembada di Provinsi Sumatera Utara. Dengan keberhasilan yang diperoleh, pemerintah Kabupaten Asahan mengambil kebijakan untuk semakin mantap dalam menetapkan sektor pertaniannya guna menjadi potensi unggulan di Kabupaten Asahan.

Dalam kesuksesannya di sektor pertanian, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan tidak lupa untuk mengembangkan sumber daya yang ada pada sektor lainnya yang ada di Kabupaten Asahan. Ini terlihat dari sektor perikanan yang berpusat di Silau Laut dan Kecamatan Air Jorman yang berjalan dengan baik. Begitu juga dalam sektor peternakan yang berupa peternakan kambing, lembu ataupun sapi potong, dan babi yang ada di Kabupaten Asahan yang berjalan dengan baik juga. Kabupaten Asahan juga mempunyai sektor perindustriaan yang berpusat di Kecamatan Kisaran Barat tepatnya di Bunut yang terkenal dengan

usaha sepatunya yaitu sepatu khas dari Bunut. Namun dalam semuanya ini, sektor pertaniannya yang menjadi ataupun dikenal sebagai potensi unggulan dari Kabupaten Asahan.

Dalam pelaksanaannya memberdayakan sumber daya yang ada di Kabupaten Asahan, pemerintah setempat pasti mengalami masalah ataupun kendala dalam pembangunan daerah. Yang menjadi penghambat dalam pengembangan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Asahan yaitu kurangnya perhatian yang serius dari pemerintah setempat. Tidak hanya pemerintahnya saja, tetapi masyarakatnya juga belum paham betul mengenai apa saja sektor yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asahan. Pemerintah setempat juga harus mengikutsertakan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan daerah, karena hanya masyarakat setempatla yang mengetahui bagaimana keadaan didaerah tersebut. Karena kerap kali terjadi, dimana pemerintah tidak memiliki kepercayaan dari masyarakatnya yang kemudian dapat merusak kinerja pemerintah setempat dalam pembangunan daerahnya.

Masalah sering terjadi dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Asahan yaitu pemerintah seharusnya merangkul masyarakat dalam mengambil kebijakan dalam menetapkan dan mengambil keputusan. Ini dapat dilihat dari kurangnya dana untuk membantu kelancaran di setiap sektor, khususnya sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Asahan yang dapat menyebabkan terbengkalainya sektor yang seharusnya dapat dijadikan potensi dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Asahan. Dengan demikian, pemerintah harus dapat menentukan anggaran yang sesuai dengan yang diperlukan dalam pembangunan daerah tersebut agar setiap sektor dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Melalui ini, hasil yang didapat dari setiap sektor terkhususnya sektor

pertanian pasti akan lebih bertambah lagi. Sehingga masyarakat pun semangat dalam melaksanakan profesinya yang dapat memberikan potensi yang baik dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Asahan.

Pemerintah sebagai orang ataupun organisasi yang memiliki pengetahuan yang lebih daripada masyarakat dalam mengatur dan mengorganisir sistem di daerah harus dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Dengan ini, masyarakat akan mengikuti apa yang dilakukan pemerintah terhadap sistem di daerah tersebut. Baik buruknya cara pemerintah setempat mengatur dan mengelola sistem di daerah tersebut akan berdampak pada masyarakatnya. Jika masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pemerintahnya, maka bisa dipastikan pembangunan daerah yang dilakukan di daerah tersebut tidak berjalan dengan baik. Jadi sangat diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya untuk membangun daerah dan memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik lagi untuk daerah tersebut.

Pemerintah sebagai pamong ataupun pelayan dalam bermasyarakat, harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Pemerintah juga tidak boleh membuat kebijakan yang semberono ataupun asal-asalan. Masyarakat sebagai orang yang dilayani juga harus dapat mematuhi segala aturan yang berlaku di daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian masyarakat secara tidak langsung telah membantu pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dalam pembangunan daerah. Sehingga tercapailah apa yang telah menjadi tujuan bersama dari pemerintah dan masyarakat yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Asahan.

## Kesimpulan

Berdasarkan yang sudah saya tuliskan di pendahuluan dan pembahasan diatas, bahwa Kabupaten Asahan mempunyai beberapa sektor yang berpotensi yang dapat dikembangkan. Sektor-sektor tersebut terdiri dari sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan, dan sektor perindustrian. Dari semua sektor tersebut, yang menjadi sektor unggulan dari Kabupaten Asahan yaitu sektor pertanian. Sektor unggulan itu berjalan dengan baik dan mengalami pertumbuhan yang dapat dikatakan sangat cepat. Maka dari penjelasan tersebut dapat saya berikan kesimpulan bahwa Kabupaten Asahan mempunyai sektor unggulan yang dapat menunjang perkembangan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Asahan.

## Saran

Dari kesimpulan diatas, kita mengetahui bahwa Kabupaten Asahan mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dengan cara memberdayakan potensi yang dimiliki. Dengan adanya potensi yang dimiliki tersebut, pemerintah Kabupaten Asahan harus dapat mengambil ataupun membuat kebijakan yang tepat untuk pembangunan daerahnya. Pemerintah harus dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, agar masyarakatnya pun percaya kepada pemerintah setempat. Setelah mendapat kepercayaan dari masyarakatnya, pemerintah diharapkan bisa merangkul serta menggerakkan masyarakatnya untuk menjaga dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Asahan itu sendiri. Dengan demikian, sektor unggulan dari Kabupaten Asahan tersebut dapat semakin dikembangkan menjadi lebih baik lagi tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya yang masih tertinggal ataupun belum berkembang.

## Daftar Pustaka

- Abidin, T. Z. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan SWOT). *Universitas Negeri Medan (UNIMED)*. Diakses dari <http://digilib.unimed.ac.id/3272/3/4-082188630008%20Bab%20I.pdf>
- Hakim, M. M. (2018). Analisis Potensi Sektor-Sektor Perekonomian Kabupaten Batubara Tahun 2013-2017. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/5474/1/ANALISIS%20POTENSI%20SEKTOR-SEKTOR%20PEREKONOMIAN%20KABUPATEN%20BATUBA.pdf>
- North Sumatra Invest. (2018). Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Diakses dari [https://www.northsumatrainvest.id/data/pdf/publication/BAB%203%20I%20ASAHAN%20pg%20235-269%20FINAL\).pdf](https://www.northsumatrainvest.id/data/pdf/publication/BAB%203%20I%20ASAHAN%20pg%20235-269%20FINAL).pdf)
- Siregar, A. J. (2017). Analisis Sektor Unggulan Di Kabupaten Asahan. *Universitas Sumatera Utara*. Diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2268/130501138.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

## BAB 14

### Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Dampaknya terhadap Pemulihan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Di Masa Pandemi

Muhamad Taofan Angger Ardana

#### Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu sektor ekonomi yang penting bagi suatu negara contohnya Indonesia. Di Indonesia, pariwisata menjadi salah satu fokus dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan penerimaan devisa bagi negara. Akan tetapi, semenjak adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia telah membawa dampak pada seluruh sektor kehidupan termasuk perekonomian yang anjlok. Salah satu sektor yang dinilai paling terpengaruh dan paling dirugikan karena adanya pandemi tersebut yaitu sektor pariwisata yang meliputi para pelaku usaha wisata. Apalagi situasi pandemi ini yang tidak jelas dan belum pasti kapan akan berakhir sehingga para pelaku usaha hanya bisa berusaha bertahan sampai pandemi ini berakhir.

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten atau daerah yang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas karena memang memiliki potensi wisata yang besar yang dapat membawa andil bagi pendapatan daerah dan bagi perekonomian masyarakat. Semenjak adanya pandemi covid-19, pariwisata di Lombok Tengah juga terdampak dan kian

terpuruk yang dibuktikan dengan sepi pengunjung atau wisatawan diakibatkan dari kebijakan PSBB dari pemerintah. Bagi Kabupaten Lombok Tengah yang dimana merupakan daerah yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu unggulan dan prioritas, tentu dengan terpuruknya pariwisata akibat pandemi yang sekarang berdampak pula pada perekonomian daerah termasuk juga masyarakat. Tentunya pemerintah selain fokus untuk menangani pandemi juga fokus dalam hal pemulihan perekonomian masyarakat karena keduanya sama-sama penting. Dalam hal pemulihan pariwisata, tentunya yang menjadi kunci keberhasilan adalah protokol kesehatan dan karena itu diperlukan kesadaran dari semua pihak yang terkait (Hafizah, 2021).

Kabupaten Lombok Tengah dalam hal pariwisata memiliki potensi yang besar, salah satunya yaitu adanya destinasi wisata super prioritas KEK (kawasan ekonomi khusus) Mandalika yang dicanangkan oleh pemerintah pusat (Wulung dkk, 2020). Dalam lingkungan KEK Mandalika tersebut, Kabupaten Lombok Tengah terdapat juga sirkuit Mandalika yang dimana akan menjadi tuan rumah dalam event balap bertaraf internasional yaitu moto GP yang dimana diharapkan akan mampu mengangkat pariwisata Indonesia dan tentunya Lombok Tengah menjadi dikenal dunia. Dengan adanya KEK Mandalika dan sirkuit Mandalika tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian nasional dan daerah yang diharapkan akan berdampak positif juga pada masyarakat. Dengan adanya program pemerintah pusat yaitu KEK Mandalika ini tentunya juga akan membawa andil atau timbal balik kepada daerah yaitu Lombok Tengah yang pasti manfaatnya juga akan dapat terasa baik itu infrastruktur maupun perekonomian. Tentunya untuk merealisasikan tersebut diperlukan peran semua pihak untuk berkontribusi untuk memfokuskan pada pemulihan pariwisata yang terdampak karena pandemi sekarang.

Kabupaten Lombok Tengah tentunya dalam masa pandemi ini memfokuskan diri untuk memperbaiki perekonomian

salah satunya yaitu memprioritaskan pemulihan pariwisata yang menjadi salah satu keunggulan daerah. Diharapkan dengan adanya KEK Mandalika tersebut khususnya sirkuit Mandalika akan mampu untuk memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi di Lombok Tengah. Dengan adanya program pemerintah ini juga diharapkan akan dapat mampu memberikan dampak positif bagi daerah baik itu meliputi ekonomi maupun infrastruktur yang lain. Tentunya agar dapat mampu mengembangkan pariwisata Mandalika dan even MotoGP yang bertaraf internasional diperlukan juga faktor-faktor pendukung yang lain meliputi pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai seperti bandara, pelabuhan, akses jalan, akses transportasi dan lain-lain.

#### Rumusan Masalah

1. Apa tantangan dalam pengembangan KEK Mandalika dan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah
2. Apakah ada kontribusi dengan adanya KEK Mandalika dan sirkuit Mandalika terhadap perekonomian dan pemulihan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah

#### Tujuan Essay

Dari uraian diatas, essay ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran KEK Mandalika dan sirkuit Mandalika terhadap pemulihan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah dimana disituasi pandemi yang sekarang sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak.

#### Pembahasan

Pembangunan KEK Mandalika merupakan proyek strategis nasional yang diprogramkan oleh pemerintah pusat yang dimana harapan dari pemerintah pusat sendiri dengan adanya pengembangan KEK Mandalika ini akan mampu menjadi magnet untuk memajukan kembali pariwisata Indonesia setelah terpuruk

oleh pandemi. Proyek pengembangan KEK Mandalika dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi regional adalah manfaat atau timbal balik proyek ini tidak hanya ditujukan untuk pemerintah pusat saja, akan tetapi tentunya akan berdampak secara khusus atau langsung terhadap pariwisata di kabupaten lombok tengah. Kabupaten lombok tengah sebagai lokasi dari KEK Mandalika sendiri tentunya dipilih karena memiliki potensi yang tidak terdapat di daerah lain yang dimana potensi tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Tentunya selain terdapat peluang yang dijanjikan oleh mandalika, terdapat pula tantangan yang harus dilewati dalam pengembangan KEK mandalika sendiri. Beberapa tantangan yang masih menjadi PR bagi para pengelola dan pemerintah dalam pengembangan KEK mandalika seperti masalah keamanan, kebersihan, belum ada branding produk unggulan mandalika, kepastian insentif yang diberikan kepada investor serta masih maraknya pekerja anak tentu harus diperhatikan oleh pemerintah dan pengelola.

Dalam pengembangan destinasi super prioritas KEK Mandalika yang dimana terdapat pengembangan sirkuit mandalika sebagai sarana penyelenggaraan ajang balap motor paling bergengsi dunia MotoGP dapat bercermin pada sirkuit sepang Malaysia. Sirkuit sepang terletak di Sepang wilayah Selangor, Malaysia dengan kompleks area seluas 930 hektar yang dimana dulunya wilayah tersebut hanyalah perkebunan kelapa sawit yang dirubah menjadi sirkuit mewah yang dilengkapi dengan hotel, pusat perbelanjaan, lapangan golf dan fasilitas olahraga lainnya. Dalam pembangunan sirkuit tersebut, membawa dampak dalam pembangunan wilayah yang dulunya hanya berupa perkebunan kelapa sawit menjadi kawasan perekonomian strategis dengan daya tarik sirkuit sepang dan MotoGP. Penyelenggaraan ajang balap MotoGP di Malaysia sendiri membawa dampak kunjungan wisatawan ke Malaysia meningkat serta adanya peningkatan pada sektor perekonomian

yang dihasilkan dari segi pariwisata. Pariwisata Malaysia mengalami peningkatan salah satunya pada tahun 2014 dimana kunjungan wisatawan mencapai 27 juta dan pendapatan sekitar RM 72 Miliar dimana pendongkrak utamanya yaitu event MotoGP yang memiliki efektivitas peningkatan secara signifikan yaitu kunjungan dari wisatawan mancanegara terhadap event MotoGP tersebut.

Dalam pengembangan KEK Mandalika dapat pula bercermin pada studi kasus destinasi super prioritas yang lain yaitu destinasi super prioritas Labuhan Bajo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Labuhan Bajo ditetapkan sebagai destinasi super prioritas oleh pemerintah pusat karena geliat pariwisata mendorong investasi berkembang dan inilah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap labuhan bajo sebagai gerbang destinasi wisata dunia. Untuk mendukung peningkatan jumlah wisatawan ke Labuhan Bajo maka pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional Labuhan Bajo yang berdampak juga terhadap infrastruktur lain yang juga ikut berkembang. Akibat dari pembangunan sektor pariwisata di Labuhan Bajo merangsang sektor-sektor lain untuk berkembang juga seperti sektor industri, UMKM, investasi bahkan pertanian dan tidak menutup kemungkinan akan berkembang lebih jauh kedepan. Eksistensi Labuhan Bajo akan terus meningkat bahkan direncanakan akan menjadi tuan rumah dari event internasional yaitu G-20 dan ASEAN SUMMIT pada tahun 2023 dan tentunya hal tersebut akan menjadi angin segar bagi manggarai Barat, NTT dan nasional.

Dalam pengembangan destinasi super prioritas KEK Mandalika serta sirkuit mandalika tentu tidak akan selalu berjalan dengan lancar dan pasti menghadapi yang namanya tantangan. Tantangan terbesar tentunya berasal dari pandemi covid-19 yang sekarang ini tengah melanda seluruh negara didunia termasuk Indonesia. Semua sektor-sektor industri dan perekonomian

terdampak karena pandemi ini bahkan sektor yang paling terdampak yaitu sektor pariwisata karena kebijakan-kebijakan pemerintah seperti lockdown atau isolasi, PSBB dan new normal yang menjadi kendala utama dalam pariwisata. Akibat dari covid-19 berdampak pula pada pergerakan wisatawan mancanegara ke destinasi pariwisata mandalika apalagi terhadap negara-negara yang dilarang penerbangannya ke Indonesia yang mengakibatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung menjadi turun drastis. Meskipun terkendala covid-19, tentunya pembangunan di KEK Mandalika tidak boleh diabaikan dan harus terus dilakukan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan karena sebagai strategi dalam pemulihan pariwisata pasca pandemi.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan KEK Mandalika juga meliputi masalah SDM atau sumber daya manusia. KEK Mandalika tentunya diharapkan dapat menyerap para pekerja lokal atau putra daerah untuk turut serta membangun daerahnya sendiri dan diharapkan dapat membuka lowongan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Penyerapan para pekerja lokal tersebut juga mendapat kendala dimana kualifikasi atau kualitas dari para pekerja lokal masih dipertanyakan. Selain itu, tantangan atau masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia di KEK Mandalika yaitu masih maraknya pekerja anak atau pekerja di bawah umur yang dapat dengan mudah dijumpai di wilayah mandalika. Tentunya hal tersebut menjadi tugas dan bahan evaluasi bagi pemerintah dan pengelola dimana selain meningkatkan pembangunan infrastruktur juga harus bisa meningkatkan taraf kualitas sumber daya manusia dari pengelolaan KEK Mandalika.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan KEK Mandalika menjadi destinasi super prioritas yaitu berkenaan dengan masalah minimnya investasi di KEK Mandalika yang membuat progress pengembangannya lambat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap bahwa dua kawasan

KEK termasuk KEK Mandalika mengalami masalah pada investasi, ditemukan fakta bahwa realisasi investasi di Mandalika sampai akhir 2017 hanya mencapai Rp 428 Miliar dan masih jauh dibawah angka komitmen investasi di kawasan wisata yang sebesar Rp 13 Triliun serta masih jauh lagi dibawah target investasi Rp 28 Triliun. Meskipun sudah ditetapkan pembangunan sirkuit untuk balap MotoGP akan tetapi strategi promosi melalui balap MotoGP tersebut tidak sepenuhnya berhasil untuk mengundang para investor untuk berinvestasi di Mandalika. Para investor memandang bahwa MotoGP bukanlah alat promosi utama bagi KEK Mandalika karena euphoria MotoGP hanya sekali setahun dan setelah itu Mandalika memerlukan branding sendiri untuk tetap menjaga eksistensinya. Tentunya hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kedepannya dalam mengambil strategi untuk memikat investor agar mau berinvestasi di Mandalika (Chotijah, S., 2021).

Dampak atau kontribusi dari adanya pembangunan KEK Mandalika terhadap perekonomian Lombok Tengah dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu aspek tersebut yaitu pada aspek pembangunan dimana untuk mendukung KEK Mandalika dan juga mendukung terselenggaranya even MotoGP di sirkuit mandalika tentunya memerlukan fasilitas penunjang meliputi sarana dan prasarana seperti akses jalan, transportasi, bandara dan pelabuhan serta sarana-sarana lain. Dengan adanya KEK Mandalika tersebut turut mempengaruhi pembangunan di Lombok Tengah seperti pembuatan jalan kawasan khusus (JKK) yang memberikan akses dari bandara menuju KEK Mandalika menjadi lebih cepat. Selain itu untuk mendukung KEK Mandalika dan penyelenggaraan MotoGP, dilakukan peningkatan pada Bandara Internasional Lombok (BIL) yang meliputi perpanjangan dan pengerasan landasan pacu(runway), perluasan terminal penumpang dan perluasan apron. Tentunya dampak dari adanya KEK Mandalika yang meliputi pembuatan jalan dan

perluasan bandara tersebut pasti akan membawa dampak positif juga terhadap perekonomian masyarakat Lombok Tengah.

Dampak atau kontribusi lain yang dapat diberikan dari adanya KEK Mandalika dan ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika yaitu dapat memberikan rangsangan terhadap IKM dan UKM di Lombok Tengah untuk berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan dipilihnya hasil-hasil produk kerajinan IKM dan UKM di Lombok Tengah menjadi merchandise pada ajang MotoGP mendatang seperti kerajinan tenun, anyam dan gerabah. Tentunya hal tersebut juga dapat menjadi ajang promosi kebudayaan dan kerajinan Lombok Tengah yang dapat membuka peluang ekspor kedepannya. Alasan dari pemilihan produk-produk IKM dan UKM ini sendiri dijadikan merchandise dari MotoGP Mandalika bertujuan untuk menggerakkan perekonomian setempat dengan berpihak pada UKM dan IKM yang ada. Kerjasama antara pihak IKM dan UKM Lombok Tengah dengan pihak pengelola KEK Mandalika atau MGPA (Mandalika Grand Prix Association) bisa memberikan solusi terhadap permasalahan pemasaran dari produk IKM dan UKM di Lombok Tengah.

Kontribusi yang dapat diberikan oleh KEK Mandalika lainnya yaitu dapat menjadi media promosi bagi destinasi-destinasi wisata Lombok Tengah yang lain. Dengan adanya eksistensi dari KEK Mandalika dan MotoGP Mandalika tentu akan mengangkat destinasi wisata yang lain, baik itu wisata alam maupun sosial budaya yang ada di Lombok pada umumnya dan Lombok Tengah pada khususnya. Seperti yang diketahui bahwa Lombok kaya akan potensi alam dan wisatanya seperti air terjun, pantai dan gunung serta wisata sosial budayanya. Terlebih lagi pariwisata Lombok mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi covid-19, maka dari itu diharapkan dengan naiknya eksistensi Mandalika dapat pula menjadi strategi pemulihan pariwisata di Lombok secara menyeluruh. Diharapkan dengan adanya KEK Mandalika dan perhelatan MotoGP dapat menarik

kembali animo masyarakat dan wisatawan untuk datang ke Lombok.

Peran KEK Mandalika dan sirkuit mandalika terhadap perekonomian Kabupaten Lombok Tengah sangat besar bahkan sangat memungkinkan menjadi prioritas dalam pengembangan ekonomi Lombok Tengah. Diharapkan KEK Mandalika dan even MotoGP di sirkuit mandalika akan dapat memberikan kontribusi-kontribusi yang lain terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang terkena dampak covid-19. Ajang balap MotoGP yang dimana merupakan ajang internasional dapat menjadi sarana promosi bagi Kabupaten Lombok Tengah untuk dikenal secara Internasional. Tentunya diharapkan dengan melesatnya pembangunan pariwisata di Lombok Tengah akan turut juga membawa dampak yang positif terhadap perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah untuk terus maju dan berkembang. Meskipun, dalam pengembangan KEK Mandalika dan sirkuit mandalika memang tidak mudah dan mengalami berbagai tantangan didalamnya dan untuk itu diperlukan peran semua pihak yang terlibat termasuk peran pemerintah didalamnya.

#### Kesimpulan

Pengembangan KEK Mandalika dan sirkuit mandalika yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah dalam realita di lapangannya mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Tentunya selain terkendala dalam hal SDM dan investasi, tantangan terbesar dalam pengembangannya berasal dari pandemi covid 19 yang paling merugikan sektor pariwisata. Hadirnya destinasi pariwisata super prioritas KEK Mandalika telah memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan pemulihan perekonomian bagi Kabupaten Lombok Tengah. Hadirnya KEK Mandalika ini juga menjadi harapan bagi kabupaten Lombok Tengah dan nasional dalam pemulihan pariwisata yang satu tahun terakhir kian terpuruk sebagai akibat dari merebaknya covid 19 di Indonesia. Hadirnya

KEK Mandalika memberikan kontribusi bagi Kabupaten Lombok Tengah baik yang dapat dirasakan secara langsung atau tidak seperti peningkatan infrastruktur, turut berkembangnya IKM dan UKM serta dapat menjadi pemacu destinasi wisata lain untuk berkembang.

#### Saran

Dalam pengembangan KEK Mandalika dan sirkuit mandalika yang mengalami berbagai tantangan dan hambatan tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan para pengelola. Segala kekurangan dan permasalahan didalam pengembangannya harus terus dievaluasi agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Tentunya dibutuhkan keseriusan dari pemerintah dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan mengingat status KEK Mandalika dan sirkuit mandalika tersebut yang merupakan taraf internasional. Permasalahan seperti kurangnya kualitas SDM dan minimnya investasi tentu harus ditangani dengan cepat dan cermat dengan melakukan berbagai inovasi didalamnya. Inovasi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan seperti kualitas SDM dan minimnya investasi bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan terpadu dan promosi digital dengan mengandalkan teknologi informasi dan media online yang dimana di zaman sekarang merupakan era perkembangan teknologi dan era revolusi industri 4.0.

#### Daftar Pustaka

- Wulung, S. R. P., Puspasari, A. H., Zahira, A., Mutiara, I. N., Mutiah, K., Triastika, M., ... & Yulian, V. R. D. (2020). Destinasi Super Prioritas Mandalika Dan Covid-19. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 11(2), 83-91.
- Hafizah Dwi, Sasmita (2021). *Analisis Tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Umkm Di Kawasan Ekonomi*

*Khusus Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Chotijah, S. (2021). Relasi Media Mandalika Sebagai Destinasi Superprioritas Dalam Pemberitaan Kesiapan Pelaksanaan Event MotoGP 2021. *JCommsci-Journal Of Media and Communication Science*, 4(1), 14-22.

## BAB 15

### Partisipasi Komunitas Daerah “*Institut Mosintuwu*” Dalam Pembangunan Ekonomi Regional di Daerah *Post Conflict* Poso Sulawesi Tengah

Nurul Fitriani Panjili

#### Latar Belakang

Pemulihan pasca-konflik menjadi permasalahan utama dalam upaya pembangunan kembali Daerah *post conflict* dilihat dari perspektif agama, sosial, dan ekonomi serta budaya politiknya. Daerah *post conflict* membutuhkan waktu yang lama untuk kembali bangkit dan pulih karena mengalami berbagai tantangan dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah *Post Conflict* bukan hanya sebatas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, antisipasi publik

terhadap kemungkinan terjadinya kembali konflik juga harus diperhatikan karena masih dalam situasi konflik yang rentan.

Komunitas Daerah menjadi salah satu instrumen strategis yang dapat dilakukan oleh pemuda daerah seperti halnya *Institut Mosintuwu* di Poso, Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu institusi perempuan yang berfokus pada organisasi masyarakat di mana anggotanya merupakan survivor konflik Poso dengan tujuan menyuarkan hak-hak masyarakat yang dirampas melalui konflik kedaerahan.

*Institut Mosintuwu* merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan kepentingan ekonomi yang tidak berpihak didaerah marjinal secara indeks ekonomi pada masyarakat miskin menengah kelas bawah dan juga sebagai agen perdamaian serta pengembangan masyarakat melalui program-program kerja yang dibuat dan dilakukan oleh *Institut Mosintuwu*.

*Institut Mosintuwu* membuktikan bahwa organisasi masyarakat daerah berpartisipasi aktif dalam pembangunan pasca konflik terlebih dalam hal ini yang menjadi aktor-aktor utamanya merupakan perempuan sehingga membuktikan bahwa perempuan merupakan agen terbaik dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan ekonomi regional yang berkelanjutan.

#### Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan, banyak tantangan dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di daerah *post conflict*, maka rumusan masalah dalam essay ini diangkat melalui pendekatan deskriptif tentang “apa dan bagaimana bentuk partisipasi dan peranan yang dilakukan oleh *Institut Mosintuwu* dalam menghasilkan resolusi-resolusi konflik untuk mewujudkan pembangunan ekonomi regional berkelanjutan di Poso”.

## Tujuan Essay

Berdasarkan uraian diatas, tujuan essay ini adalah untuk mendeskripsikan peran sebuah organisasi masyarakat daerah yaitu *Institut Mosintuwu* dalam proses resolusi konflik di Poso.

## Pembahasan

Poso dengan sebutan “daerah bekas konflik” tidak menjadikan masyarakatnya surut semangat untuk tetap bangkit dalam pemulihan pasca konflik. Terlebih dalam pembangunan ekonomi regional yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya *institut mosintuwu* dimana penggagasnya merupakan penyintas konflik Poso dimasa lalu. Anggotanya saling bahu membahu berkontribusi untuk membantu meningkatkan kapasitas daerah melalui pengembangan masyarakat. Berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi daerah, mereka sebagai organisasi masyarakat turut menyusun dan menjalankan program yang sejatinya dilakukan untuk memberdayakan masyarakat.

Sudah dua puluh tahun lamanya konflik terjadi di Poso namun bekas yang ditinggalkan masih terasa sampai sekarang. Daerah bekas konflik memang membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali pulih (Khairil, 2011). Sama seperti daerah bekas konflik lain contohnya Aceh. Hingga kini mereka masih bergelut untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerahnya. Selain itu, Aceh mendapatkan otonomi khusus dan diberikan dana otonomi khusus untuk memulihkan perekonomiannya hingga 2028 (Zainal, 2016). Semua *stakeholder* pemerintahan dibantu dengan semangat dari masing-masing pribadi masyarakat muncul secara sadar, akan pentingnya pemulihan ekonomi untuk kehidupan dimasa datang.

Salah satu hal yang menjadi gangguan peningkatan ekonomi di daerah bekas konflik adalah kepercayaan sosial yang mulai hilang dari masyarakat luar. Hal ini berdampak pada

kegiatan investasi ekonomi di Poso, begitu juga di daerah seperti misalnya Aceh, Ambon, dan daerah pasca konflik lainnya. (Trijono, 2019). Masyarakat luar masih berpikir apakah akan terjamin keamanan mereka jika melakukan kegiatan perekonomian di daerah pasca konflik. Ini dibuktikan dengan banyaknya pegiat ekonomi yang *minggat* dari Poso saat maupun setelah konflik berlangsung. Hal ini yang menjadi puncak kemerosotan perekonomian di Poso yang dulunya sempat menjadi ibukota Sulawesi Tengah pada tahun 1948 karena letaknya yang sangat strategis ditengah dan menjadi jalan poros *Trans Sulawesi* Sebelum akhirnya dipindahkan ke Palu.

Peran aktif masyarakat menjadikan Poso banyak dipenuhi berbagai organisasi masyarakat dan komunitas daerah berbasis sosial. Mereka ini yang secara tidak langsung banyak berkontribusi dalam pembangunan kembali setelah mengalami konflik kemanusiaan bertahun-tahun silam. Masih banyak manusia berhati baik yang turut membantu meringankan beban bersama. Hal ini muncul dari kemauan agar tidak terus menerus *stuck* dalam kondisi sulit. Awalnya mereka menciptakan banyak agen-agen perdamaian yang di inisiasi oleh perempuan, dengan anggapan perempuan merupakan agen terbaik penyebar perdamaian dan sikap saling toleransi. Dengan prinsip *The Peace Agency - When The War Ends, Women Fight Begins*, dimana *konflik komunal* yang menjadi dasar peristiwa di Poso (Babutung, 2016). Setelah itu mulai bermunculan organisasi masyarakat yang tidak hanya sebagai *rekonsiliasi* semata namun juga sebagai pembangkit perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

*Institut Mosintuwu* sebagai organisasi masyarakat berbasis sosial memiliki peran aktif dalam proses pemulihan di Poso (Riswari, 2018). Dengan banyak program yang mereka jalankan, tentunya hal ini menjadi sebuah progres dimana

pembangunan yang mereka lakukan dimulai dari skala kecil seperti kelurahan, desa, hingga mencakup kecamatan di Kabupaten Poso. Mereka menggandeng berbagai macam bentuk masyarakat dari latar belakang suku, agama, pendidikan dan sosial yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa seiring berjalannya waktu, masyarakat kembali berdamai dengan keadaan kemudian dengan orang lain yang membuat mereka semakin lupa bahwa pernah terjadi konflik diantara mereka dimasa silam. Sikap saling toleransi dan menghargai antar sesama menjadi dasar terjalinnya hubungan kerjasama yang baik agar tercapai tujuan bersama.

Berangkat dari semangat Kongres Perempuan pada 22 Desember 1928, para perempuan di Poso juga mengadakan Kongres Perempuan pertama pada tahun 2014 yang diikuti oleh kurang lebih 1000 perempuan Poso dan menghasilkan 135 rekomendasi untuk partisipasi perempuan dalam pembangunan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, keterlibatan dalam keputusan adat dan budaya, hak layanan masyarakat, serta pengembangan ekonomi solidaritas. Program pendidikan yang diadakan institut mosintuwu seperti *Sekolah Perempuan*, mencetak banyak perempuan dengan pendidikan kritis akan kesadaran terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mereka berasal dari berbagai desa dengan bermacam latar belakang seperti petani, nelayan, buruh, bahkan ibu rumah tangga. Sebelum dinyatakan lulus dari sekolah perempuan, mereka dibekali 9 modul kurikulum yang terdiri dari agama, toleransi dan perdamaian; gender; hak ekonomi, sosial, budaya dan sipil politik; hak layanan masyarakat; perempuan dan budaya; perempuan dan politik; keterampilan berbicara dan bernalar; ekonomi solidaritas; serta kesehatan seksual dan reproduksi (Riswari, 2018). Output yang diharapkan setelah mereka keluar dari sekolah perempuan ialah Kesadaran akan

kesetaraan gender bahwa perempuan berhak untuk terlibat dalam pembangunan di Poso serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif di desa mereka bahkan mendapatkan kedudukan strategis dalam organisasi desa untuk kemajuan pembangunan di Poso karena mereka juga diajarkan tentang bagaimana penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa), RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dan penyusunan APBDDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Keberhasilan program *sekolah perempuan* yang dijalankan oleh institut mosintuwu bahkan mendorong para alumnyanya untuk membuka kegiatan ekonomi. Perempuan yang berasal dari berbagai desa itu lebih peka terhadap permasalahan dan sumber daya alam mereka. Mereka tidak hanya bekerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru untuk yang masyarakat lain. Bahkan, mereka sampai punya pasar sendiri untuk menghidupi masyarakat desa dan desa sekitarnya. Mulanya pasar desa perempuan hanya diinisiasi oleh beberapa orang dengan membawa hasil sayuran dari halaman rumah untuk dijual bersama, dan berkembang luas hingga menjadi pasar desa besar dengan beranggotakan ratusan orang (Siruyu, 2017). Keberlanjutan dari sekolah perempuan adalah program *Sekolah Pembaharu*. Jika di sekolah perempuan mereka dibekali ilmu, disekolah pembaharu ilmu yang sudah didapatkan kembali dikembangkan dan dievaluasi. Kemandirian mereka membuktikan bahwa penggerak ekonomi di Poso dimulai dari lingkup kecil seperti desa hingga mencakup seluruh desa di Kabupaten Poso. Sekolah perempuan bahkan menginspirasi daerah lain seperti Kabupaten Waropen di Papua yang pernah mendatangkan langsung *mama-mama Waropen* untuk belajar dari konsep sekolah perempuan institut mosintuwu.

Kurikulum ekonomi solidaritas dalam program sekolah perempuan memberikan dampak besar terhadap pembangunan

berkelanjutan di desa. Berorientasi dengan alam, serta pengelolaannya yang menjadikan hal ini sebagai salah satu cara pengembangan ekonomi. Contoh kegiatannya seperti usaha desa. Banyak alumni sekolah perempuan yang mempunyai ide kreatif dan menginspirasi masyarakat lain dalam kegiatan ekonomi. Mereka memastikan keuntungan tidak hanya dirasakan oleh mereka, namun bagi masyarakat lain di desa. Mengolah sayuran menjadi kerupuk, usaha minyak kelapa bumi, usaha kopi, pembuatan tahu tempe hingga kecap kedelai, kerajinan sampah, kue dari tepung ubi, gula merah, madu di desa, membuat batu bata dari pasir sungai dan masih banyak lagi usaha lain yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Misalnya memanjat kelapa untuk usaha minyak kelapa, mengolah kerajinan dari sampah, mengambil pasir untuk pembuatan batu bata, anak muda desa bekerja di kebun kopi, dan banyak pekerjaan lain dari usaha yang mereka buat sehingga masyarakat desa tidak perlu menjadi buruh ditanah orang lain namun mengolah kekayaan alam sendiri dan menghasilkan sebagai masyarakat mandiri dalam ekonomi. Para pekerja berasal dari berbagai latar belakang tanpa memandang suku dan agama bahkan penyandang disabilitas juga bisa bekerja.

Selain itu, program mosintuwu yaitu *Kebun Mosintuwu* yang dikembangkan oleh perempuan, petani di halaman rumah, kebun bersama di 25 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Poso, ditahun 2020 sudah mencapai 351 petani dan tentunya jumlah ini akan bertambah seiring berjalannya waktu. Mereka sudah menghasilkan banyak hasil panen sayuran seperti bawang merah, buncis, kangkung, sawi, terong, cabai, tomat, dan lain sebagainya yang bibitnya dibagikan dalam program Kebun Mosintuwu. Hasil panen mereka tidak hanya membantu penyediaan bahan makanan, tetapi hasilnya juga sebagai bentuk pendanaan pendidikan dan kesehatan. Semakin banyak nantinya

masyarakat yang menanam dari halaman rumah hingga kebun bersama, maka ini merupakan langkah awal kedaulatan pangan. Apalagi di kondisi *Pandemi Covid-19* ini, omset penjualan mengalami penurunan. Namun, persediaan bahan makanan bisa dihasilkan sendiri dan bisa juga untuk membantu masyarakat lain. Para alumni sekolah perempuan saling berkolaborasi misalnya dengan menjajakan produk dari desa yang satu ke desa yang lain yang terletak di jalur trans sulawesi sehingga memudahkan pertemuan antara produsen dan konsumen.

Eksistensi perempuan dalam hal ini mengubah *mindset* buruk tentang Poso yang orang kenal diluar sana hanya sebagai daerah *post conflict*. Lebih dari sekedar pasca konflik, perempuan, institut mosintuwu dan programnya membawa pengaruh luar biasa terhadap pembangunan berkelanjutan di Poso. Tantangan dan hambatan seperti menghadapi masalah *patriarki*, program ekonomi desa, hingga *pandemi covid-19* ini masih terus berlangsung. Namun, mereka melakukan pembuktian dengan menunjukkan bahwa siapa saja bisa terlibat langsung sebagai penggerak. Pembangunan yang dilakukan mulai dari lingkup kecil seperti desa, seiring berjalannya waktu akan mencakup semua desa yang ada di Kabupaten Poso sehingga pembangunan tidak hanya berkelanjutan namun dapat terjadi secara menyeluruh. Kekayaan alam dengan pemanfaatan yang bijak, bekal ilmu para penggerak, harus dimanfaatkan agar berguna bagi masyarakat luas. *Women empowerment* terbukti, dilihat dari mereka yang ada digarda depan dalam penciptaan resolusi konflik dalam bentuk perdamaian dan pembangunan ekonomi regional yang berkelanjutan di daerah *post conflict*.

## Kesimpulan

Dari berbagai macam pembuktian yang dilakukan oleh para perempuan khususnya *Institut Mosintuwu* sebagai organisasi penggerak masyarakat di Poso, dapat dilihat keberhasilan mereka dalam melakukan pembangkitan dan pemulihan kegiatan sosial ekonomi serta sebagai agen perdamaian. Hal ini merupakan suatu progres yang patut diapresiasi. Ini membuktikan bahwa kegiatan pembangunan tidak harus dibebankan hanya pada stakeholder pemerintahan. Namun, semua lapisan masyarakat dapat menjadi penggerak dan berperan aktif dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, keberhasilan *women empowerment* yang merupakan output dari sekolah perempuan di institut mosintuwu membawa dampak positif sebagai suatu resolusi permasalahan yang terjadi di masyarakat pasca konflik.

Kedepannya, semoga semakin banyak para alumni sekolah perempuan dari institut mosintuwu yang dapat menciptakan perubahan lebih besar lagi terhadap proses pembangunan dan pemulihan di Poso. Harapan masyarakat akan kedaulatan ekonomi mandiri dan hidup rukun dalam perdamaian perlahan akan terwujud. Diharapkan semakin banyak masyarakat yang secara sadar dan turut bergabung dalam program-program dari institut mosintuwu yang kedepannya semoga menciptakan program baru yang lebih fresh dan update akan permasalahan dimasyarakat sekitar. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah kabupaten Poso yang harus memberikan ruang dan memfasilitasi organisasi dan program yang dijalankan. Masyarakat, pemerintah dan organisasi berbasis sosial kedepannya dapat bekerja sama dalam berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Poso.

## Daftar Pustaka

- Babutung, M. (2016). Peran Institut Mosintuwu Dalam Membangun Budaya Perdamaian. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar*.
- Khairil, M. (2011). Strategi Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik Poso. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta*.
- Pusut, R., Kimbal, M., & Mamentu, M. (2017). Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Eksekutif Universitas Sam Ratulangi*.
- Riswari, A. A. (2018, May 11). *Good News From Indonesia*. Retrieved from Mengenal Lebih Dalam MOSINTUWU: Institut Perempuan di Poso: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/05/11/mengenal-lebih-dalam-mosintuwu-institut-perempuan-di-poso> diakses pada 01 Mei 2021
- Siruyu, P. (2017, Oktober 26). *Mosintuwu*. Retrieved from The Power of Mama-mama Poso : Mereka di barisan depan perubahan: <http://www.mosintuwu.com/2017/10/26/the-power-of-mama-mama-poso-mereka-di-barisan-depan-perubahan/> diakses pada 01 Mei 2021
- Trijono, L. (2019). Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia:.. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Zainal, S. (2016). Post-Conflict Peace Education To Build Sustainable Positive Peace In Aceh. *University of Malikussaleh Aceh*.

## BAB 16

### Tantangan Pengelolaan Hasil Pertanian Padi Masyarakat Kabupaten Landak

Sirilus Usanto Pabalayo

#### Latar Belakang

Pertanian menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat dibutuhkan suatu negara. Termasuk pula masyarakat kabupaten landak. Tanpa adanya sektor pertanian kita sebagai masyarakat tidak akan bisa makan. Sehingga sektor pertanian, menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat setempat. Pertanian dibutuhkan untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia mengingat lahan yang semakin sempit, tetapi jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Dengan dikenalnya Indonesia sebagai negara yang ‘tongkat kayu dan batu jadi tanaman’ menjadi penanda betapa suburnya tanah di negeri ini. Sehingga sangat sesuai untuk di olah menjadi lahan pertanian. Kabupaten landak sebagai daerah di Indonesia yang geografisnya dipenuhi dengan bukit-bukit dan tanah gambut memiliki keunggulan khusus dalam peningkatan perekonomian di sektor pertanian yang sesuai dengan keadaan geografis tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat harus jeli dalam

mengolah lahan yang ada sehingga tepat guna sesuai tanaman yang dapat tumbuh di lahan tersebut.

Sebagai petani yang menjadi harapan masyarakat adalah hasil tani yang memuaskan (berhasil). Sehingga dari hasil pertanian tersebut dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan masyarakat. Karena saat ini banyak petani yang bertani hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka disebabkan hasil panen yang kurang memuaskan. Akibatnya hasil panen tersebut tidak menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Padahal yang diharapkan untuk kesejahteraan petani adalah seorang petani dapat menghasilkan pendapatan dari hasil taninya sehingga dikatakan petani yang berhasil.

Menurut Pratiwi( 2016), tanaman padi (*oryza sativa* L.) merupakan tanaman pangan penting yang menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia karena mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Oleh sebab itu, pengelolaan tanaman padi harus diperhatikan dengan bijak supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang berperan penting dalam pengelolaan tanaman padi ini harus dibekali ilmu yang baik. Namun meskipun hal tersebut dilakukan tetap saja hasil pertanian masyarakat belum maksimal. Karena masih banyak aspek yang mempengaruhi hasil panen padi.

Hasil panen yang baik dari pertanian padi tentu menjadi harapan bagi semua petani di kabupaten landak. Namun nyatanya hasil panen ini belum maksimal dalam mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari seorang petani yang masih membeli beras padahal harusnya ia tidak perlu membeli karena ia juga menghasilkan beras dari hasil panennya. Oleh sebab itu, tantangan dalam pengelolaan hasil panen padi pada masyarakat kabupaten landak perlu diketahui agar pemerintah dapat menelusuri lebih lanjut untuk memberikan solusi yang tepat

agar kehidupan masyarakat tetap makmur dan ketahanan pangan di daerah ini tetap terjaga.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan tentang pentingnya pertanian dalam kehidupan masyarakat di kabupaten landak serta berbagai tantangan dalam pengelolaan hasil pertanian, maka rumusan masalah dalam essay ini adalah:

1. Bagaimana masyarakat kabupaten landak dalam mengelola hasil panen padi mereka?
2. Apa kendala yang dialami masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hasil pertanian padi?

Essay ini memiliki tujuan seperti berikut:

1. Untuk menggambarkan cara masyarakat kabupaten landak dalam mengelola hasil panen padi mereka
2. Untuk mengetahui kendala langsung yang dialami masyarakat dalam pengelolaan hasil pertanian padi

### Pembahasan

Pertanian sebagai penopang perekonomian bangsa tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat yang hidup di pedesaan menjadi salah satu aktor yang berperan penting dalam pengelolaan pertanian khususnya pertanian padi. Pertanian padi harusnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa sehingga kehidupan mereka terjamin. Namun nyatanya hal tersebut belum bisa dikatakan berhasil, kemiskinan dan tingkat pendidikan yang kurang memadai menjadi pemicu timbulnya masalah dalam pengelolaan hasil pertanian padi. Masalah tersebut meliputi kurangnya pemberian pupuk pada pertanian akibat kemiskinan dan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan hasil pertanian padi menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Sebagaimana yang telah dipelajari pada

materi kuliah tentang tantangan perekonomian yaitu berupa kemiskinan. Selain itu, tantangan utama sektor tanaman pangan ialah bagaimana usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional dari produksi dalam negeri. Mengingat permintaan terhadap beras terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan upaya diversifikasi pangan pokok belum mencapai hasil yang diharapkan (Fitria, 2013).

Dalam menyikapi setiap tantangan yang dialami Kabupaten Landak pada sektor pengelolaan hasil pertanian padi perlu juga belajar dari daerah lain. Pada hal ini akan membandingkan dengan Kabupaten Sintang yang juga berada di Kalimantan Barat. Bupati Sintang, Jarot Winarno mengungkapkan bahwa di Sintang telah ada penyuluh di bidang pertanian yang akan mendampingi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian. Meskipun kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat, tetap saja ada tantangan yang sulit dihindari seperti lahan pertanian yang kurang luas, lahan yang ada kurang ditanami, dan hasil yang kurang banyak atau kurang maksimal. Lalu menurut Jarot, Good Agriculture Practice di Sintang masih belum berjalan dengan maksimal sehingga diperlukan pemahaman yang baik. Selain itu, kurangnya lahan pertanian padi di Kabupaten Sintang ternyata diakibatkan pula oleh penggunaan lahan yang lumayan besar pada sektor perkebunan kelapa sawit dengan wilayah 174 hektar. Untuk saat ini, pemerintah menargetkan dan membatasi lahan kebun kelapa sawit pada luas 200 ribu hektar. Karena sawit dianggap menjanjikan dan dapat menaikkan perekonomian masyarakat.

Sebagai pemanding berikutnya, penulis akan mengamati salah satu kabupaten di pulau jawa yaitu Kabupaten Mojokerto. Luas lahan pertanian di kabupaten ini 371.010 km<sup>2</sup>. Namun, sekarang akan di ambil sampel dari salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto yaitu Kecamatan Sooko. Perubahan

penggunaan lahan ke lahan non pertanian di Kecamatan Sooko pada tahun 2009-2016 bertambah tinggi akibat harga jual yang tinggi pula, sehingga mengakibatkan banyaknya petani pemilik lahan yang menjual lahannya untuk di jadikan lahan industri (Lahan et al., n.d.). Hal tersebut terjadi karena minimnya penghasilan petani khususnya yang berlahan sempit membuat kehidupan perekonomian mereka terhimpit dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mereka menjual tanah mereka. Kegiatan ini memicu perubahan profesi pada masyarakat. Penghasilan pun semakin beragam sesuai pekerjaan mereka saat ini. Jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten Landak, pengalihan fungsi lahan ini juga terjadi. Namun pada masyarakat Kabupaten Landak lahan yang ada dialih fungsikan menjadi lahan kelapa sawit.

Kabupaten Landak sebagai kabupaten yang ada di Kalimantan Barat menjadi salah satu kabupaten yang lahan pertaniannya lumayan besar. Hal ini menjadikan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Landak tahun 2016, luas lahan pertanian di kabupaten Landak untuk sawah mencapai 75.549 hektar (10,11%) dan tanah bukan sawah seluas 680.258 hektar (89,88%). Dari luas 75.549 ha tersebut, baru 56.545 yang dikelola dengan total produksi di tahun 2015 sebesar 17.578 ton padi dari ladang 188.436 ton padi dari sawah. Tahun 2017 data yang diperoleh dari Dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan kabupaten Landak, menunjukkan Angka tetap (ATAP) produksi padi di sawah berkisar 217.208 ton dengan luas tanam 64.033 hektar, dan produksi padi di ladang 27.132 ton dengan luas tanam 15.344 hektar. Selain itu, kehidupan pertanian masyarakat juga beragam, seperti petani kelapa sawit, jagung dan sayu-sayuran. Komoditas pertanian ini diharapkan mampu menopang perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah

kebawah. Namun untuk mewujudkan capaian tersebut banyak tantangan yang harus dilewati. Tantangan ini membuat hasil pertanian tidak maksimal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga masih ada masyarakat yang harus berhutang hanya untuk membeli beras.

Tantangan dalam pengelolaan hasil pertanian harus disoroti dengan baik oleh pemerintah setempat dan masyarakat sehingga dapat dikoordinasikan untuk memperoleh solusinya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pernah mengatakan adanya lima pokok permasalahan di sektor pertanian. Permasalahan yang utama yaitu masalah permodalan. Lalu lahan pertanian yang kian menyempit, teknologi pertanian, pupuk dan pemasaran hasil pertanian tersebut. Dalam penggunaan teknologi pertanian, masyarakat masih menggunakan teknologi yang tradisional sehingga perlu diubah menggunakan teknologi modern sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Selain itu, jumlah penduduk yang kian bertambah setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman masyarakat.

Menurut kajian salah satu dosen pertanian Universitas Tanjungpura, luas lahan sawah di Kalimantan Barat adalah 305 ribu hektar pada tahun 2012. Jumlah ini turun 21,8 persen atau sebesar 66 ribu hektar pada tahun 2018. Sehingga luas lahan sawah di Kalimantan Barat berkisar 239 ribu hektar pada tahun 2018 dan kemungkinan angka tersebut meningkat pada tahun 2021 saat ini. Berdasarkan kajian tersebut kabupaten landak berada pada urutan ketiga dalam menyumbangkan alih fungsi lahan terbesar setelah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya dengan nilai 34,6 persen di tahun 2018. Pada tahun 2021 saat ini lahan sawah masyarakat banyak yang dialih fungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit karena

menganggap kelapa sawit menjadi salah satu sumber penghasilan yang menjanjikan.

Adanya tantangan dalam pengelolaan hasil pertanian tidak lepas dari proses yang terjadi dilapangan pada saat pengelolaan hasil pertanian ini. Untuk itu sebelum menyimpulkan berbagai masalah yang terjadi, perlu tahu terlebih dahulu proses pengelolaan pertanian masyarakat di daerah Kabupaten Landak. Proses tersebut meliputi pengolahan tanah, perawatan tanaman padi, hingga panen dan pengolahan hasil panen. Tiap proses tersebut memiliki tantangannya masing-masing. Mulai dari pemanfaatan teknologi, pupuk, hama tanaman, hewan liar (burung dan tikus), hewan ternak hingga akibat ulah manusia itu sendiri sehingga masyarakat yang bekerja harus jeli terhadap hal-hal tersebut.

Proses kegiatan pertanian di Kabupaten Landak, pada setiap tempat memiliki kesamaan dalam pengelolaan pertanian padi. Pada saat ini penulis akan menggambarkan kegiatan pertanian di tempat penulis berada yaitu di Kecamatan Sebangki, salah satu kecamatan di Kabupaten Landak. Pada saat musim tanam tiba kadang masyarakat tidak serentak memulai kegiatan tersebut. Sehingga saat umur panen tiba, lokasi lahan yang telah di tanami terlebih dahulu akan masak lebih awal sehingga hal ini memicu burung-burung untuk memakannya sehingga mengakibatkan hasil panen yang berkurang nantinya. Saat panen tiba, masih ada masyarakat yang memilih menggunakan cara tradisional dalam merontokan padi yaitu dengan gesekan menggunakan kaki. Ini terjadi karena alat perontok yang ada hanya terbatas, sehingga mewajibkan masyarakat untuk mengantri dalam penggunaannya. Proses ini mengakibatkan terjadinya olahan panen padi yang berlangsung lama.

Hasil panen padi yang kurang maksimal dapat terjadi oleh berbagai kondisi yang melanda. Benih sebagai modal awal dalam

bercocok tanam menjadi penentu hasil panen padi nantinya. Saat ini petani di Kecamatan Sebangki masih memanfaatkan benih lokal turun temurun sehingga hasil panen jika dibandingkan benih hibrida sangat berbeda jauh. Selain itu kurangnya modal untuk mengelola lahan seperti memberikan pupuk dan membeli pestisida membuat hasil panen tidak maksimal juga. Karena tanah yang subur dengan nutrisi yang terpenuhi tentu akan memberikan hasil yang maksimal. Dengan adanya bantuan dari pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk dapat menolong pertanian masyarakat meskipun belum semuanya terpenuhi.

Tantangan-tantangan tersebut memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memecahkan masalahnya dan menemukan solusi yang tepat supaya berguna bagi petani padi. Selain tantangan tersebut, masih ada tantangan yang dialami dalam pengelolaan lahan pertanian untuk memberikan hasil yang maksimal. Seperti yang diungkapkan pengamat pertanian dari Universitas Nusa Cendana, Kupang Leta Rafael Levis bahwa peningkatan produksi dan penggunaan teknologi bukanlah masalah yang utama. Namun, masalah yang sesungguhnya yaitu kurangnya penyuluhan kepada petani dalam mengelola lahan pertanian. Menurut penulis hal ini terjadi juga pada daerah penulis. Jadinya masyarakat kurang memahami kegiatan pertanian yang baik itu seperti apa. Konversi lahan yang banyak dialih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit karena lebih menjanjikan dalam menambah taraf penghasilan juga menjadi pemicu kurangnya hasil pertanian. Lahan yang ada hanya sedikit dipakai untuk bertanam padi. Banyak juga lahan yang tidak digunakan karena rasa malas yang menghantui masyarakat.

Masyarakat ada yang tidak serius dalam bertani sehingga ketika bertani asal-asalan. Kurang pengontrolan pada lahan pertanian sehingga lahan pertanian yang ditanamai padi habis terkena gulma dan berbagai penyakit lainnya. Selain itu,

pengaruh hewan ternak seperti babi juga meresahkan masyarakat. Karena di daerah Kabupaten Landak hewan ternak ini banyak yang tidak dikandang sehingga bebas berkeliaran ke sawah masyarakat dan sering mencabut padi yang telah tumbuh. Faktor cuaca yang ekstrim menyebabkan lahan kebanjiran dan mengakibatkan gagal panen juga sering dialami oleh masyarakat, akibat hujan lebat yang melanda. Harapannya tantangan yang telah dipaparkan dapat menjadi bahan dalam pengelolaan lahan pertanian masyarakat kedepannya. Selain itu, dengan adanya informasi ini dapat menjadikan masyarakat terus waspada dalam mengelola pertanian mereka.

### Kesimpulan

Kegiatan pertanian menjadi salah satu aspek kehidupan yang perlu dilaksanakan. Masyarakat di Kabupaten Landak dalam mengelola pertanian mereka sebagian besar masih menggunakan teknologi tradisional mulai dari pengolahan tanah hingga panen padi. Keberadaan teknologi penunjang pertanian masih terbatas sehingga pemakaiannya harus bergantian dan mengakibatkan lambatnya proses pertanian bagi sebagian masyarakat. Hal ini menyebabkan tumbuhnya padi juga tidak bersamaan dan membuat padi yang telah matang terlebih dahulu menjadi korban dimakan burung. Peristiwa ini membuat hasil panen tidak maksimal.

Tantangan yang dihadapi oleh para petani tidak hanya masalah penggunaan teknologi yang kurang memadai, melainkan juga masalah sumber daya manusia dan modal yang tidak cukup, serta lahan yang semakin berkurang karena banyak terjadinya alih fungsi lahan ke pembangunan pemukiman atau pengembangan perkebunan kelapa sawit. Sumber daya manusia yang ada merupakan usia tua yang lulusannya rata-rata sekolah dasar, sehingga pola pikir dalam pengembangan pertanian

menggunakan pengalaman dari generasi sebelumnya secara turun temurun. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat sering menjadi isu utama dalam berbagai penerapan program pembangunan khususnya pada pengembangan pertanian padi (Aminah et al., 2018). Sedangkan modal yang sedikit membuat masyarakat kurang memberikan pupuk pada tanaman padi mereka sehingga hasilnya kurang maksimal. Masyarakat terus bergantung kepada peran serta pemerintah dalam memberikan bantuan. Bantuan datang namun tidak digunakan dengan maksimal akibat pemerintah kurang dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat atas penggunaan yang telah mereka dapatkan.

#### Saran

Dalam kegiatan pertanian terjadinya sebuah masalah/tantangan merupakan hal yang wajar. Setiap tantangan yang telah dibahas sebelumnya merupakan hasil dari pengamatan penulis dan berbagai literasi dari internet. Tantangan-tantangan ini sangat sering dijumpai dalam kehidupan para petani, sehingga sudah menjadi hal yang biasa. Tentunya karena telah terbiasa, masyarakat diharapkan telah mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin terjadi. Peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Landak. Khususnya dalam memfasilitasi teknologi pertanian dan memberikan penyuluhan atau bimbingan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan bantuan yang telah diberikan. Tujuannya agar setiap bantuan yang ada dapat dimanfaatkan tepat guna sesuai kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, setiap tantangan yang telah dibahas sebelumnya dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang berguna bagi kehidupan petani di Kabupaten Landak dalam meningkatkan hasil pertanian padi di daerah ini.

## Daftar Pustaka

- Aminah, M., Hubeis, M., Widiatmaka, W., & Wijayanto, H. (2018). Obstacles Of Farmers Participation In Organic Rice Development In Tasikmalaya District. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(3), 330–338. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.3.330-338>
- Fitria. (2013). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Lahan, P., Di, P., Sooko, K., & Mojokerto, K. (n.d.). *Drs. Bambang Hariyanto, M.Pd.*
- Pratiwi, S. H. (2016). Growth and Yield of Rice (*Oryza sativa* L.) on various planting pattern and addition of organic fertilizers. *Gontor AGROTECH Science Journal*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.21111/agrotech.v2i2.410>

## BAB 17

### Operasionalisasi Program 3A Dalam Meningkatkan Kualitas Destinasi Pariwisata di Kotawaringin Barat

Sri Indah Kartikasari

#### Latar Belakang

Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan tengah. Kabupaten ini biasa dikenal dengan sebutan Pangkalan Bun dan di juluki sebagai Kota manis karena tempatnya yang sangat strategis untuk menunjang sektor wisata alam. Kota yang memiliki keindahan alam serta panorama yang sangat bagus ini menjadi incaran wisatawan lokal dan mancanegara. Karena nuansa dan suasana yang disuguhkan sangat khas dengan daerah Indonesia yang yang dikenal alami. Kotawaringin Barat memiliki luas wilayah sekitar 10.759 km<sup>2</sup>, maka tidak heran jika terdapat banyak wisatawan yang berkunjung ditambah dengan segar yang masih sangat kental didalamnya. Kotawaringin Barat memiliki arti yaitu gapura yang artinya pintu masuk. Sedangkan waringin sendiri memiliki arti sebagai pohon beringin yang bermakna pengayoman. Secara menyeluruh

Kotawaringin Barat ini memiliki arti yaitu pintu masuk pengayoman yang berasal dari sebelah barat.

Melihat dari latar belakang tersebut, tidak menutup kemungkinan jika kota ini memiliki jumlah penduduk yang begitu banyak. Dengan semboyan Marunting Batu Aji, penduduk Kotawaringin Barat selalu menerapkan pedoman selalu berusaha untuk mencapai kejayaan. Terdapat berbagai macam wisata di Kotawaringin Barat antara lain taman nasional tanjung puting yang dikenal dengan spesies orang utan, bekantan serta satwa langka yang hampir punah. Taman Nasional Tanjung Keluang yang tidak kalah cantiknya karena dikelilingi oleh pohon pinus yang rindang dan udaranya yang sangat sejuk serta desiran ombak yang besar. Istana Kuning yang identik dengan kayu berwarna kuning yang melambangkan sejarah kerajaan Kesultanan Kutaringin pada masanya. Pantai Teluk Bogam dengan deburan ombak dan angin segar khas pantai yang dapat menenangkan pikiran yang penat serta pasir yang sangat indah (Koentarto, I., & Hasaruddin., 2021).

Kotawaringin Barat merupakan daerah pariwisata yang menjadi sorotan pemerintah setempat karena dinilai memiliki potensi wilayah yang dapat menunjang pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah. Menjadi sorotan daerah wisata merupakan suatu hal yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat setempat, akan tetapi terdapat factor alam yang harus dihadapi pemerintah untuk menunjang stabilitasnya daerah wisata di Kotawaringin Barat. Seperti wisata alam taman nasional tanjung puting dari tahun ketahun banyak menghadapi masalah seperti pembalakan liar, penambangan emas illegal serta pembakaran hutan dan lahan untuk pemukaan lahan

baru. Masyarakat yang merusak lahan wisata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja secara terus menerus akan mengakibatkan kemerosotan lahan sektor wisata. Masalah seperti ini tentunya berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan serta minat wisatawan untuk berkunjung kembali. Hal ini dapat memberikan dampak degradasi pembangunan bagi masyarakat. Maka, program 3A ini dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan dalam sektor pariwisata.

Konsep 3A merupakan suatu konsep yang terdiri dari Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas. Perpaduan tiga hal tersebut harus dimiliki didalam sektor pariwisata, namun apabila komponen-komponen tersebut berdiri sendiri, maka komponen tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Konsep ini merupakan suatu system yang dapat menunjang produk pariwisata. Konsep ini telah berhasil diterapkan diberbagai daerah di Indonesia seperti Aceh dan Bali. menurut Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa telah menerapkan konsep 3A untuk memajukan serta menunjang sektor pariwisata. Konsep 3A ini dapat terlaksana dengan adanya bantuan dan perhatian dari pemerintah sebagai pemberi kebijakan serta partisipasi masyarakat setempat sebagai tuan rumah. Melalui konsep 3A, maka akan sangat membantu dalam upaya pembentukan serta peningkatan pariwisata yang dinilai mampu mendorong berbagai bentuk pembanguna wilayah Kotawaringin Barat, seperti peningkatan berbagai kualitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan wisata (Christanti, 2019).

## Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam essay ini adalah bagaimana peran penting operasional 3A yang diterapkan oleh pemerintah Kotawaringin Barat dalam mengatasi berbagai masalah internal maupun eksternal yang terjadi dalam sektor pariwisata yang semakin kompleks.

## Tujuan Essay

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan essay ini adalah untuk memberikan gambaran serta bukti nyata dalam penerapan operasional 3A dalam pengembangan pariwisata sebagai katalisator pembangunan yang dapat meningkatkan pendapat asli daerah serta menyejahterakan masyarakat.

## Pembahasan

Pembangunan ekonomi regional merupakan suatu proses yang di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya alam yang ada dengan membentuk suatu kemitraan/kesepakatan yang dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat daerah serta menekan angka kemiskinan. Setiap upaya yang dilakukan untuk pembangunan ekonomi regional maka perlunya kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Maka dari itu, saat ini sangat penting bagi pemerintah menjalankan perannya dengan memberikan suatu kebijakan seperti yang dilakukan Bupati Kotawaringin Barat dalam meningkatkan dan memajukan sektor pariwisata dengan menerapkan konsep 3A dengan bantuan partisipasi dari masyarakatnya. Mengapa kita harus melihat pada sektor pariwisata? Dalam rangka pembangunan ekonomi

regional, sektor pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan serta dapat menjadi katalisator untuk memajukan serta meningkatkan pembangunan sektor lainnya secara bertahap. Pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah seperti meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pertumbuhan industri pariwisata. Oleh karena itu di berbagai daerah lebih mengembangkan sektor kepariwisataan karena dinilai dapat mendorong pertumbuhan pembangunan perekonomian regional.

Persaingan yang semakin ketat dari hari ke hari membuat pemerintah harus sigap dalam memajukan kepariwisataan di daerahnya masing-masing. Sebagai contoh Provinsi Gorontalo yang memiliki tiga kawasan pengembang pariwisata unggulan yaitu Desa Botutonuo, Pantai Olele, dan Lombongo. Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa terjadinya penurunan pengunjung yang sangat signifikan dari tahun ke tahun mengakibatkan penurunan pendapatan daerah. Permasalahan ini dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain disebabkan oleh banyaknya fasilitas serta pengelolaan destinasi yang sudah tidak layak guna atau kurang baik, fasilitas pelayanan yang diberikan dinilai masih jauh dari standar kepuasan wisatawan, serta cuaca yang tidak menentu yang dapat mengakibatkan pengunjung yang sudah tiba kecewa karena cuaca yang kurang mendukung. Semakin menurunnya pengunjung serta penyediaan fasilitas yang kurang baik merupakan bentuk krisis nyata dalam lingkungan Gorontalo. Maka dari itu Menteri Pariwisata RI Arief

Yahya menegaskan bahwa untuk mengembangkan pariwisata di Provinsi Gorontalo harus menggunakan konsep 3A. Hal itu disampaikan pada saat berkunjung ke destinasi objek wisata alam Lombongo di Kabupaten Bone Bolango.

Masalah lain yang dirasakan adalah di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki berbagai sektor pariwisata yang sangat menjanjikan dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah akan tetapi pembangunan industri pariwisata yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih terlihat sangat kurang. Hal ini dapat terlihat dari akses masuk ke daerah tempat wisata yang sempit, dan masih kurangnya area untuk tempat parkir, tidak adanya sarana umum seperti tidak adanya tempat sampah dan wc umum. Tidak hanya itu keamanan pun masih perlu diperhatikan melihat wisatawan yang berkunjung bukan hanya dari dalam daerah melainkan dari luar daerah. Kurangnya usaha pembangunan sektor pariwisata menimbulkan banyaknya lapangan pekerjaan yang seharusnya dikembangkan akan tetapi malah banyak melahirkan pengangguran. Hal ini didukung dengan pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen yang menyatakan bahwa ketiga aspek dari konsep 3A yakni Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas merupakan hal penting dalam pengembangan pariwisata. menurutnya strategi 3A merupakan salah satu kunci pertumbuhan sektor kepariwisataan di daerah Sulawesi Utara.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada dan membentuk suatu hubungan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru

dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Salah satu faktor pendukung pertumbuhan perekonomian yang saat ini telah berkembang dan menjadi salah satu industry terbesar adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata memegang peranan penting yang dapat menentukan serta menjadi katalisator untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Kawasan pariwisata yang saat ini sudah berkembang terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi untuk mengembangkan serta meningkatkan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat. Akan tetapi terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disampaikan oleh warga sekitar yang merasakan langsung dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Sebagai contoh dalam sektor pariwisata belum terkondisikan secara optimal dalam hal infrastruktur, sarana transportasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keramahtamahan dalam mewujudkan Kotawaringin Barat sebagai daerah tujuan wisata serta masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan kepariwisataan.

Dengan melihat situasi yang kritis ini pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sigap dalam mengentas permasalahan yang terjadi. Maka dari itu pemerintah setempat mencanangkan konsep dasar perencanaan pembangunan pariwisata yang berhasil diterapkan di berbagai daerah yaitu konsep 3A. Dengan kata lain bahwa daya tarik wisatawan, fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan Aksesibilitas merupakan pokok permasalahan yang

terjadi dalam sektor pariwisata. Permasalahan ini senada dengan Konsep 3A yang menjadi solusi bagi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Konsep 3A merupakan syarat minimal bagi pengembangan suatu destinasi wisata. Konsep 3A sendiri terdiri dari Atraksi, Amenitas atau Fasilitas dan Aksesibilitas, perpaduan dari ketiga konsep tersebut merupakan hal yang harus menjadi perhatian dalam sektor pariwisata,. Namun apabila salah satu dari ketiga hal tersebut tidak dilaksanakan dengan secara beriringan maka tidak dapat dikatakan sebagai produk pariwisata yang berhasil.

Konsep 3A ini merupakan konsep dapat meningkatkan pengembangan kualitas produk destinasi dan tata kelola yang mendukung pencapaian target pembangunan pariwisata setempat. Konsep 3A sendiri terdiri dari Atraksi, Amenitas atau Fasilitas serta Aksesibilitas. Aktraksi merupakan sebuah daya Tarik yang utama dalam sebuah destinasi wisata. Atraksi wisata merupakan segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh wisatawan, seperti dilihat, didengar, dilakukan bahkan dirasakan baik berupa daya tarik alam, hasil kreativitas masyarakat dan budayanya. Menurut Anugrah (2017) atraksi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Atraksi wisata alam, meliputi pantai, iklim, bentang alam, bentukan geografis lain dari suatu destinasi dan sumber daya lainnya.
- b. Atraksi buatan manusia yaitu berupa pembangunan infrastruktur pariwisata termasuk bangunan bersejarah dan modern, monument, jalan raya serta taman dan kebun.

- c. Atraksi wisata budaya, meliputi berbagai cerita rakyat dan sejarah yang terdapat di daerah tersebut, teater musik dan tari-tarian. Atraksi wisata budaya ini nantinya dapat dikembangkan menjadi suatu pertunjukan atau festival.
- d. Atraksi wisata sosial, yaitu berupa kegiatan-kegiatan atau pertemuan sosial yang dapat meningkatkan relasi.

Atraksi wisata yang baik bukan hanya memiliki sumber daya alam yang baik akan tetapi dalam pengelolaannya juga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat. Dalam konsep atraksi ini pemerintah akan meningkatkan pembangunan diberbagai sektor wisata alam, wisata budaya, wisata sosial serta infrastruktur.

Konsep 3A selanjutnya adalah Amenitas atau Fasilitas. Amenitas merupakan suatu fasilitas pendukung suatu destinasi wisata berupa pelayanan dan fasilitas penunjang wisatawan ketika akan melakukan suatu kegiatan destinasi wisata. Fasilitas yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah adalah mulai dari hal yang sangat mendasar yaitu keberadaan Akomodasi berupa hotel, penginapan, desa wisata, villa dan sebagainya, Restoran meliputi makanan cepat saji sampai dengan makanan yang mewah serta tempat pembelian oleh-oleh dan segala daya dukung yang bisa menjadi pelengkap dalam kegiatan wisata, Fasilitas lain yang mendasar yaitu toilet, tempat ibadah, dan lahan parkir dan fasilitas transportasi berupa taksi, bus, bahkan penyewaan alat transportasi serta pelayanan lainnya. Kelengkapan dan kenyamanan dari Amenitas suatu daerah dapat mempengaruhi dalam

persentase kunjungan wisatawan dalam berkunjung ke daerah wisata.

Konsep yang terakhir adalah aksesibilitas. Aksesibilitas dimaksud sebagai segenap sarana yang dapat memberikan kemudahan serta keluasan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi dan tujuan. Akses ini berupa akses informasi dan akses transportasi. Akses informasi dapat berupa informasi tentang daya tarik suatu destinasi wisata, fasilitas serta hal hal yang dapat membantu wisatawan dalam berwisata. Akses informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai promosi yang dilakukan destinasi wisata guna untuk memperkenalkan wisata alam hingga mancanegara. Akses informasi bisa juga berupa ketersediaan pusat informasi wisatawan yang biasa dikenal dengan TIC (Tourist Information Center) yang memudahkan wisatawan mendapatkan informasi dalam berwisata. Selain akses informasi terdapat juga akses transportasi. Akses transformasi ini dapat berupa ketersediaan transportasi umum seperti pesawat, kapal, kereta api, bus atau transportasi lain yang dibutuhkan wisatawan untuk menjangkau suatu destinasi wisata. Selain itu pengawasan serta keamanan dalam berwisata tidak lepas dari control yang baik dari pemerintah daerah.

Merujuk pada konsep 3A diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menjadikan destinasi pariwisata Kotawaringin Barat sebagai prioritas utama yang perlu dilakukan percepatan pengembangan destinasi dengan menerapkan konsep 3A. Karena konsep 3A ini dalam penerapannya dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas produk destinasi dan tata kelola pariwisata untuk mendukung pencapaian pembangunan kepariwisataan. Pengembangan serta pembangunan dalam

sektor pariwisata yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan terpadu merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas produk destinasi. Dengan upaya tersebut masyarakat akan mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi dalam pengembangan sektor pariwisata sehingga nantinya akan menambah pendapatan masyarakat. Dengan meningkatkan kontribusi dalam sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sasaran yang ingin dicapai pemerintah adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas dari segala aspek sektor pariwisata, serta dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan terpasarkannya destinasi wisata hingga ke kancah dunia.s

Peran Pembangunan dalam sektor pariwisata dikatakan berhasil apabila pembangunan tersebut melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga dalam proses pembangunan dapat memberikan keuntungan dari segi perekonomian, sosial maupun budaya. Penerapan konsep 3A yang dicanangkan oleh pemerintah Kotawaringin Barat dalam sektor pariwisata tidak lepas dari peran aktif masyarakat. Masyarakat sebagai tuan rumah memiliki peran yang sangat dominan dalam pembangunan perekonomian sektor pariwisata. Peran serta masyarakat dalam peningkatan pembangunan dinilai sebagai penunjang keberhasilan suatu program yang diterapkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup serta kualitas masyarakat. Maka dari itu, selain dukungan serta perhatian penuh dari pemerintah setempat diharapkan dalam

penerapan perencanaan pengembangan 3A yang dilakukan pemerintah diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat dengan keikhlasan untuk dapat berpartisipasi penuh dan mendukung rencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan essay yang telah di jelaskan sebelumnya dapat di simpulkan bahwa dalam sektor pariwisata di Kotawaringin Barat memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan perekonomian regional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Akan tetapi kurangnya fasilitas infrastruktur yang baik dapat menimbulkan berbagai gejala sosial seperti pengangguran, lemahnya pendapatan dalam sektor wisata, serta kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh fasilitas yang kurang baik, standar pelayanan yang lemah, lemahnya kontribusi dari masyarakat sekitar serta lemahnya peran aktif pemerintah. Maka dari itu dinas kebudayaan dan pariwisata Kotawaringin Barat menerapkan kebijakan 3A sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Diharapkan dengan terealisasikannya program 3A dapat menunjang sektor pariwisata menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sukses tidaknya suatu program disuatu daerah bergantung lagi kepada partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Karena meningkatkan pembangunan perekonomian di sektor pariwisata dapat memberikan pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang dapat menekan angka kemiskinan dan

pengangguran sehingga dapat terciptakannya masyarakat yang sejahtera.

#### Saran

Diharapkan setelah permasalahan yang terjadi pemerintah disarankan untuk lebih mendorong aktivitas perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi. Meningkatkan jumlah pengunjung wisatawan dengan diadakannya suatu promosi, serta komunikasi dan pembinaan terhadap industri kepariwisataan, sehingga nantinya kontribusi jumlah wisatawan yang datang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah harus melakukan penataan ulang objek wisata agar dapat menjadi sorotan bagi wisatawan. Memperbaiki sarana dan prasarana objek wisata dan akses transportasi untuk menuju ke tempat objek wisata. Diharapkan pemerintah Kotawaringin Barat dapat mengembangkan objek wisata dengan tetap melestarikan tradisi, nilai, dan adat istiadat setempat melalui penyelenggaraan event-event daerah. Sehingga objek wisata yang ada lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan dalam sektor pariwisata.

#### Daftar Pustaka

- Anugrah, K. (2017). Pembangunan Pariwisata Daerah Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia . *JUMPA*, 41. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jumpa/article/download/34045/20549>
- Christanti, E. (2019). Implementasi Kebijakan Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal Studi Kasus Kabupaten Kotawaringin Barat . *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 11.

Diakses

dari

<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/download/1343/pdf>

Koentarto, I., & Hasaruddin. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan Pelaku Wisata Terhadap Tingkat Kepuasan Wisatawan Mancanegara Di Taman Nasional Tanjung Puting . *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen*, 13.

## BAB 18

### Peningkatan Perekonomian Masyarakat Lokal Melalui Pengembangan Daerah Pesisir Sebagai Tempat Pariwisata Di Sumba

Angelina Kamila Lalo

#### Latar Belakang

Pesisir adalah daerah transisi dari lingkungan perairan dan lingkungan daratan. Menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang manajemen daerah pesisir dan pulau kecil, area cakupan pengaturan daerah pesisir dan pulau meliputi daerah transisi darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, kearah darat mencakup wilayah ke arah laut yang jaraknya 12 mill laut dari garis pantai saat pasang maksimal kearah laut dan kearah perairan kepulauan (Dahuri, R., 2001).

Pengembangan daerah pesisir sebagai tempat pariwisata di Sumba, yakni Sumba menjadi daya tarik yang masuk dalam *the most beautiful island in the world*, namun sayangnya pemberdayaan kekayaan alam dan keindahannya dominan dimiliki oleh investor asing dan kerap membuat masyarakat lokal yang kurang akan referensi menjadi kalah saing dan tak berkembang sehingga tetap berada dibawah garis kemiskinan dan para investor asing ini sama kurang memberi perhatian seperti lapangan kerja bagi masyarakat lokal sebab para karwayan dikirim dari luar Pulau Sumba .

Daerah pesisir Sumba yang dimiliki masyarakat kian sedikit dan hampir dalam satu desa disewakan pada pihak luar. Terancam kalah dengan milik pihak luar yang membeli daerah pesisir, karena itulah pengembangan potensi wilayah pesisir perlu dilakukan sebagai bagian menjaga warisan leluhur dan meningkatkan peluang ekonomi masyarakat lokal sebagai tuan tanah. Sebagian besar daerah pesisir di Pulau Sumba telah dibangun hotel, villa, resort dan tempat pariwisata lainnya yang bermodel modern dan kurang mencirikan kekayaan kebudayaan Sumba Sendiri.

Di daerah Pesisir Sumba Masyarakat lokal berkecimpung dalam pemanfaatan daerah pesisir secara mikro seperti budidaya taman laut melalui pelestarian terumbu karang dan biota laut lainnya, tambak garam, tambak kepiting, kerang, rumput laut untuk dijual sebagai bahan mentah dengan hasil jual yang terbilang kecil, tidak sama seperti investor asing yang membangun kawasan villa, hotel, restaurant, café dan lainnya yang mengurangi nilai kebudayaan dan merusak beberapa objek alam.

Melalui program BBC melakukan pendampingan di beberapa daerah pesisir di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya dengan target Pengembangan wisata daerah pesisir oleh masyarakat lokal dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui sumber daya alam daerah pesisir seperti garam, ikan, cumi-cumi, rumput laut dan kekayaan laut lainnya.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai permasalahan peningkatan perekonomian masyarakat lokal melalui pengembangan daerah pesisir sebagai tempat pariwisata di Sumba maka rumusan masalah dalam essay ini adalah “Bagaimana memaksimalkan potensi daerah pesisir Sumba dengan memadukan kekayaan alam dan unsur kebudayaan sebagai destinasi wisata, agar masyarakat lokal dapat

mempertahankan kebudayaan dan kekayaan alam tidak dieksploitasi oleh sector wisata yang cenderung modern dimata publik.

### Tujuan

Tujuan dari uraian diatas adalah untuk memberi informasi bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat lokal sebagai tindakan pemanfaatan dan pelestarian kebudayaan daerah pesisir Sumba sebagai destinasi wisata serta tidak merusak kekayaan alam yang ada.

### Pembahasan

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan. Dimana laut dan daerah pesisir menjadi potensi yang dominan menopang kehidupan masyarakat khususnya di daerah Sumba. Maka perlu perhatian pemerintah dalam mengelola, memperhatikan dan memaksimalkan kekayaan laut dan daerah pesisir. Namun yang ditekankan dalam tulisan ini adalah upaya pengembangan perekonomian masyarakat lokal melalui peningkatan daerah pesisir dalam bidang pariwisata yang berbasis kebudayaan dan potensi alam yang ada. Sehingga masyarakat pun dapat memiliki lapangan pekerjaan sendiri.

Pengembangan daerah pesisir berbasis pariwisata ini kurang mendapat perhatian pemerintah karena program pembangunan didaerah Sumba lebih condong ke daerah daratan yang jauh dari pesisir. Hal Seperti privatisasi atau adanya kebijakan ‘memunggunji” yakni membiarkan kepemilikan kawasan pesisir pada pihak luar menekan kesempatan masyarakat lokal memiliki peluang yang sama seperti yang terjadi di pulau seberang Sumba, yakni pulau Timor. Yang kawasan pesisir panjang/teluk kupang dimiliki oleh pengusaha luar. Sehingga masyarakat dengan perekonomian atau modal yang sedikit susah mendapat ijin. Akhirnya masyarakat memilih untu mencari usaha yang lain agar dapat bertahan.

Semakin terkikisnya wilayah kelola masyarakat lokal pesisir. Hal ini membawa masalah lanjutan seperti dengan adanya hotel, villa, restaurant dan lainnya yang dimiliki oleh NIHIWATU di daerah barat Sumba, Lamboya mendapat keluhan dari para nelayan bahwa mereka kesulitan untuk mendapat daerah kosong untuk membawa perahu untuk menjala ikan. Akses publik pun berkurang sebagai tempat wisata masyarakat sekitar. Para aktivis Sumba juga melakukan protes pada pemerintah agar tidak lagi memberi kawasan-kawasan pesisir pada investor luar. Namun memberi kesempatan pada desa setempat untuk memanfaatkannya sebagai salah satu program memberdayakan masyarakat.

Dalam perspektif keadilan pemerintah harusnya mulai membuka jalur khusus untuk pemberdayaan masyarakat Sumba. Sekarang mulai banyak yang berkecimpung dibidang pariwisata daerah pesisir. Seperti banyak UMKM yang memiliki travel trip sendiri contohnya Rumah Budaya Sumba yang didirikan oleh seorang Pastor katolik yang bekary memperkenalkan Kebudayaan adat, alam serta tradisi Sumba dengan membangun beberapa villa dan homestay di Pantai Weekelo, Sumba Barat Daya, yang mana para karyawan yang direkrut pun orang-orang lokal yang diberi beberapa keterampilan. Dan lucunya bahwa pajak yang diberikan pada investor asing dan masyarakat lokal sama.

Pada tahun 2017 Nusa Tenggara Timur terpilih menjadi tuan rumah daerah Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) WALHI karena terancam bencana ekologis daerah pesisir. Salah Satu faktornya adalah ekspansi industry pariwisata di Sumba. Karena bisa dilihat daya dukung pemerintah atas kasus seperti ini masih sangat minim. Sehingga beberapa langkah rasional dan konkrit yang harusnya diambil pemerintah adalah harus mewujudkan kemandirian rakyat lokal, memberi modal berupa materil dan support lainnya yang bisa digunakan untuk pengembangan pariwisata pesisir. Pemerintah harus melakukan

prioritas pada pengembangan usaha masyarakat lokal ini dan memberi kejelasan kontrak kerja, mulai dari pelestarian ekologis, membangun mitra kerjasama dengan pihak swasta asing (turis), membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, pembagian *outcome*, pajak wisata dan lainnya yang dibutuhkan dalam proses pengembangan.

Banyak pengusaha lokal yang membangun hotel di daerah pesisir namun kalah dalam bersaing. Terdapat banyak juga beberapa tempat konservasi budidaya hewan laut yang langsung dijual menjadi bahan baku tanpa diolah agar nilai jualnya lebih tinggi. Ada juga tempat-tempat makan *seafood* yang makanannya dijual sangat murah karena tempatnya kumuh atau tidak tertata. Bisa dilihat bahwa masyarakat lokal berupaya sesuai modal dan pengetahuan mereka hanya saja kurang perhatian dan bantuan pemerintah bagi usaha mereka. Bantuan modal dan menurunkan tenaga ahli diperlukan dalam memberikan pembekalan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Jika dibandingkan dengan hotel, villa, restaurant dan kawasan wisata milik pihak luar sangat signifikan. Mereka membangun hotel mewah didekat kampung-kampung adat yang hari demi hari merayu penduduk menjual tanah mereka dengan harga murah dan iming-iming diberi pekerjaan ditempat mereka. Sehingga sudah banyak rumah adat dan situs daerah yang mulai hilang. Setelah rumah yang terkikis kini tempat tunggu mencari nafkah para nelayan dan budidaya tambak setempat digilas habis. Semakin minim masyarakat yang bekerja di daerah pesisir karena wilayahnya telah diprivatisasi dan dilarang untuk umum.

Kemudian pemerintah juga harus membuat kebijakan yang membatasi kepemilikan luas wilayah investor asing atas daerah pesisir. Agar program daerah yang akan menjadikan Sumba sebagai *The ring of beauty* dapat tercapai dengan memanfaatkan potensi masyarakat lokal. Beberapa Pengusaha lokal contohnya Hotel Lelewatu telah mencoba membangun resort mewah berbasis alamiah yang struktur bangunannya mirip

dengan rumah adat Sumba, serta hotel, villa dan restaurant yang dibuat pun sangat bercorak kedaerahan. Ditambah lagi didaerah pesisir ini mereka membentuk wisata karang sehingga wisatawan dalam melakukan *diving* dan melihat beragam kekayaan alam. Kemudian terdapat tempat toko-toko pernak-pernik laut yang telah dikeringkan dan dibuat sangat menarik menjadi kalung, anting, gelang dan lain-lain

Bukan hanya Hotel yang bisa dibangun namun juga budidaya lobster, kepiting, cumi serta hewan lautnya lainnya yang dijadikan bahan baku pembuatan seafood pada corner food didaerah pinggiran. Karena diSumba terdapat beberapa festival adat yang dibuat di pinggir pantai maka banyak peluang masyarakat lokal menjajakan olahan makanan khas daerah. Turis yang datang bukan saja memerlukan tempat tinggal yang nyaman atau makanan yang enak. Mereka juga pasti tertarik dengan adanya tari-tarian tradisional yang dapat ditampilkan dari sanggar tari masyarakat Sumba. Apalagi jika bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah bisa juga menjalin kemitraan dengan swasta luar untuk memberi modal pada masyarakat. Modal yang didapat otomatis dapat mempercepat pengembangan wisata. Pembangunan hotel, villa dan homestay pun bercorak kedaerahan dapat dibuat, restaurant yang menyajikan makanan khas daerah, pada akhirnya, apa yang diharapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Sektor perekonomian meningkat dan masyarakat pun mendapat peluang meningkatkan taraf hidup dan memberi lapangan pekerjaan pada masyarakat lokal. Ditambah dengan menjaga kelestarian budaya dan alam.

## Kesimpulan

Peningkatan perekonomian masyarakat lokal melalui pengembangan daerah pesisir sebagai tempat pariwisata di Sumba merupakan target esensial dalam pengembangan ekonomi dan sub kultur eksistensi terus dijaga. Sehingga kerjasama antar

cross lini harus diperhatikan baik pemerintah dan kebijakannya, swasta dan kemitraannya serta masyarakat dan usaha peningkatan wisata daerah pesisir (Fitri, 2014; Razali, 2004). Terdapat banyak privatisasi yang harus digencar dihilangkan sehingga ruang public masih bisa dirasakan oleh masyarakat lokal daerah. Sehingga dalam zaman revolusi industry 4.0 masyarakat yang suprastruktur dan infrastruktur yang masih berkembang dapat dipercepat dengan modal pariwisata dan memaksimalkan semua segi kehidupan yang ada. Sebab suatu daerah dapat berkembang dan menstabilkan ekonominya harus dibantu pendapatan yang datang bukan hanya dari APBD (Hakim, 2013).

Menurut paham saya upaya peningkatan perekonomian masyarakat lokal melalui pengembangan daerah pesisir sebagai tempat pariwisata di Sumba. Dari segi pemerintahan mengurangi privatisasi area pesisir oleh masyarakat luar atau swasta asing serta mengurangi jual beli tanah, berikut membentuk kebijakan yang dalam upaya membantu masyarakat lokal mengembangkan usaha daerah pesisir dalam sector wisata. Baik Pemerintah dan Masyarakat Lokal bekerjasama dalam proses pembangunan. Masyarakat lokal pun harus menemukan inovasi sehingga bisa bersaing dengan swasta asing, menjalin kemitraan agar memperluas jaringan bisnis dan lainnya. Sehingga alam dan budaya dapat dilestarikan di era modern seperti ini yang dimanfaatkan sekaligus sebagai tempat wisata daerah pesisir.

#### Daftar Pustaka

Dahuri, R. (2001). *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah . Siosial dan Pembangunan.*

- Fitri, D. (2014). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan. *Tesis Universitas Andalas*
- Hakim, M. F. (2013). Blue Economy Daerah Pesisir Berbasis Kelautan dan Perikanan. *Economics Development Analysis Journal*.
- Razali, I. (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Laut. *Ilmu Kesejahteraan Sosial*.

## BAB 19

### Peran Pemerintah Kota Palangkaraya dalam Mempromosikan Wisata Kuliner melalui Pelibatan UMKM

Dicky Maulana Saputra

#### Latar belakang

Wisata memiliki peran dan dampak dalam perkembangan di suatu daerah salah satunya yaitu perkembangan ekonomi. Sebagai suatu negara yang memiliki banyak perbedaan di setiap daerahnya yang meliputi banyak hal. Indonesia sebagai negara yang beragam tentu memiliki cara untuk memperkenalkan keberagaman tersebut kepada seluruh orang. Yang menarik dan menjadi daya tarik salah satunya yaitu makanan khas daerah. Melalui wisata kuliner makanan khas daerah dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, tidak hanya wisatawan lokal, tetapi juga pendatang atau wisatawan asing yang hadir dari luar negeri mampu mengenal makanan khas daerah yang ada di seluruh daerah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, Wisata di Indonesia melalui wisata kuliner mampu menumbuhkembangkan makanan khas asli daerah yang semakin berkembangnya zaman mulai kalah bersaing dengan makanan

modern dan *fastfood*. Melalui wisata kuliner ini juga mampu berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran untuk meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan kuliner khas daerah dapat memberikan kontribusi untuk keberlanjutan sektor pariwisata (Araujo, 2016). Terealisasi nya kemajuan sektor wisata kuliner yang ada di Indonesia diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat dan kerja sama pihak yang mengelola wisata kuliner tersebut. Perlu dibuat sebuah usaha untuk mengangkat potensi ekonomi dengan memberi dukungan agar nantinya mampu menarik minat para wistawan. Di Era globaliasi sekarang konsep tempat dan usaha kuliner lokal harus mampu bersaing dengan usaha kuliner seperti restoran yang tidak hanya memanjakan lidah tetapi juga memanjakan mata.

Keberadaan wisata kuliner tentu saja mampu memperkenalkan makanan khas yang ada di daerah tersebut sekaligus menyadarkan kembali masyarakat setempat yang mulai terpengaruh dengan adanya pergeseran budaya. Kalimantan Tengah sebagai Provinsi yang memiliki kurang lebih sekitar 30 tempat wisata alam selama ini terfokus pada sektor tersebut, suasana alam dan lekuk sungai yang terlihat layaknya hutan amazon menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan salah satunya banyak tersedianya jasa susur sungai menggunakan kapal, serta melihat dan tau latar belakang hewan endemik yang berada di penangkaran menjadikan wisata dengan konsep ini mampu memberikan edukasi serta pengalaman baru untuk wisatawan. Wisata alam yang ada di Kalimantan Tengah berkembang dan berjalan cukup baik yang secara tidak langsung jugamengenalkan kondisi geografis maupun keunikan yang adadisana, selanjutnya perlu untuk menghidupkan wisata kuliner yang kurang mendapat perhatian serta kurang mendapat partisipasi dari masyarakat terutama di Kota Palangkaraya. Sebagai Ibu kota Kalimantan Tengah tentu daerah ini menjadi pusat bisnis bagi para pengusaha, data rekapitulasi UMKM

khususnya di kota Palangkaraya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ada sekitar 7,296 usaha dari berbagai sektor. Untuk mengenalkan makanan khas daerah melalui wisata kuliner Pemko perlu mengajak dan mendukung para pengusaha kuliner untuk berpartisipasi dalam menumbuhkembangkan makanan khas daerah untuk siap bersaing dengan usaha kuliner makanan cepat saji dan kuliner modern.

Dilansir pada [wartaekonomi.co.id](http://wartaekonomi.co.id) (11/11/2017), Wakil Wali Kota Palangkaraya mengatakan bahwa produk kuliner yang memiliki kekhasan merupakan salah satu yang paling dicari oleh wisatawan yang berkunjung di suatu daerah sehingga pihaknya terus mendorong keberadaan pengusaha kuliner di Kota Palangkaraya mampu untuk menyajikan makanan khas daerah. Mengajak agar pengusaha kuliner terus berkreasi dan berinovasi, namun tetap menyajikan kekhasan daerah nya. Karena sebagai ibu kota, Palangkaraya menjadi tujuan utama para wisatawan, berdasarkan pengalaman pribadi penulis kebanyakan yang ditemukan yaitu tempat seperti cafe yang menyajikan kuliner modern, Bahkan untuk usaha kuliner seperti cafe sendiri hampir tersebar disetiap jalan yang ada di Palangkaraya. Tentu ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat, adanya pergeseran budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan. Akibatnya masyarakat menjadi terbiasa untuk membeli makanan cepat saji dan budaya nongkrong di cafe, hal ini menjadikan masyarakat lupa bahwa ada makanan khas asli daerah yang perlu dilestarikan dan didukung melalui wisata kuliner.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa persoalan mengenai daya tarik wisata kuliner yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palangkaraya, sebagaimana telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam essay ini adalah bagaimana Pemerintah KotaPalangkaraya mampu mendorong para pengusaha kuliner untuk mampu menarik dan meningkatkan minat para wisatawan. Dan kebijakan apa yang

diambil Pemerintah Kota Palangkaraya dalam memperkenalkan makanan khas daerah.

#### Tujuan Essay

Dari uraian diatas, essay ini bertujuan untuk memperoleh kebijakan yang tepat dalam memperkenalkan dan menarik minat wisatawan terhadap wisata kuliner yaitu makanan khas daerah dan meningkatkan pendapatan para pengusaha kuliner tersebut terutama UMKM di kota Palangkaraya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya.

#### Pembahasan

Dalam melihat potensi yang mampu meningkatkan pendapatan daerah serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerintah daerah sendiri tentu harus memperhatikan hal tersebut. Pembangunan ekonomi di daerah perlu diperhatikan guna meningkatkan serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi yang harus dikembangkan dan mampu jadi daya tarik dalam menunjang pembangunan ekonomi yaitu kepariwisataan di sektor wisata kuliner. Pemerintah daerah sendiri memiliki peran besar, disisi lain perlu untuk berkerjama dan mendorong para pengusaha kuliner untuk mempromosikan kulinernya. Ada keputusan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk mampu menarik minat para wisatawan.

Pemerintah daerah di daerah lain juga memiliki permasalahan yang sama mengenai potensi wisata kuliner. Ada peluang yang mampu dimanfaatkan untuk menarik minat para wisatawan dan bagi pemerintah daerah sendiri ini mampu meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya untuk mendorong sektor wisata kuliner karena mereka memiliki beragama kuliner tradisional yang melekat dengan kebudayaan yang ada disana. Cita rasa dan penyajiannya yang khas diharapkan mampu menarik minat serta menggugah selera para wisatawan. Menurut (Rahman, 2018) bahwa wisata kuliner yang ada di Kabupaten Sumenep mampu dikembangkan dengan baik melalui peningkatan kualitas pengusaha kuliner dengan

memberikan pelatihan, serta pengembangan sarana penunjang dan kelembagaan.

Pergeseran budaya di berbagai daerah akibat masuknya budaya dari luar juga mempengaruhi minat masyarakat terhadap kuliner yang ada. Datangnya kuliner seperti *fast food* yang banyak tersedia mulai dari restoran hingga tempat yang lebih minimalis seperti stand mengakibatkan semakin menurunnya minat masyarakat terhadap kuliner khas daerah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri mendukung para pengusaha kuliner tradisional khususnya makanan sate ayam khas Ponorogo untuk bersaing dengan para pengusaha makanan cepat saji. Disisi lain ada kebijakan yang dibuat untuk mendorong para pengusaha kuliner untuk terus menyajikan kuliner khas daerah. Menurut (Wardani & Dj, 2017) bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo ikut serta dalam melestarikan kuliner khas daerah berupa promosi melalui pameran, internet maupun media lainnya, dan memberikan perlindungan terhadap kuliner khas daerah dalam persaingannya dengan makanan cepat saji. Serta memberikan pengarahan maupun penyuluhan kepada para pelaku usaha.

Untuk mampu menarik minat wisatawan pemerintah daerah sendiri perlu melakukan kerja sama dengan para pengusaha kuliner yang menyajikan kuliner terutama kuliner khas daerah. Perlu adanya diskusi langsung antara keduanya untuk mendapatkan sebuah solusi yang tepat agar nantinya tidak saling merugikan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Palangkaraya memiliki peran besar didalamnya untuk menyusun program-program yang dapat mengembangkan potensi wisata kuliner. Ada kurang lebih sekitar 13 kuliner khas Kalteng yang dapat dipromosikan dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Pengusaha kuliner yang diajak bekerjasama tentu harus memiliki kualitas dalam penyajian serta cita rasa kuliner, ini tentu menjadi apresiasi tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung.

Hadirnya wisatawan ke Palangkaraya karena destinasi wisata alam yang memang menjadi sektor favorit, harusnya mampu

dimanfaatkan oleh Pemko untuk sekaligus memperkenalkan kuliner khas nya. Dengan memberikan kesempatan para pengusaha kuliner membuka usaha di tempat-tempat wisata alam, tentu hal ini setidaknya mampu menarik minat pengunjung. Strategi ini membuat wisatawan mengenal kuliner khas nusantara yang tersedia disana. Salah satu caranya yaitu dengan menyediakan tempat seperti stand untuk berjualan bagi pengusaha kuliner di dalam lingkungan wisata alam. Lalu pemko dapat memfasilitasi pengusaha kuliner yang bertempat tinggal jauh dari lokasi wisata alama seperti menyediakan kendaraan antar jemput.

Untuk membantu para pengusaha kuliner khas daerah, Pemko perlu melakukan promosi dengan mencoba menyedot perhatian dari banyak pihak. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan menggelar festival acara kuliner yang tentunya melibatkan para pelaku usaha itu sendiri. Diadakannya festival tersebut tentu banyak pihak menyoroti tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga para awak media. Adanya festival tersebut tentu berdampak besar kedepannya, kegiatan seperti ini mampu menyadarkan kembali masyarakat bahwa ada kuliner tradisional yang harus didukung dan dilestarikan. Disisi lain ini sekaligus menjadi tempat promosi untuk dapat menarik minat para wisatawan lokal maupun asing terutama di sektor wisata kuliner.

Perkembangan teknologi sendiri harus mampu dimanfaatkan oleh pemko dalam membantu para pengusaha kuliner untuk menarik minat wisatawan. Dilansir pada [cyberthread.id](https://www.cyberthread.id) (20/2/2020) menunjukkan bahwa ada sekitar 338,2 juta pengguna smartphone di Indonensia dan 175,4 juta pengguna internet. Dalam hal ini, Pemko perlu memberikan informasi kepada para wisatawan apa saja kuliner khas di Kalimantan Tengah melalui laman atau situs resmi Pemko. Tersedianya informasi memudahkan wisatawan mengenal wisata kuliner apa saja yang ada (Besra, 2012). Setelah mengenal kuliner khas daerah, strategi selanjutnya yaitu mulai mempromosikan produk kuliner khas

daerah dari para pengusaha kuliner, hal ini mampu membantu dan mempermudah mereka dalam menjalankan bisnisnya. Maka strategi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan media sosial, strategi ini mampu membuat kuliner tradisional bersaing dengan kuliner modern yang rata-rata mempromosikan kuliner nya melalui media sosial.

Berbagai strategi yang diterapkan Pemko untuk menarik minat para wisatawan, perlu diiringi dengan kebijakan yang mendukung serta melindungi para pengusaha kuliner itu sendiri. Kebijakan pertama yang dapat diterapkan oleh pemko adalah bagaimana agar para pengusaha kuliner nantinya memiliki bekal. Pemko dapat melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan kebijakan penyelenggaraan pelatihan untuk para pengusaha kuliner. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini memberikan kesempatan kepada pengusaha kuliner agar meningkatnya kualitas pengusaha kuliner dalam hal penyajian, meningkatkan kapasitas nya, memperluas kemitraan, mendapat solusi dalam menghadapi permasalahan usaha, serta motivasi dan dorongan kepada pengusaha kuliner. Ketika promosi wisata kuliner yang dilakukan Pemko berhasil menarik minat para wisatawan, maka juga tidak ada masalah internal dari setiap para pengusaha kuliner ketika menjalankan usahanya dan ketika melayani para wisatawan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap makanan dan minuman khas daerah, Pemko dapat mengeluarkan kebijakan dengan lebih memberi kesempatan para pengusaha kuliner khas daerah untuk melakukan promosi melalui pameran. Pameran yang tidak harus megah namun mampu menarik perhatian masyarakat setempat. Pameran yang di dalamnya menyajikan seluruh kuliner khas Kalteng. Dibuat dengan konsep yang modern namun tetap berbau budaya lokal, menyajikan tarian daerah dan musik tradisional, serta melibatkan para anak muda didalam pelaksanaannya. Tentu adanya peran anak muda mampu mengajak generasi milenial lainnya untuk ikut melestarikan

kuliner khas daerah, memberi kesan kepada mereka bahwa tidak hanya kuliner modern saja yang memiliki cita rasa yang enak, tetapi kuliner tradisional juga. Adanya pameran seperti ini juga membantu meningkatkan ekonomi para pengusaha kuliner.

Untuk memusatkan wisata kuliner dan memudahkan para wisatawan yang berkunjung, Pemko sebenarnya sudah membangun taman kuliner Tunggal Sangomang di jalan Yos Sudarso yang diresmikan pada tanggal 5 Februari 2018. Taman kuliner ini dibangun dengan konsep unik dimana para pengusaha kuliner menggunakan kontainer sebagai tempat berdagang yang menghadap ke arah jalan raya. Berdasarkan pengalaman pribadi penulis ketika mengunjungi taman kuliner tersebut, tidak menemukan banyak tempat kuliner yang menyajikan kuliner khas Kalteng dan justru didominasi makanan *seafood*, serta ada beberapa yang harus diperbaiki terutama masalah penerangan di area sepanjang jalan taman kuliner karena area ini tidak berada di pusat kota, lalu untuk tempat parkir kendaraan roda empat sendiri menggunakan bahu jalan, masalah bisa saja datang ketika tempat tersebut sangat ramai dan tempat parkir di bahu jalan sudah penuh. Penulis juga mencoba meminta pendapat beberapa pengunjung yang pernah datang ke taman kuliner Tunggal Sangomang, mereka mengatakan bahwa tempat tersebut bagus dan cocok untuk bersantai bersama teman ataupun keluarga, namun mereka juga mengeluhkan beberapa tempat yang selalu berubah-ubah dalam mematok harga makanan dan minuman, dan sebagian pengunjung berharap kualitas cita rasa kuliner dapat ditingkatkan. Kebijakan yang dibuat Pemko dalam hal ini sudah cukup membantu para UMKM, hanya saja perlu adanya profesionalitas dari para pengusaha kuliner dan kualitas rasa yang baik dalam penyajian kuliner.

## Penutup

Pemko dapat mendorong pengusaha kuliner untuk menarik dan meningkatkan minat para wisatawan dengan memberikan

kesempatan para pengusaha kuliner membuka usaha di tempat-tempat wisata alam. Pemko perlu mempromosikan kuliner dengan mencoba menyedot perhatian dari banyak pihak yaitu dengan menggelar festival acara kuliner yang tentunya melibatkan para pelaku usaha itu sendiri. Memanfaatkan perkembangan teknologi dengan promosi yang dilakukan melalui laman atau situs resmi pemko ataupun melalui medsos. Kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemko yaitu melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan kebijakan penyelenggaraan pelatihan untuk para pengusaha kuliner. Kebijakan dengan lebih memberi kesempatan para pengusaha kuliner khas daerah untuk melakukan promosi melalui pameran. Lalu yang terakhir dengan adanya taman kuliner, Pemko perlu menambah penerangan di area sepanjang jalan taman kuliner Tunggal Sangomang dan profesionalitas yang perlu ditunjukkan para pengusaha kuliner di tempat tersebut serta cita rasa yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan ini tidak akan menjadi program yang berhasil jika hanya dibebankan kepada pemko saja, perlu respon yang baik serta kualitas yang mempunyai baik dalam pelayanan dan cita rasa kuliner yang disajikan dari para pengusaha kuliner itu sendiri.

Diharapkan Pemko dapat memaksimalkan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada pengusaha kuliner. Pemko lebih sering mengadakan kegiatan pameran untuk mengenalkan kuliner khas kalteng terutama di wilayah taman kuliner Tunggal Sangomang untuk menarik pengunjung. Untuk pengusaha kuliner sendiri agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Pengusaha kuliner mampu menciptakan inovasi-inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat. Serta pengusaha kuliner menyediakan wadah seperti website khusus untuk pengunjung maupun wisatawan agar dapat berkomentar dan mengkritik kualitas rasa kuliner maupun pelayanan yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Araujo, E. B. (2016). *Pengembangan Kuliner Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata di Dili, Timor Leste* . Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jumpa/article/download/23041/15157>
- Besra, E. (2012). *Potensi Wisata Kuliner Dalam Mendukung Pariwisata di Kota Palembang*. Diakses dari <http://journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/402/367>
- Rahman, A. S. (2018). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata Kuliner (Studi di Kabupaten Sumenep Madura)*, 75-193. Diakses dari <http://repository.ub.ac.id/8827/5/BAB%20IV.pdf>
- Wardani, T. P., & Dj, E. W. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Eksistensi Industri Sate Ayam Dalam Persaingan Kuliner Fast Food* . Diakses dari <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS/article/download/132/106>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

## BAB 20

### Pembatasan Perizinan Pembangunan Ritel Modern untuk Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyuwangi

Dita Septiara Wulandari

#### Latar Belakang

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan faktor pendukung sumber perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, UMKM perlahan mulai tergerus dan tergantikan dengan usaha ritel modern seperti swalayan alfamart dan indomart. Masyarakat pelaku UMKM cemas melihat fenomena kemajuan zaman saat ini, mereka cemas produk mereka akan kalah saing dengan produk swalayan atau produk impor. Barang-barang yang dijual di swalayan juga tidak kalah lengkap dan terjamin kualitasnya. Sedangkan produk impor, biasanya memiliki kualitas yang lebih baik dengan harga lebih terjangkau.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak diam saja menanggapi fenomena pertumbuhan ritel modern saat ini. Pemerintah menginginkan produk lokal Banyuwangi dapat terus berkembang dan bersaing di pasar lokal dan nasional. Pemkab berinovasi untuk membatasi pembangunan swalayan di

kabupaten Banyuwangi, dengan tujuan untuk memajukan UMKM masyarakat. Dengan membatasi pembangunan swalayan, produk UMKM masyarakat akan bertambah nilai jualnya dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat pelaku UMKM. Selain membatasi pembangunan swalayan, Pemerintah juga membatasi pembangunan mall di Banyuwangi, terbukti sudah 10 tahun belakang, tidak ada pembangunan mall baru di Kabupaten Banyuwangi. Karena kehadiran mall akan menenggelamkan usaha para pedagang pinggir jalan, dan berimbas pada menurunnya pendapatan mereka.

Seiring berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, bertambah pula wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Dengan bertambahnya wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi, banyak investor yang ingin melakukan investasi membangun hotel di kawasan wisata di Kabupaten Banyuwangi. Karena pada kenyataannya hanya terdapat beberapa hotel berbintang di Banyuwangi. Bukan tanpa alasan mengapa hanya ada sedikit hotel di Banyuwangi. Pemerintah memiliki beberapa persyaratan kebijakan mengenai pembangunan hotel di Banyuwangi, yakni tidak dibolehkan perizinan pembangunan untuk hotel dibawah bintang tiga, karena justru akan menjadi pesaing *homestay* atau *guest home* milik masyarakat setempat.

Pengajuan perizinan pembangunan hotel juga harus disertai rancangan arsitek bangunan yang harus mengadopsi nilai-nilai kebudayaan lokal Banyuwangi. Jadi wisatawan tidak hanya sekedar menginap dan menikmati wisata di Banyuwangi, tetapi juga lebih mengenal kebudayaan lokal Banyuwangi. Sekaligus menjadi ciri khas bangunan hotel di Banyuwangi, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun wisatawan internasional. Walaupun pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak kriteria dalam perizinan, investor tidak keberatan dengan kualifikasi yang ditetapkan pemerintah. Justru

kriteria-kriteria itulah yang menambah nilai estetika pada bangunan hotel di kawasan Kabupaten Banyuwangi.

Untuk mendorong tingkat kunjungan wisata ke Kabupaten Banyuwangi, pemerintah selain memfokuskan pada perbaikan fasilitas disekitar wisata alam, pemerintah juga melakukan berbagai inovasi di bidang pelayanan publik. Pemerintah melakukan renovasi bangunan di kantor dinas yang ada di Banyuwangi agar terciptanya semangat kerja para pegawainya. Bangunan di kantor dinas atau instansi di lingkup Banyuwangi di desain dengan mengusung kearifan lokal budaya Banyuwangi.. Berbagai inovasi kinerja pemerintah daerah yang berhasil dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi daya tarik pemerintah kabupaten lain untuk melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Momen kunjungan kerja bisa dimanfaatkan sebagai ajang promosi wisata tanpa harus mengeluarkan biaya promosi tambahan.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa persoalan ekonomi regional yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam essay ini adalah seberapa efektif kebijakan pembatasan perizinan pembangunan ritel modern untuk pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyuwangi. Pemberdayaan UMKM perlu di dukung oleh adanya pemasaran yang mendukung. Karena tanpa adanya pemasaran, UMKM akan tenggelam di pasar modern.

#### Tujuan Essay

Dari uraian di atas, essay ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan pembatasan perizinan pembangunan ritel modern untuk pemberdayaan UMKM di Kabupaten Banyuwangi.

#### Pembahasan

Seiring berkembangnya zaman, seolah semua hal bisa terkondisikan dengan internet (*internet of things*). Salah satu diantara banyaknya kemudahan internet yaitu kita dapat berbelanja online tanpa harus datang ke tempat tujuan. Belanja online dan swalayan atau ritel modern pada saat ini tidak dapat dipisahkan. Karena ritel modern menawarkan kemudahan berbelanja kepada konsumen. Kemudahan tersebut meliputi kelengkapan barang, kebersihan tempat berbelanja, *food court*. Selain kemudahan fasilitas, di swalayan tidak perlu melakukan tawar-menawar karena harga yang tertera sudah paten. Bahkan sering kali konsumen dibuat gelap mata oleh adanya diskon secara besar-besaran yang diadakan pihak swalayan.

Dengan adanya ritel modern, keberadaan pasar modern semakin terhimpit bahkan bisa menggusur keberadaan pasar tradisional. Maka dari itu, pemerintah dituntut melakukan upaya untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional. Selain untuk melestarikan pasar tradisional, agar perekonomian masyarakat ikut meningkat, dan menjauhkan masyarakat dari kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat kebijakan mengenai pembatasan perizinan pembangunan usaha ritel modern. Pemerintah mengambil langkah berani untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat. Karena dengan keberadaan minimarket di Banyuwangi, akan menjadi saingan bagi usaha kecil masyarakat setempat, dan mempersempit peredaran produk UMKM lokal.

Daerah lain yang menerapkan pembatasan perizinan pembangunan ritel modern adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bahkan pemerintah memiliki Perda sendiri yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Dimana didalamnya mengatur mengenai pembinaan, pemberdayaan pasar, dan

perlindungan pasar rakyat. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan tersebut untuk memperberdayakan pasar tradisional yang ada. Karena keberadaan pasar tradisional di Sumatera Barat jumlahnya sangatlah banyak. Faktor tersebut dijadikan sebagai daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat.

Pemerintah Banyuwangi membuat kebijakan pembatasan pembangunan ritel modern dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 tahun 2007. Dalam Perpres tersebut, pasal 3 poin (3) mengatur mengenai sistem penjualan dan jenis barang dagangan dalam toko modern. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi No. 11 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Dalam Perda tersebut, pasal 26 poin (a) berbunyi “Setiap orang/badan dilarang mendirikan dan melakukan usaha baru berupa tempat hiburan karaoke dan usaha toko modern.” Selain larangan pembangunan ritel modern, pemerintah daerah Banyuwangi juga membuat kebijakan larangan pendirian hotel bintang tiga ke bawah, serta larangan mendirikan diskotik. Tujuannya agar pariwisata di Banyuwangi tetap terjaga dan tidak terkontaminasi dengan keberadaan diskotik. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menyatakan “pariwisata Banyuwangi dapat bersaing dikancah internasional, walau tanpa adanya diskotik maupun tempat hiburan malam.”

Dengan dikeluarkannya Perda tersebut, Pemerintah Daerah bisa menekan keberadaan ritel modern di Banyuwangi. Kebijakan dalam pembatasan perizinan pembangunan ritel modern termasuk kebijakan yang jarang dilakukan oleh pemerintah kabupaten lain. Karena, dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, pendapatan daerah juga ikut menurun. Menurunnya pendapatan daerah akibat pembatasan pembangunan usaha ritel modern, tidak mempengaruhi keputusan Bupati Banyuwangi beserta pembuat kebijakan yang lain untuk tetap menerapkan Perda tersebut.

Karena tujuan utama pembatasan perizinan ini adalah untuk menaikkan perekonomian masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, bukan berarti di Banyuwangi tidak ada swalayan. Tetap ada swalayan, tetapi jumlahnya sedikit. Ritel modern ini sudah berdiri sebelum kebijakan ini ditetapkan. Ada enam swalayan dan beberapa minimarket yang berdiri di Banyuwangi. Walaupun hanya sedikit ritel modern di Banyuwangi, tetapi tetap mendapat control pengawasan ketat dari pihak Perizinan Pemerintah Daerah. Diantaranya tidak ada minimarket yang buka 24 jam, maksimal 17 jam operasional. Untuk wilayah pinggir kota buka dari 10.00 – 00.00, sedangkan untuk perkotaan buka dari pukul 10.00 - 03.00.

Tabel 1.  
Daftar swalayan di Banyuwangi

No.	Nama	Alamat
1.	Supermarket X	Banyuwangi
2.	Roxy Mall	Jl. Jendral Sudirman, Penganjuran, Banyuwangi
3.	Ramayana	Jl. Adi Sucipto, Tukangkayu, Banyuwangi
4.	Vionata	Jl. Jendral Ahmad Yani, Tukangkayu
5.	Mitra Swalayan	Jl. Yos Sudarso, Gambiran
6.	Sun East Mall	Jl. Diponegoro, Genteng, Banyuwangi
7.	Barokah Toserba	Jl. Seneporjo, Bangorejo, Banyuwangi

*Sumber: Laporan Penelitian Gustra Gilang tahun 2018*

Pemerintah Daerah Banyuwangi selain melarang pendirian swalayan dan minimarket, juga melarang perizinan pembangunan mall. Karena keberadaan mall dianggap dapat menenggelamkan keberadaan pedagang pinggiran. Pemerintah tidak mengizinkan pembangunan mall sebelum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Banyuwangi mencapai 7,3 (saat ini IPM masyarakat Banyuwangi berada di angka 7,2). Walaupun melakukan pembatasan perizinan pembangunan ritel modern, tetapi Pemda mengizinkan pembangunan hotel bintang tiga keatas. Perizinan pembangunan hotel di Banyuwangi tidak serta merta langsung mendapatkan izin dari Pemda. Tetapi, ada beberapa kualifikasi yang harus disetujui investor apabila ingin membangun hotel di kawasan Banyuwangi.

Melihat pertumbuhan pariwisata di Banyuwangi yang kian meningkat, banyak investor ingin berinvestasi dengan membangun hotel di Banyuwangi. Pemerintah tidak serta memberikan kemudahan dalam perizinan pembangunan hotel di Banyuwangi, hanya karena pariwisata Banyuwangi saat ini sedang melejit. Pembangunan hotel bintang tiga kebawah di larang di Kabupaten Banyuwangi karena ditakutkan akan terjadi pertumbuhan hotel yang membludak. Faktor lainnya yaitu Pemerintah ingin usaha *guest house* dan *homestay* yang dikelola masyarakat terus berkembang. Selain untuk menaikkan pendapatan para pemilik homestay juga untuk menjauhkan dari kemiskinan.

Pemerintah selain melarang pendirian bangunan ritel modern, juga melakukan inovasi untuk memajukan UMKM masyarakat Banyuwangi. Pemerintah melakukan inovasi memberikan pelatihan marketing dan *packaging* kepada pemuda pelaku UMKM. Agar produk yang dipasarkan tidak kalah dengan produk swalayan. Tentunya produk dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Karena di era

globalisasi, IT berperan besar dalam pemasaran produk. Dengan IT pangsa pasar semakin luas, tidak hanya masyarakat lokal yang tahu produk tersebut, dan dengan adanya IT dapat memudahkan pelaku perintis UMKM untuk tetap bisa berjualan tanpa harus menyediakan gerai.

Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Koperasi terus meningkatkan inovasi untuk memajukan UMKM lokal, dengan memfasilitasi promosi produk pada *Marketing Online* (MOL), menyediakan website bagi para pelaku UMKM Banyuwangi dengan situs [www.banyuwangi-mall.com](http://www.banyuwangi-mall.com). Serta untuk laporan keuangan produk melalui fasilitas *Report Online* (ROL). Itu merupakan beberapa inovasi yang telah diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan terus meningkatkan inovasi-inovasinya untuk memajukan usaha asli masyarakat Banyuwangi. Agar kedepannya produk-produk yang dihasilkan dapat bersaing di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

### Kesimpulan

Usaha ritel modern membawa dampak yang besar terhadap dunia perdagangan, yang berimbas pada perekonomian. Sehingga keberadaan ritel modern cenderung berpotensi menggerus usaha UMKM. Terlebih lagi didukung dengan pola hidup belanja modern yang membutuhkan hadirnya ritel modern. Maka, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan kebijakan mengenai pembatasan perizinan pembangunan ritel modern. Kebijakan ini membawa dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat Banyuwangi. Dampaknya perekonomian masyarakat akan meningkat dan menjauhkan dari tingkat kemiskinan. Dengan begitu, UMKM lokal masyarakat Banyuwangi akan semakin berkembang dan memiliki kesempatan pemasaran hingga internasional. Terbukti dalam lima tahun

terakhir angka kemiskinan di Banyuwangi terus mengalami penurunan.

#### Saran

1. Untuk keberlanjutan program ini kedepannya, diharapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi baik Bupati maupun perangkat lainnya terus menerapkan kebijakan ini. Dan secara rutin melakukan monitoring serta evaluasi terhadap perkembangan UMKM di Banyuwangi. Sehingga UMKM masyarakat dapat terus berkembang, dan tidak kalah dengan produk swalayan dan produk impor.
2. Pemuda pelaku UMKM perlu pelatihan atau pendampingan mengenai pemasaran produk melalui *e-commerce*, supaya pemasaran produk lebih mudah dijangkau masyarakat luas dan dapat diakses oleh masyarakat dari beda kabupaten.
3. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan dan memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan intermediasi sebagai jasa penyedia usaha, teknologi, manajemen, pemasaran, dan informasi.
4. Usaha ritel modern yang sudah berdiri di Banyuwangi sebaiknya dipantau secara intensif, agar tidak terjadi penyelewengan baik kontrak maupun penjualan produk impor, agar tidak mematikan produk lokal. Serta menerapkan sanksi tegas apabila terjadi penyelewengan kontrak.

#### Daftar Pustaka

- Anas, A. A. (2019). *Anti Mainstream Marketing 20 Jurus Inovasi Mengubah Banyuwangi*. Jakarta: Gramedia.
- Anas, A. A. (2020). *Inovasi Banyuwangi Jalan Terpendek Mencapai Layanan Publik Prima*. Jakarta: Gramedia.

- Dimiyati, A. (2019). Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal UGM*, 30 - 42.
- Rasaili, W. (2020). Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi. *Jurnal Kemendagri*, 112-116.
- Rohani, S., & Alhadiansyah. (2017). Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart Terhadap UKM Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. *Jurnal Untan*, 4.
- Setyawati, I. (2009). Peran UMKM Dalam Perekonomian Nasional . *Stima Kosgoro*, 28.

## BAB 21

### Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Lemang Di Kota Tebing Tinggi

Rizky Eggy Chandra Bu'ulolo

#### Latar Belakang

Pembangunan merupakan sektor yang penting dalam memajukan suatu wilayah. Pada hakikatnya pembangunan ini merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan secara terencana dan berlangsung secara terus-menerus untuk menuju kearah yang lebih baik. Untuk itu, sudah selayaknya pembangunan itu memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Dalam hal ini termasuk salah satunya adalah pembangunan jalan tol.

Kita melihat bahwa di jaman sekarang atau era pak Jokowi lebih memusatkan kepada pembangunan jalan tol, ini merupakan suatu kemajuan nasional dibidang infrastruktur. Dengan adanya pembangunan jalan tol, memungkinkan masyarakat suatu saat dapat mempermudah atau mempercepat proses penyaluran dan pengiriman barang maupun sebagai jalur alternatif bagi masyarakat. Tidak hanya itu saja, Pembangunan jalan tol ini juga berpengaruh terhadap lingkungan fisik, dan sosial baik selama masa pembangunan itu berlangsung maupun setelah selesai pembangunan tersebut baik itu berdampak positif maupun

negatif. Terlepas dari dampak negatif dan positif, masyarakat juga mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak itu. Supaya Indonesia semakin maju kedepannya.

Pembangunan jalan tol di Indonesia sendiri merupakan sebuah adopsi kebijakan yang dilakukan pemerintah karena melihat dari pembangunan jalan tol dari negara lain seperti cina, london dan lain-lain. Selain itu, melihat dari karakteristik Indonesia yang merupakan negara padat penduduk maka perlunya pembangunan jalan bebas hambatan guna mempermudah akses di segala aspek kehidupan bagi masyarakat. Walaupun begitu, pembangunan jalan tol yang kurang baik menyebabkan berkembangnya kawasan-kawasan pemukiman masyarakat dan pertumbuhan kawasan perkotaan semakin terkapar. Pertumbuhan yang terkapar dapat menyebabkan pelayanan transportasi publik yang tidak efisien dan akan berdampak pada aktifitas perekonomian masyarakat setempat. Hal ini menjadi yang menjadi perhatian lebih dari pemerintah.

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu daerah yang dilakukannya pembangunan jalan tol dan sudah dimulai sejak tahun 2013. Hal ini merupakan strategi dari pemerintah pusat, dikarenakan Kota Tebing Tinggi merupakan kota yang strategis bagi kemajuan perekonomian nasional. Karena merupakan penghubung antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kota Tebing Tinggi atau dikenal dengan julukan Kota Lemang, karena terkenal dengan usaha masyarakatnya yaitu lemang. Lemang sendiri sudah ada di Tebing Tinggi sekitar 55 Tahun yang lalu dan ini sudah menjadikan ciri khas Tebing Tinggi itu sendiri. Terlebih lagi Masyarakatnya sudah terbiasa dengan berjualan di pinggir jalan, menjajakan dagangannya di perbatasan daerah itu sendiri.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang pembangunan jalan tol. Untuk itu menindaklanjuti kebijakan ini maka perlunya pergerakan dari pemerintah daerah kota Tebing Tinggi untuk menyikapi dampak dari kebijakan dari pemerintah pusat bagi keberlangsungan perekonomian terutama bagi

pedagang Lemang di dekat perbatasan daerah Tebing Tinggi. Terlebih lagi kita melihat bahwa pedagang lemang ini menjual makanannya di pinggir jalan dan ini menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Akibat dari kebiasaan ini atau sering kita kenal dengan zona nyaman, yang menyulitkan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi untuk menerapkan sebuah kebijakan. Hal ini membutuhkan kerjasama dari berbagai stakeholders agar menghindari dari berbagai dampak yang berlebihan.

#### Rumusan Masalah

Dari penjelasan tantangan persoalan ekonomi regional oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi diatas, maka didapati rumusan masalahnya adalah bagaimana solusi kebijakan dan pengaplikasian kebijakan tersebut dilapangan untuk meningkatkan pendapatan bagi pedagang lemang akibat dampak pembangunan jalan tol yang telah terjadi. Dilihat dari sarana dan prasarana mungkin saja berdampak lebih ke pelaku usaha besar untuk mempermudah akses penjualannya dan meningkatkan pendapatannya. Akan tetapi, bagi pelaku usaha kecil ini merupakan pemerosotan bagi pendapatannya karena seperti yang kita tahu bahwa tidak boleh berjualan didekat ruas jalan tol sedangkan ditempat lain juga sudah padat pemukiman.

#### Tujuan Essay

Tujuan dari penulisan essay ini adalah mengenai gambaran kebijakan peningkatan pendapatan kedepannya bagi pedagang lemang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi setelah dilakukannya pembangunan Jalan Tol.

#### Pembahasan

Tidak hanya Di Kota Tebing Tinggi yang mengalami persoalan perekonomian regional. Akan tetapi, beberapa daerah juga mengalami hal yang sama. Hanya saja kebijakan penanganan yang dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing berbeda. Apabila kita hubungkan dengan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang pembangunan ekonomi regional. Kita dapat mengetahui bahwa persoalan ini masuk kedalam

kategori tantangan ekonomi. Karena kita melihat dampaknya yang berupa tingkat lapangan kerja yang semakin menurun dan daya beli masyarakat yang tidak konsumtif.

Seperti halnya Di Kabupaten Lampung Selatan dalam Studi Kasus “Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan” oleh (IRFAN, 2018). Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang ada di Desa Jatimulyo berprofesi sebagai pedagang dan menggunakan/membangun gubuk kecil sebagai tempat berjualan mereka, setelah adanya Pembangunan Jalan tol tersebut mereka terpaksa pindah tempat sehingga beresiko pendapatan berkurang karena tempat yang tidak strategis. Setidaknya ada 10% responden yang mengatakan hal demikian. Meskipun begitu, Pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan bantuan berupa kompensasi uang dan penyediaan tempat untuk berjualan, walapun disatu sisi, masyarakat tetap merasa kurang puas karena tempat yang kurang strategis. Di Kabupaten Serdang Bergadai dalam Studi Kasus UMKM di Desa Bengkel (Utara, 2003), mengalami persoalan yang sama. Menurutnya Pasar Bengkel merupakan Kawasan perdagangan yang strategis dan terkenal akan makanan khas dodolnya. Jadi, Setelah adanya Jalan Tol, Para pengguna jalan pribadi dan bus antar kota/provinsi sekarang banyak yang menggunakan jalan tol tersebut sehingga mengakibatkan wilayah pasar bengkel perlahan jumlah pengunjungnya berkurang dan akhirnya pendapatan para UMKM di Desa Bengkel menurun juga. Meskipun demikian, pemerintah Daerah setempat masih mendorong Para pedagang untuk terus memproduksi dengan cara ikut mempromosikan makanan khas daerahnya dengan berbagai media. Salah satunya adalah lewat pemasaran online dengan inovasi yang lebih menarik.

Dalam Penelitian (Siswanto et al., 2019) tentang dampak pembangunan jalan tol terhadap faktor sosial, ekonomi dan lingkungan pada usaha batik dan perhotelan di Kota Pekalongan.

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancaranya dari beberapa responden bahwa dampak ekonomi akibat dibangunnya jalan Tol tersebut memiliki dampak negatif bagi pengusaha batik dan pengelola hotel secara garis besarnya. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah. Dilihat dari adanya harapan pelaku usaha terhadap pemerintah salah satunya adalah supaya pemerintah menyelenggarakan event-event yang bekerja sama dengan dunia industri dan pariwisata. Di samping itu juga Pemda setempat lebih gencar mempromosikan Kota Pekalongan.

Dalam studi kasus Sepanjang Jalan Umum Ketapang-Grati (Pratama, 2020). Peneliti menjelaskan bahwa dengan adanya jalan tol mengganggu aktivitas ekonomi dalam kota. Hal ini dikarenakan pengendara tidak melewati kota. Dimana dikota tersebut pusat bagi banyak pedagang buah tangan. Disamping itu, adanya keluhan dari para pedagang kepada pemerintah setempat yang dimana Kendalanya adalah pemerintah belum mampu menyediakan tempat yang strategis bagi pedagang toko buah tangan. Ini membuktikan bahwa pemerintah belum optimal dalam membantu perekonomian para pedagang buah tangan yang terkena dampak jalan tol. Berbeda dengan studi kasus sebelumnya, pada studi kasus (Prasetyo & Djunaedi, 2019) di jalur Pantura Kabupaten Brebes. Menerangkan bahwa pedagang tidak mengalami penurunan omset dikarenakan para pengendara yang melintas beranggapan bahwa tarif tol yang cukup mahal sehingga masih sering menggunakan jalur biasa.

Dari beberapa studi kasus diatas kita dapat mengetahui bahwa bukan hanya Kota Tebing Tinggi saja yang mengalami persoalan perekonomian bagi pedagang kecil akibat dampak Jalan Tol. Akan Tetapi daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama dengan keluhan masyarakat yang sama. Pembangunan jalan tol sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan salah satu langkah awal pemerintah dalam membangun Indonesia dibidang Infrastruktur. Pembangunan jalan tol sendiri sebenarnya sudah ada pada era kepemimpinan

Presiden Soeharto Tahun 1973 dengan panjang jalan tol yaitu 59 kilometer dan diberi nama “Jagorawi”. Bermula dari tahun 1973 ini dan melihat dari berbagai aspek seperti karakteristik penduduk Indonesia yang bertambah setiap tahunnya dan perkembangan jaman yang serba cepat, maka perlu didukung suatu sarana dan prasarana dalam menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia agar lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, pemerintah perlu membangun jalan tol guna mempermudah dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Sampai saat ini, di era kepemimpinan presiden Jokowi, pembangunan jalan tol itu masih berlanjut dan ini merupakan salah satu fokus utamanya. Di samping itu, kebijakan yang dibuat pemerintah ini justru mendapat kontra dikalangan masyarakat. Karena seperti yang sudah diteliti dalam beberapa studi kasus bahwa pembangunan jalan tol ini sudah merusak lingkungan, pemukiman warga, pekerjaan warga dan mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Meskipun begitu, pihak pemerintah bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan dengan cara mengganti rugi lahan maupun pemukiman warga yang sudah terpakai. Jauh dari itu, pemerintah tidak memperhatikan detail dari suatu wilayah yang akan dibangun jalan tol. Misalnya, bagaimana karakteristik daerah tersebut, pendapatan daerahnya berasal darimana dan sebagainya.

Pemerintah juga harusnya bercermin dari suatu kota di Amerika, ketika pemerintahnya melakukan pembangunan jalan tol yang melalui daerah tersebut. Maka apa yang terjadi? Jauh dari harapan pemerintah bahwa daerah tersebut akan maju, ataupun ramai akan pengunjung. Tapi sayangnya tidak, kota itu perlahan mati, pengunjung yang melintas perlahan sedikit karena digantikan dengan akses jalan tol. Lalu bagaimana dengan masyarakat kota itu? Mereka akhirnya memutuskan meninggalkan daerahnya dan pindah ke daerah lain. Seperti halnya gambaran dalam cartoon spongebob dimana plankton menghasut warga dengan idenya membangun jalan tol ataupun

gambaran dalam film “CARS” yang mana ada suatu kota bernama “radiators springs” yang dulunya ramai pengunjung dan masyarakatnya dominan sebagai pelaku usaha. Ketika pemerintah membuat kebijakan membangun sebuah jalan tol dengan iming-iming kepada masyarakat dan akhirnya terbujuk akan rayuannya. Akhirnya kota tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin ini salah satu cara masyarakat disana menyindir pemerintahnya.

Apa yang kita dapat dari sini, bahwa ini merupakan gambaran akibat dampak pembangunan yang kurang memperhatikan aspek-aspek kecil seperti diatas dan perlunya koordinasi dari berbagai komponen masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Sama seperti halnya Kota Tebing Tinggi. Wilayah administratif yang dikelilingi oleh beberapa perkebunan milik negara (BUMN). Kota kecil yang biasa dikenal dengan kota Perdagangan atau “kota lemang”. Kota dengan luas 38,438 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk ± 156.815. Sebagai Kota yang dijuluki sebagai kota Perdagangan. Tentunya terdapat banyak pelaku usaha. Penduduk usia produktifnya yaitu ber-usia 15-64 tahun mencapai 66,68% dari total penduduk, sedangkan untuk usia non produktif 0-14 tahun dan usia 64 tahun keatas sebanyak 32,32% (*Sumber: BPS*). Di Tebing Tinggi para pengusahanya rata-rata masih muda, dengan inovasi dan kreasi mereka. Sehingga, mampu mengikuti perkembangan zaman dan keinginan masyarakat millennial.

Walaupun begitu, apa yang sudah menjadi ciri khas Tebing Tinggi tidak untuk dilupakan, seperti usaha Lemang dan Roti Kacang. Lemang sendiri sudah ada sejak 1950-an diperkenalkan oleh H. Abu Bakar Sikumbang dan Istrinya Hj Siti Maimunah Sinaga. Kemudian dari generasi ke generasi diturunkan dan diikuti oleh pengusaha lainnya. Lemang sendiri berkembang pesat dan menjadi ciri khas daerah Tebing Tinggi. Lemang sendiri dimasak dengan bambu dan diperjual belikan di pinggir jalan. Baik itu di perbatasan maupun dipusat kota. Seiring

perkembangan zaman, Oleh pemerintah pusat sendiri mulai membangun infrastruktur berupa jalan tol di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya Kota Tebing Tinggi. Sejak dibangunnya jalan tol tahun 2013, ini berdampak pada pedagang lemang. Menurut data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi tahun 2016 bahwa dari tahun 2012-2016 Jumlah Industri Lemang terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak jalan tol tersebut cukup menggoyangkan mental pengusaha Lemang.

#### Perkembangan Pedagang Sebelum ada Jalan Tol

Sebelum adanya jalan tol, kondisi kota Tebing Tinggi sendiri sudah ramai dilalui oleh kendaraan, hal ini dikarenakan wilayahnya merupakan penghubung antar kota/kabupaten. Alasan ini juga yang menjadikan Tebing Tinggi menjadi Kota Perdagangan dan membuat masyarakatnya kebanyakan bermata pencaharian sebagai pengusaha/pedagang. Selain itu, ternyata Masyarakat yang berdagang tidak hanya berasal dari Kota Tebing Tinggi asli. Akan tetapi para pendatang dari luar daerah sudah mulai ikut terjun sebagai pengusaha. Tapi tidak untuk para pedagang Lemang yang masih berasal dari Tebing Tinggi Asli. Perkembangan pedagang lemang sebelum adanya jalan tol lumayan meningkat. Karena apa? Karena tidak adanya larangan dari pemerintah daerah untuk tidak berjualan di pinggir jalan perbatasan Kota Tebing Tinggi. Jadi, para pedagang bebas berjualan dan menariknya setiap  $\pm 5$  meter ada pedagang lemang, mereka membuat gubuk/pondok kecil sebagai tempat berjualannya. Dan dari berjualan seperti ini mereka dapat menghidupi kebutuhan karena pendapatan mereka yang cukup.

#### Perkembangan Pedagang Sesudah ada Jalan Tol

Jalan tol Medan-Tebing Tinggi sudah selesai dibangun dan sudah dioperasikan. Sekarang pembangunan jalan tol ini kan dilanjutkan Tebing Tinggi- Pematang Siantar dan Tebing Tinggi-Kuala Tanjung. Dampak dari Pembangunan ini adalah larangan bagi pedagang untuk tidak berjualan didekat pintu masuk ruas

jalan tol, yang mana sebelumnya itu adalah tempat yang sudah biasa dan strategis bagi pedagang lemang. Kalau dulu dapat kita lihat para pedagang setiap  $\pm 5$  meter sekali, sekarang mungkin bisa dikatakan setiap  $\pm 100$  meter kita baru bisa jumpai pedagang lemang. Akibat dampak itu juga pendapatan para pedagang berkurang dan tak jarang mereka memilih pekerjaan lain. Seperti yang kita lihat dalam beberapa studi kasus diatas. Dan berdasarkan data Dari dinas perdagangan Kota Tebing Tinggi yang mengatakan bahwa pedagang lemang mengalami penurunan. Meskipun begitu, tidak menyurutkan niat beberapa orang untuk tetap bertahan berjualan di pinggir jalan. Walaupun sudah tau resiko yang tinggi apabila tetap berjualan didekat pintu masuk jalan tol.

Dari gambaran kondisi para pedagang lemang diatas. Penulis juga mengunjungi beberapa website salah satunya milik pemerintah Kota Tebing Tinggi. Disitu dinyatakan bahwa pemerintah sudah memperhatikan dampak dari pembangunan jalan tol bagi pedagang lemang dengan menyediakan tempat bagi para pedagang berjualan dan ikut mempromosikan juga makanan ciri khas Tebing Tinggi ini. Walaupun begitu, pengaplikasiannya dilapangan masih belum sesuai ekspektasi, karena menurut pelaku usaha lemang, tempatnya yang kurang strategis. Jadi beberapa perdagangan masih tetap bertahan berjualan di pinggir jalan tersebut. Walaupun begitu disini tidak menyalahkan pemerintah sepenuhnya karena, dijamin sekarang sudah seharusnya para pelaku usaha untuk siap dalam menghadapi situasi apapun, termasuk pedagang lemang. Tanpa dari inovasi dan kreasi dari pedagang itu sendiri mungkin usaha atau bantuan dari pemerintah kurang menarik peminat pembeli. Sangat disayangkan apabila para pedagang mulai mencari usaha lain dan lama-kelamaan tidak ada lagi makanan khas Lemang dari Tebing Tinggi. Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebenarnya bisa bercermin dari Kota Yang ada diluar negeri maupun dalam negeri untuk menghadapi tantangan regional seperti ini supaya mampu

membuat kebijakan yang sesuai dengan ekspektasi. Seperti halnya beberapa studi kasus diatas, beberapa daerah membuat pemasaran online, kemudian ada yang bekerjasama dengan industri lain membuat event-event. Kebijakan ini sebenarnya bisa diadopsi untuk membantu meningkatkan pendapatan para pedagang.

### Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai gambaran peningkatan pendapatan ekonomi dari beberapa daerah dan terkhusus buat pedagang lemag diatas. Dapat disimpulkan bahwa, masih perlunya perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah. Disamping itu, Masyarakat juga harus siap dengan segala perkembangan zaman yang terjadi. Kata “Siap” yang dimaksud adalah dengan menciptakan inovasi dan kreatifitas yang baru, yang nantinya mempunyai daya saing. Dibarengi dengan kemauan dan niat yang besar untuk terus menjajakan makanan khas Tebing Tinggi ini. Dengan begitu, Perubahan seperti apapun itu dapat teratasi. Pemerintah hanyalah pemberi fasilitas, sisanya adalah bagaimana para pedagang itu mampu bersaing satu sama lain ataupun dengan perubahan lingkungan yang ada. Alangkah baiknya, jika para pedagang dan Pemerintah terus menjalin komunikasi yang baik. Agar tidak ada miss-communication.

### Saran

Adapun saran dalam essay ini terbagi dua yaitu:

1. Untuk Pedagang Kecil Terkhusus bagi pedagang lemag, agar meningkatkan lagi kemampuan (skill) dalam hal membuat atau memasarkan produk tanpa menghilangkan cita rasa yang ada. Dengan Memanfaatkan Teknologi yang ada dan anak-anak millenial untuk mempromosikan makanan khas Tebing Tinggi ini. Mengikuti Kebijakan yang telah dibuat pemerintah untuk tidak berjualan di dekat pintul masuk tol Medan-Tebing Tinggi supaya

menjaga keselamatan warganya. Melakukan komunikasi secara rutin mengenai perkembangan para pedagang kepada pemerintah. Supaya pemerintah juga tahu kebijakan seperti apa yang akan dibuat.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi. Walaupun sudah membuat Relokasi tempat untuk para pedagang khususnya pedagang lemang, alangkah baiknya untuk mengecek kembali pengaplikasian kebijakan tersebut. Sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh. Kemudian, selain menyediakan sarana dan prasarana. Pemda setempat juga harus lebih sering mengadakan event-event. Guna menarik pengunjung dan mempromosikan apa yang menjadi ciri khas Kota Tebing Tinggi khususnya makanan Lemang.

#### Daftar Pustaka

- IRFAN. (2018). *Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat*.
- Prasetyo, S. A., & Djunaedi, A. (2019). Perubahan Perkembangan Wilayah Sebelum Dan Sesudah Pembangunan Jalan Tol. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.98>
- Pratama, ferina nadya. (2020). Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Staphylococcus aureus Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember. In *Skripsi*.
- Siswanto, V. A., Wahjuningsih, T. P., & Murtini. (2019). Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Faktor Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Pada Usaha Batik dan Perhotelan di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 17, 83–92.

## BAB 22

### Kebijakan Afirmatif dalam mengakselerasi Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia

Sudarmono

Pembangunan yang merata merupakan dambaan setiap pemerintahan dan masyarakat di setiap negara, khususnya di Negara sedang berkembang. Ketimpangan yang masih dengan mudah kita temukan adalah wujud lemahnya kemampuan kita dalam memastikan setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara proporsional. Ketimpangan masih terjadi, baik dari perspektif sosial, ekonomi maupun dari aspek spasial.

Dalam hal bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan, kita tidak mungkin dapat mengelakkan ketimpangan yang sangat nyata antara pembangunan di Pulau Jawa dengan pulau-pulau di luar Jawa, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Sehubungan dengan konteks yang demikian rumitnya, hadirnya kebijakan yang afirmatif diharapkan dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat yang kesulitan mengakses kesempatan mengembangkan ekonominya, sebagaimana akses yang didapatkan di kawasan yang telah terbangun dengan baik. Tindakan yang afirmatif dari pemerintah telah diamanahkan dalam UUD 1945 dan Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindakan yang afirmatif bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan. Sebagian Negara di Eropa menyebutnya

dengan sebutan diskriminasi positif, dimana perluasan kesempatan pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok minoritas secara politik. Pemikiran ini kemudian melahirkan suatu perspektif pemikiran baru mengenai kesetaraan gender. Dengan demikian, tindakan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas dapat dieliminasi.

Dari beberapa bab yang dituangkan dalam buku ini, diketahui terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmatif. Dimulai dari kebijakan Boyolali Pro Investasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi masuknya investasi ke Kabupaten Boyolali. Dengan adanya kemudahan investasi, peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru dapat diwujudkan. Peran pemerintah disini sangat di perlukan untuk menjadi jembatan antara investor dengan masyarakat.

Kebijakan yang afirmatif juga ditunjukkan melalui pelaksanaan PIPPK di Kota Bandung (bab 2). Pengelolaan dana PIPPK melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dana yang bersumber dari APBD tersebut diberikan kepada setiap satuan RW sebesar RP100 juta yang nantinya dikelola oleh masyarakat untuk berbagai inovasi pembangunan di wilayahnya masing-masing dengan didampingi oleh kelurahan setempat. Hal tersebut terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan di Kota Bandung, berdasarkan data dari BPS tingkat kemiskinan tahun 2014 hingga tahun 2018 sebanyak 1,08%.

Lain halnya yang diketengahkan pada studi kasus pembangunan Bandara Dhoho Kediri ini sangat berpotensi bagi pertumbuhan ekonomi di Kediri dan sekitarnya. Dengan masuknya pembangunan Bandara Dhoho, masyarakat akan memiliki alternative pendapatan baru untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini juga diuraikan pada bab yang membahas pembangunan KEK Mandalika, dimana pembangunan KEK

tersebut telah menyebabkan terjadinya *trickle-down effect* bagi masyarakat di sekitarnya.

Eskalasi pembangunan ekonomi mengalami perubahan yang sangat drastis di masa pandemi Covid-19. Pelaku industri pariwisata di Kabupaten Tanah Datar sangat memerlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah setempat mengingat terjadinya penurunan jumlah wisatawan yang masuk ke Kabupaten Tanah Datar. Tempat wisata yang belum terkelola dengan baik harus dilakukan perbaikan. Pemerintah memberikan pelatihan, serta mengarahkan setiap pengelolaan tempat wisata agar pengelolaannya dapat sesuai SOP. Sumber daya yang berkualitas tentu dapat mempercepat kemajuan sektor wisata suatu daerah.

Perlunya interaksi dengan pasar luar negeri juga dirasakan dampaknya oleh para pengrajin di Jepara. Hanya saja, kita seolah gagal melakukan regenerasi bagi melahirkan perajin-perajin baru dari generasi muda. Walaupun begitu tidak semua produk didesain dengan modern para pengrajin tetap memproduksi karya-karya lokal yang hasil tersebut lebih kepada penjualan dalam negeri. Dan dengan penerusan ke generasi baru diharapkan seni ukir kayu selalu berkembang dan tetap pada lokalitas keunikan Jepara.

Hal yang berbeda ditemukan pada sektor UMKM. Beberapa artikel dalam buku ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan inovatif. Misalnya hadirnya inovasi pemasraan di Kabupaten Belitung, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tebing tinggi dan Kota Bandung yang berupaya menjaga kestabilan perekonomian masyarakat pasa masa Pandemi ini. Salah satu cara yang cukup efektif dengan melibatkan nya *market place* dalam menunjang UMKM serta menghadirkan kebijakan yang lebih melindungi masyarakat setempat.

Inovasi kebijakan yang afirmatif pada sektor tata kelola lingkungan setidaknya dijuga diketengahkan oleh inovasi TPS3R yang memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang lebih memberikan mamfaat. Selain itu, pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Landak dan Kabupaten Asahan juga menunjukkan adanya kebijakan yang afirmatif dari pemerintah setempat.

Selain itu, terdapat pula setidaknya dua studi kasus yang mengangkat isu lokalitas yang menunjukkan adanya keberpihakan afirmatif kepada masyarakat, yaitu penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan penguatan peran Institut Mosintuwu di Poso untuk memulihkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah pasca konflik.

## Penutup

Pembangunan ekonomi inklusif memerlukan pendekatan yang afirmatif dari setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pertanyaan tentang kepada siapa pembangunan berpihak setidaknya bisa dijawab melalui keberpihakan pemerintah daerah pada sektor ekonomi informal. Sesungguhnya, paradigma desentralisasi membuka ruang inovasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Biodata Editor dan Penulis

**Sudarmono, S.STP., M.Si., Ph.D. (editor)** saat ini bertugas sebagai dosen pada Fak. Politik Pemerintahan IPDN. Ia menyelesaikan pendidikan Ph.D pada bidang studi pembangunan (*development science*) di Univ. Kebangsaan Malaysia (2014). Ketertarikannya pada isu pembangunan dimulai saat ia menyelesaikan Laporan Akhir dengan judul *the role of citizen forum in actuating regional development planning in Reg. of Pinrang*. Ia juga sangat tertarik pada isu-isu kemiskinan perkotaan, sektor informal perkotaan, isu sosial ekologi pesisir serta isu ketahanan pangan dan pertanian. Email: sudarmono@ipdn.ac.id.

**Abdullah Fatah** adalah pemuda kelahiran Boyolali, 28 Agustus 1999, sekarang menempuh studi sebagai praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri tingkat II mengambil Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas Politik Pemerintahan), Pernah juga menempuh pendidikan 2 semester di universitas negeri semarang prodi ekonomi pembangunan yang mana tertarik dengan keberhasilan sebuah program kerja pemerintah kabupaten boyolali yaitu Boyolali pro investasi yang meningkatkan daya saing serta taraf hidup masyarakat boyolali. Email : [abdullahfatah28@gmail.com](mailto:abdullahfatah28@gmail.com)

**Afifah Dwi Wulandari**, adalah Praja IPDN pada Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas Politik Pemerintahan). Memiliki ketertarikan pada isu-isu seputar pembangunan dan pemberdayaan serta berminat untuk mendalami isu-isu pembangunan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung yang diawali dengan pembuatan essay ini. Selain itu ia juga memiliki ketertarikan dalam bidang seni tradisional, dan di luar aktivitasnya sebagai praja ia mengikuti kegiatan

sanggar seni tradisional Jawa Barat di IPDN. Email: [afifahdwiwulandari@gmail.com](mailto:afifahdwiwulandari@gmail.com)

**Alan Dwi Hadi Saputro**, adalah praja IPDN tingkat II pada Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan. Lahir di Kediri dan besar di Kediri membuat kecintaannya terhadap daerah Kediri sangat besar sehingga membuat ia menjadi peduli terhadap pertumbuhan ekonomi dan mendalami isu-isu pembangunan dan pemberdayaan yang ada di Kediri. Dengan menjadi praja ia berharap nantinya jika menjadi pejabat daerah terutama di Kediri ia bercita-cita menjadikan daerah Kediri sebagai daerah dengan pendapatan perkapita terbesar ketiga di Jawa Timur. Email: [hadisaputro48@gmail.com](mailto:hadisaputro48@gmail.com)

**Angel Amelia Putri**, adalah praja IPDN pada program studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas Politik Pemerintahan). Terdorong oleh minat untuk mendalami isu pembangunan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar khususnya pada sektor pariwisata, ia kemudian banyak menekuni isu yang terkait bidang pariwisata di kabupaten tersebut. Ia juga berharap tulisan pada buku ini dapat menjadi ilmu pengetahuan, selain itu ia berharap mampu menghasilkan karya tulis yang lebih baik lagi kedepannya. Email: [angelameliaputri08@gmail.com](mailto:angelameliaputri08@gmail.com)

**Firda Tasya Ulayya** adalah praja IPDN pada program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas Politik Pemerintahan). Tertarik untuk mendalami isu-isu pembangunan ekonomi di Jawa Tengah khususnya tempat kelahirannya yaitu Kabupaten Jepara, dan mulai menekuni salah satu isu sosial ekonomi yang terkait pembangunan di kabupaten tersebut lewat penulisan essay ini. Diluar aktivitasnya sebagai praja, ia juga memiliki kegiatan lain diantaranya olahraga dan ketertarikan pada dunia seni. Email: [tasyaulayya@gmail.com](mailto:tasyaulayya@gmail.com)

**Muhammad Hanif Muttaqin** merupakan seorang pemuda yang berasal dari Kota Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lahir pada tanggal 17 Januari 2001 sebagai anak ke-2 dari empat bersaudara. Sekarang menempuh Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Semester IV Fakultas Politik Pemerintahan, Ketika masih SMA dia banyak sekali melihat potensi-potensi yang ada di daerah asalnya dan sayang sekali jika tidak dioptimalkan. Oleh karena itu, ia memilih untuk sekolah di IPDN dengan biaya sekolah yang gratis dan Ketika sudah lulus langsung bekerja. Harapannya suatu saat nanti dapat bermanfaat untuk masyarakat dan daerah asalnya. Email: [hanif.smansatp@gmail.com](mailto:hanif.smansatp@gmail.com)

**Ni Wayan Ariyuni**, saya pribadi masih berstatus praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada Fakultas Politik Pemerintahan program studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Saya lahir di Manukaya, 21-10-2000 dan berkesempatan mengikuti Pendidikan di IPDN di mulai pada tahun 2019 sebagai praja asal pendaftaran Provinsi Bali. Ini adalah kali pertamanya saya berkesempatan untuk menghasilkan sebuah karya yang di publish secara resmi. Menjadi seorang penulis merupakan cita-cita kedua saya, dalam beberapa kesempatan saya pernah menulis cerita pendek di wattpad yang merupakan langkah pertama saya dalam karya tulis. Saya sangat berterimakasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya tentunya berharap bahwa tulisan saya mampu memberikan manfaat bagi pembaca nantinya, dan begitu juga bagi saya untuk lebih berusaha menghasilkan karya-karya yang lebih baik kedepannya. Email: [ariyuniw@gmail.com](mailto:ariyuniw@gmail.com)

**Anastasya Nur Azzura**, Kelahiran Mataram, 25 Desember 2001 menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas di SMAN 1 Praya yang kemudian melanjutkan pendidikan di institut pemerintahan dalam negeri sebagai praja pada fakultas politik pemerintahan program studi pembangunan ekonomi dan

pemberdayaan masyarakat yang mempunyai bakat di bidang olahraga yaitu bola volley dan sudah pernah mengikuti perlombaan yang membawa nama ipdn ,sangat terdorong dan tertarik pada pengembangan sektor pariwisata dan Meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten Lombok tengah melalui sektor pariwisata. Email: [azzuranastasya5@gmail.com](mailto:azzuranastasya5@gmail.com)

**Asri Aulia** merupakan gadis kelahiran Bandung, 11 feb 2001. Institut Pemerintahan Dalam Negeri merupakan institusi dimana ia menempuh pendidikan saat ini pada Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas Politik Pemerintahan). Turut aktif pada beberapa kegiatan ekstrakurikuler praja seperti Pramuka, Pecinta alam, Cyber Pamong Management, Bela diri dan kegiatan pengembangan minat bakat lainnya. Email : [asriaulia120@gmail.com](mailto:asriaulia120@gmail.com)

**Firta Suci Muharrami** lahir di Aceh pada tanggal 5 April 2000 anak dari bapak Firmansyah dan Ibu Erlita merupakan seorang praja IPDN tingkat II pada prodi Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan juga sempat menempuh pendidikan 2 semester di Universitas Negeri Syiah Kuala Aceh dan mengambil program studi Agribisnis. Ketertarikan pada dunia ekonomi ini membuatnya selalu mengapresiasi setiap program yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah khususnya daerah Aceh dengan melatarbelakangi hukum syariah sesuai dengan aturan khusus di Tanah kelahirannya tersebut. Setelah lulus ia bercita-cita menjadi seorang Aparatur Sipil Negara yang amanah dengan selalu mengoptimalkan kesejahteraan rakyatnya. Email: [sucimuharami20@gmail.com](mailto:sucimuharami20@gmail.com)

**Hasril Manggo**, kelahiran Bintau, 07 february 2001, menyelesaikan Pendidikan SMA di Madrasah Aliyah Negeri Model 1 Manado, selanjutnya melanjutkan Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan status praja IPDN pada

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas Politik Pemerintahan). Sebagai anak seorang petani di kabupaten Bolaang Mongondow membuat dirinya tertarik pada pada sektor pertanian serta proses dalam memaksimalkan hasil pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow. Email: hsrilmnggo07@gmail.com

**Millen Tawar Tua Naibaho** anak dari bapak O. Naibaho dan ibu T. br Saragih merupakan seorang praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang sekarang sedang menduduki tingkat II (Madya Praja) dari Fakultas Politik Pemerintahan dengan program studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat. Lahir dan dibesarkan di Kota Kisaran Kabupaten Asahan membuatnya memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah khususnya daerah Kabupaten Asahan. Dengan mendapat anugerah menempuh pendidikan sebagai praja, membuatnya bersemangat dalam belajar khususnya untuk mengelola potensi daerah melalui SDA dan SDM yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Asahan. Email: millentawartuanaibaho@gmail.com

**Muhamad Taofan Angger Ardana**, kelahiran Kerajak, 04 November 2000, menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Praya, yang kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai praja pada fakultas politik pemerintahan program studi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Terdorong oleh semakin majunya sektor pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah membuat ia semakin menekuni isu-isu sosial ekonomi yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Email: anggerardana01@gmail.com

**Nurul Fitriani Panjili**, kini berusia 20 tahun. Lahir di Palu, 30 Desember tahun 2000. Saat ini berstatus sebagai Praja IPDN

angkatan 30 di Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Sejak sekolah menengah ia sudah terdorong dan aktif dibidang sosial terutama mengenai pembangunan dan pemberdayaan di daerahnya melalui indeks pendidikan dan ekonomi. Selain itu ia juga meminati isu lain seperti \_women empowerment, leadership, and gender equality. Email : [nurulfpanjili@gmail.com](mailto:nurulfpanjili@gmail.com)

**Sirilus Usanto Pabalayo**, kelahiran Sukalanting, 06 Maret 2002, menyelesaikan Pendidikan SMA di Sekolah Kristen Makedonia Ngabang, kemudian melanjutkan pendidikan menjadi praja IPDN pada Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Fak. Politik Pemerintahan). Tinggal di Kabupaten Landak yang mayoritas penduduknya bertani membuat dirinya tertarik pada sektor pertanian padi. Bermula dari tugas dosen, ia kemudian memperdalam isu pembangunan ekonomi untuk menemukan masalah pengelolaan hasil pertanian padi pada daerah Kabupaten Landak. Email: [usanto06@gmail.com](mailto:usanto06@gmail.com)

**Sri Indah Kartikasari**, lahir di Pangkalan Bun 3 Februari 2000 merupakan seorang praja IPDN tingkat II pada salah satu Fakultas Politik Pemerintahan dengan program studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Lahir dan dibesarkan di Pangkalan Bun membuatnya memiliki kepedulian tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta SDA di Pangkalan Bun. Dirinya sangat mengapresiasi berbagai program pemerintah yang dinilai sangat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Diharapkan setelah lulus dalam beberapa tahun mendatang dirinya dapat ikut bergabung bersama pemerintah untuk menciptakan program serta inovasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjadikan Kota Pangkalan Bun yang lebih mandiri, efektif serta berkelanjutan. Email: [sriindahkartikasari@gmail.com](mailto:sriindahkartikasari@gmail.com)

**Angelina Kamila Lalo**, Praja IPDN tingkat kedua, lahir dan dibesarkan di Nusa Tenggara Timur, pulau paling selatan Indonesia, Sumba. Memiliki panggilan moral yang besar terkait isu kemanusiaan dan ekonomi. Terlahir di daerah yang memiliki potensi wisata alam dan budaya membuatnya ingin mempelajari lebih banyak tentang isu perekonomian. Disamping itu ia memiliki bakat bermusik dan tergabung dalam beberapa organisasi didalam kampus. Email: angelilalo26.@gmail.com

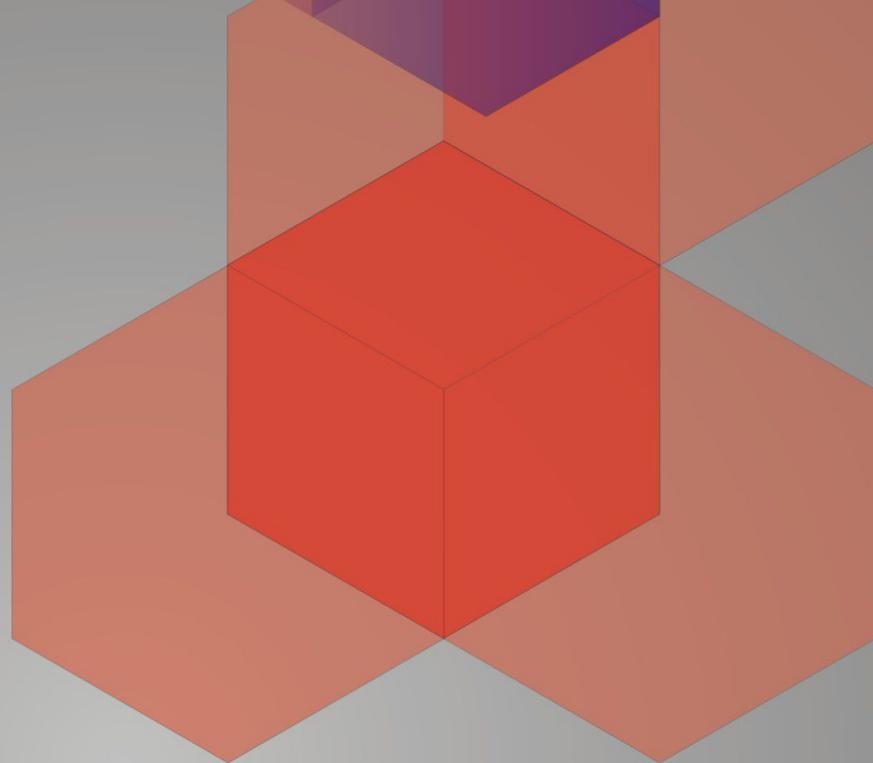
**Dicky Maulana Saputra** adalah Praja IPDN pada program studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Fak. Politik Pemerintahan). Tumbuh dan besar di Kota Palangkaraya, membuat dia melihat banyak perubahan yang terjadi di daerahnya. Berawal dari keresahan ketika menyusuri Kota Cantik Palangkaraya menggunakan sepeda motor lalu bergerak untuk mengulik permasalahan pembangunan yang ada di daerah. Dia kemudian mulai mempelajari isu-isu sosial terkait pembangunan di daerah nya. Prestasi banyak diraih dari kegiatan non-akademik ketika masih berseragam SMA dari tournament futsal. Email: dicky05.dm@gmail.com

**Dita Septiara Wulandari**, lahir di Banyuwangi, 19 September 2001, merupakan praja tingkat II yang sedang menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Pada bidang studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan. Ketertarikan pada bidang pembangunan ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah menjadikannya ingin mengangkat topik tersebut untuk memajukan daerahnya. Selain tertarik di bidang kepenulisan, Dita juga aktif di olahraga bulutangkis. Email: ditaseptiara19@gmail.com

**Rizky Eggy Chandra Bu'ulolo**, kelahiran Rantau Prapat, 27 Juni 1999, merupakan Praja IPDN Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Fakultas Politik

Pemerintahan). Ketertarikannya dalam dunia pemerintahan yang menjadikannya motivasi untuk menempuh pendidikan di IPDN. Minatnya dalam menanggapi permasalahan pembangunan ekonomi menjadikan fokus utamanya untuk mendalami masalah tersebut guna mencari solusi untuk mengembangkan Setiap Daerah di Indonesia khususnya Tebing Tinggi. Di samping minatnya di bidang akademik, ia juga gemar berolahraga, diantaranya berenang, badminton, dan aktif dalam kegiatan beladiri. Email: [rizkyeggychandra7522@gmail.com](mailto:rizkyeggychandra7522@gmail.com)

“Pembangunan ekonomi inklusif memerlukan pendekatan yang afirmatif dari setiap kebijakan dirumuskan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pertanyaan tentang kepada siapa pembangunan berpihak setidaknya bisa dijawab melalui keberpihakan pemerintah pada sektor ekonomi informal. Sesungguhnya paradigma desentralisasi membuka ruang inovasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”



ISBN 978-623-6228-64-7



Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat  
Fakultas Politik Pemerintahan  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri